Victor Feodorovich Sychev

Islam Indonesia

di mata Orientalis Rusia

Islam Indonesia

di mata Orientalis Rusia

Victor Feodorovich Sychev
Judul Asli: **Indoneziya I Musul'manski Mir V XX Veke: Problemi Religiozno-politicheskogo Vzaimodeistviya I Uchastiya V Organizovannom Islamskom Dvizhenii Stran Azii I Afriki**

Penerbit: **Rusaki, Moscow, 2003**

Penerjemah:
Wan Jamaluddin Z

Penyunting terjemahan:
Harapandi Dahri

Penyelaras akhir:
Imran Siregar

Diterbitkan oleh:
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Alamat:
Jl. Rawa Kuning No. 6
Pulo Gebang Cakung Jakarta 13950
Telp. (021) 4800725 Fax. (021) 4800712

Tata letak: **Lani Haelani**

Cetakan I, Oktober 2008

ISBN: 978-979-9099-56-3

Judul Asli:

INDONEZIYA I MUSUL'MANSKI MIR V XX VEKE: PROBLEMI RELIGIOZNO-POLITICHESKOGO VZAIMODEISTVIYA I UCHASTIYA V ORGANIZOVANNOM ISLAMSKOM DVIZHENII STRAN AZII I AFRIKI

[Indonesia dan Dunia Islam pada Abad 20:
Problematika Gerakan Politik-Keagamaan Organisasi Islam
di Asia-Afrika]

Penerbit:
RUSAKI, MOSCOW, 2003
(INSTITUT VASTOKOVEDENIYA RASSIISKOI AKADEMI NAUK)
(Institute for Oriental Studies, Russian Academy of Sciences =
Institut Kajian Ketimuran, Akademi (Lembaga) Ilmu Pengetahuan
Rusia)

TENTANG PENULIS

VICTOR FEODOROVICH SYCHEV,

Doktor di bidang Ilmu Politik, kini menjadi Guru Besar pada Universitas Negeri Ilmu-Ilmu Sosial di Moskow, dan dewasa ini dipercaya sebagai Anggota Dewan Pakar (Ekspert) pada Parlemen Rusia untuk masalah-masalah Hubungan Internasional. Ia dilahirkan pada tahun 1943 di kota Moskow, dan telah lebih dari 20 tahun lamanya menekuni profesi sebagai ilmuan di Institut Kajian Ketimuran, Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Pada awal dekade 1990-an pernah menjabat Direktur Pusat Kebudayaan Soviet/Rusia di Surabaya, Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Rusia adalah sebuah bangsa dengan peradaban yang distingsif yang membedakannya dengan masyarakat Eropa (Barat) pada umumnya. Nilai-nilai Timur, termasuk Islam, memberikan pengaruh signifikan dalam proses pembentukan peradaban bangsa ini. Persebaran Islam telah mencapai Derbent (Daghestan) dan daerah-daerah di Kaukasus pada pertengahan Abad VII Masehi (abad I Hijriyah) melalui misi-misi ekspedisi penjelajahan bangsa Arab Muslim.

Pandangan "miring" terhadap para pemikir-pemikir luar Islam khususnya yang kita sebut "orientalis" cenderung merupakan image yang terbangun pada sebagian besar umat Islam Indonesia adalah image miring dan selalu saja orang lain salah dan hanya kita yang benar. Padahal jika dilihat ungkapan-ungkapan yang tertera dalam beberapa teks hadits Nabi jelas memberikan penegasan bahwa kebenaran *(al-haqq)* dari manapun datangnya harus diambil karena hakikatnya adalah barang miliknya orang Islam yang hilang. "Al-Hikmatu Dâlatun ala al Muslimîn faina wajadtumûha akhadzû".

Apapun yang ditulis dan diinformasikan orang jika -setelah dilakukan verifikasi-ternyata membawa kebenaran, maka Islam menganjurkannya untuk diambil dan disebarkan dan bahkan bisa dijadikan sebagai referensi dalam melihat persoalan-

persoalan yang muncul. Dan sudah saatnya kita bangun persepsi bahwa kebenaran dan informasi darimanapun datangnya harus diakomodasi tentunya dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi *(tabayun)* sehingga informasi yang kita terima menjadi shahih dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Buku "Islam Indonesia di mata Oreintalis Rusia" ini adalah salah satu bukti nyata bahwa tidak semua pandangan orang luar bahkan yang kita sebut sebagai "orientalis-sekalipun. Buku ini banyak menyajikan persoalan ke-islaman di Indonesia dengan berbagai paradigma sehingga dapat menjadikan pola keberagamaan di Indonesia menjadi pola ideal seperti yang diajarkan Islam.

Seperti kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis, progresif, selalu menggunakan akal dan pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang *(tawazun)* dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu (QS. al-`Ashr: 1-4) bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas bukan kuantitas (QS. al-Mulk: 2), egaliter, kemitraan, anti feodalistik dan nilai-nilai universal lainnya. Sebaliknya, Islam menentang sikap apatis, statis, tidak peduli terhadap lingkungan, otoriter, eksklusif, individualistik dan semacamnya.

Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menambah wawasan keislaman dan dapat memberikan sumbangan positif dalam cara memandang sebuah persoalan yang terkait dengan informasi dan kebenaran yang dibawa oleh orang di luar Islam. Al-qur'an juga menegaskan bahwa jika datang kepada kalian "orang fasiq" membawa informasi maka hendaklah melakukan tabayun (klarifikasi) sehingga apapun yang kalian peroleh menjadi kebenaran yang tidak menyalahi aturan.

Akhirnya kebenaran haqiqi hanya milik yang Maha Haqiqi Allah Swt., semoga kita menjadi makhluk-makhluk-Nya yang dapat menerima semua informasi kebenaran dari manapun datangnya. Amin.

Jakarta,   Oktober 2008

Kepala Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Jakarta

Drs. H. Imran Siregar

KATA PENGANTAR
Penerjemah

Pandangan, pendapat dan telaah yang dilakukan orientalis Rusia sangatlah jarang ditemukan di tanah air. Terlebih lagi telaah dan studi tentang Islam dan berbagai problematikanya, wa bil khusus tentang dinamika Islam di Indonesia. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan terbatasnya bilangan tokoh dan pakar dalam bidang ini di Rusia, atau – penerjemah menduga keras – lebih disebabkan karena minimnya publikasi dalam bahasa Indonesia yang mengangkat karya-karya mereka.

Victor F. Sychev adalah salah satu contoh dari sedemikian langkanya tokoh orientalisme Rusia yang dikenal, dibaca, dan dirujuk publik Indonesia. Memang publik pembaca di tanah air sudah pernah mengenal beberapa nama orientalis Rusia yang melakukan studinya tentang Islam di tanah air. Nama tenar Vladimir I. Braginsky, ilmuan Rusia asal kota Saint-Petersburg misalnya, sangat akrab di telinga kita. Bukunya yang diberi judul "Yang Indah, Berfaedah, dan Kamal" telah beredar luas dikalangan akademisi dan pembaca umum di Indonesia. Karya tersebut diangkat dari hasil penelitian tesis dan telaah disertasinya dalam bahasa Rusia yang berjudul Evolusi Puisi-puisi Melayu Klasik [Evolutsiya Malaiskogo Klassicheskogo Stikha] dan Istoriya Malaiskoi Literaturi [Sejarah Literatur Melayu], Moskow 1983. Namun Vladimir I. Braginsky memfokuskan studinya tentang Literatur Islam yang dihasilkan ulama Nusantara dari sudut pandang filologi dan susastera.

Begitu pula misalnya dengan "MahaGuru" dan sekaligus seteru akademis V.I. Braginsky dari kota Moskow, yang bernama Boris B. Parnikel. Yang terakhir ini pun mengkhususkan diri pada

telaah literatur keislaman Nusantara-Melayu dalam karyanya yang berjudul Pengantar Sejarah Literatur Nusantara Abad 9-19 M. Karya tersebut merupakan edisi terjemahan dalam bahasa Melayu-Malaysia dan diterbitkan di Kuala Lumpur dari naskah aslinya berbahasa Rusia yang berjudul Vvedeniye v literaturnuyu istoriyu Nusantari IX-XIX vv. Moskwa, 1980.

Sementara itu Aleksander K. Ogloblin, tokoh orientalis Rusia lainnya yang tercatat sangat sering melawat ke tanah air (ke Universitas Indonesia dan institusi lainnya), terutama sekali diakui kepiawaiannya dalam kajian Nusantara dari sudut linguistik dan ilmu bahasa. Beliaulah salah satu ilmuan terkemuka di Rusia dewasa ini yang senantiasa setia dan bersedia dihubungi kapanpun untuk persoalan-persoalan kebahasaan.

Memang ada nama lain seperti, A.I. Ionova yang meneliti tentang dinamika Islam dan Politik di Indonesia dan Asia Tenggara lewat dua buah karyanya yang berjudul Musulmanski natsionalizm v savremennoi Indonezii (1945-1965) [Nasionalisme Islam Indonesia Modern (1945-1965)] diterbitkan di Moskow pada tahun 1972, dan Islam v Yugo-vastochnoi Azii: Problemi savremennoi ideinoi evolutsii) [Islam di Asia Tenggara: Problematika evolusional pemikiran modern] diterbitkan di Moskow pada tahun 1981. Namun pembahasannya tentang Islam di tanah air, menurut hemat kami, hanya mendapat proporsi yang sedikit dari yang seharusnya. A.I. Ionova hanya membatasi kajiannya pada periode 1945-1965 yakni menyoroti dinamika Islam di Indonesia era Revolusi Kemerdekaan RI hingga Orde Lama.

Mungkin dari sisi inilah perbedaan sekaligus keunggulan karya Victor F. Sychev yang kami temukan telah melakukan kajian yang cukup luas dan mendalam tentang persoalan serupa. Yaitu pebahasan tentang Islam di Indonesia dari perspektif politik dan hubungan internasional, yang menjadi spesialisasi keahlian

Victor F. Sychev, dengan menjangkau beberapa persoalan terkait lainnya hingga penghujung Millenium yang lalu.

Keunikan dan sekaligus kekuatan lainnya dari buku Victor F. Sychev, yang dewasa ini tengah pula bekerja sebagai salah seorang anggota Dewan Pakar untuk masalah-masalah internasional di Parlemen Rusia, adalah dalam penerapan metodologi pembahasannya yang sangat ketat memegang asas dialektika historisme.

Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam bagian pendahuluan maupun dalam bab-bab pembahasan buku ini. Point terpenting dari metodologi dan pendekatan dalam pembahasan buku ini adalah bila karya-karya orientalis Rusia lainnya kental didominasi corak dialektika historisme dalam semangat sosialis-komunisme yang atheistik, namun Victor F. Sychev justru memaparkan analisanya dalam bingkai spiritualisme agama.

Karenanya karya ini dapat dijadikan salah satu simbol dan refleksi dari semangat keberagamaan yang tengah tumbuh kembang di bumi Rusia sejak reformasi ala glasnost dan perestroika dikumandangkan hingga dewasa ini.

Akhirnya, ucapan terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan terutama sekali kepada Sdri. Suri Suryani, Fitri Nuryati, Yudhika Madhuri dkk. yang telah berjibaku bersama melakukan penterjemahan, revisi dan adaptasi terhadap buku ini. Demikian pula kepada Bapak A. Fahrurodji, Asisten Direktur Pusat Kebudayaan

Rusia Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta, Pengajar dan Editor Jurnal Glasnost (J ournal of Slavic-Russian Studies) di Jurusan Rusia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, dan penulis buku: Rusia Menuju Demokrasi, yang telah bersedia memberikan kata pengantar pada buku ini. Takzim kami haturkan pula kepada Bpk. Dr. H. Harapandi Dahri, MA serta rekan-rekan

di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI Jakarta yang telah berkenan membantu penerbitan buku ini hingga dapat hadir di pangkuan pembaca.

Di atas semua itu, ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA serta Prof. Dr. Suwito, MA (Pendiri dan Dewan Pakar pada Pusat Kajian Islam Kawasan Asia Tengah dan Rusia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang dengan penuh ketekunan dan kesabaran memberikan pembinaan dan pengarahan untuk perkembangan dan kemajuan Pusat Kajian ini.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Prof. Dr. Victor F. Sychev yang telah memperkenankan kami melakukan penterjemahan dan penerbitan karyanya tersebut. Begitu banyak romantika yang menghiasi proses penerbitan buku ini. Namun berkat hidayah-Nya jualah semua itu dapat dicarikan solusinya. Sekali lagi, salut untuk kesabaran dan kegigihan berbagai pihak dalam merealisasikan buku ini. Namun demikian, buku ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu saran, kritik, dan evaluasi sangatlah berguna demi perbaikan pada masa-masa berikutnya.

Jakarta, 17 Agustus 2008.

Penerjemah,

WAN JAMALUDDIN Z, MA, Ph.D.

Direktur Pusat Kajian Islam
Kawasan Asia Tengah dan Rusia
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PENGANTAR
Edisi Indonesia

Menimbang Peran Islam dalam Hubungan Rusia-Indonesia

Oleh
A. Fahrurodji

/Nam veritsya, cto poznakomivshis' s nashey religiey, lyudi uvidyat prezhde vsego ee istinnie dukhovnie tsennosti, poymut vselensky gumanistichesky kharakter Islama kak poslednego zvena v tsepi Bozhestvennogo otkroveniya.

--Mufty Ravil' Gaynutdin

Predsedatel' soveta muftiev Rossii/

Kita percaya, bahwa setelah berkenalan dengan agama kita (Islam), orang akan melihat nilai-nilai spiritualitas yang hakiki, memahami karakter humanistis universal Islam, sebagai siklus terakhir anugerah Ilahi.

--Mufty Ravil' Gaynutdin

Ketua Dewan Mufti Rusia

Kutipan di atas mengabarkan sedikitnya dua hal penting kepada kita. Pertama, realitas dan eksistensi Islam di Rusia, sebuah negara yang notabene selalu diasosiasikan dengan unsur-unsur ateistik yang jauh dari nilai-nilai Ketuhanan, terlebih-

lebih Islam. Kedua, adanya sebuah spirit (baca: semangat) baru yang luar biasa untuk berusaha memahami Islam secara lebih mendalam tak hanya bagi peningkatan kualitas keimanan kaum muslim Rusia, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif tentang hakikat nilai-nilai Islam yang universal.

Ini menjadi penting ketika dunia 'terlena' oleh pencitraan negatif atas Islam yang secara sistematis dihembuskan oleh Barat dengan berbagai isu global termasuk terorisme internasional yang selalu diasosiasikan dengan Islam. Dan yang menarik, bahwa suara itu justru muncul di salah satu sisi bumi kita, dimana agama pernah diharamkan eksistensinya.

Sebagaimana kutipan di atas, buku "Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia" karya Victor F. Sychev, seorang peneliti di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, ini menunjukkan kepada kita satu dari sekian banyak upaya masyarakat Rusia untuk memahami Islam beserta realitas historisnya di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Karya yang diterjemahkan dari bahasa aslinya (Rusia) oleh Dr.Wan Jamaluddin Z dan beberapa alumni Rusia ini menunjukkan perhatian para ilmuwan Rusia tentang peranan Islam bagi penguatan posisi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka di kancah internasional.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya bisa memainkan peranan penting dalam memecahkan berbagai persoalan internasional khususnya yang berkaitan dengan dunia Islam. Namun, menurut sang penulis, peranan itu belum dimainkan secara maksimal. Pemerintahan Orde Baru, cenderung memarjinalkan suara-suara umat Islam baik dalam kehidupan domestik maupun dalam menjawab permasalahan internasional. Walaupun menjelang akhir pemerintahannya Soeharto, yang menjadi fokus penelitian

penulis, telah melakukan berbagai kebijakan radikal menyangkut peran serta Islam dalam lingkup nasional.

Sychev optimis bahwa ke depan Islam sebagai realitas obyektif dalam kehidupan sosio-politik Indonesia akan memainkan peran yang signifikan tak hanya bagi kemaslahatan umatnya di Indonesia, namun juga mewarnai peta perpolitikan pasca Perang Dingin.

Ini sejalan dengan renaissance Islam (vosrozhdenie Islama) di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Kebangkitan Islam menjadi terminologi menggambarkan kembalinya aktivitas beragama yang mengalami perkembangan yang pesat, tak hanya secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Secara kuantitatif, perkembangan jumlah tempat-tempat peribadatan (masjid-masjid) dan organisasi–organisasi keislaman berkembang sangat pesat. Jika pada masa Stalin (1937) jumlah masjid di seluruh Rusia kurang dari 100 buah (itupun hanya difungsikan secara seremonial), pada tahun 1995 jumlahnya telah mencapai 5 ribu masjid. Sementara jumlah organisasi keislaman selama kurang dari saru dasawarsa sejak runtuhnya Uni Soviet (1991-1999) mengalami peningkatan dari 870 menjadi 3 ribu organisasi. Organisasi-organisasi ini menjadi faktor penggerak kehidupan beragama secara kualitatif, dengan menyelenggarakan pendidikan-pendidikan keislaman, pendirian madrasah bagi generasi muda Islam.

Rusia adalah sebuah bangsa dengan peradaban yang distingsif yang membedakannya dengan masyarakat Eropa (Barat) pada umumnya. Nilai-nilai Timur, termasuk Islam, memberikan pengaruh signifikan dalam proses pembentukan peradaban bangsa ini. Persebaran Islam telah mencapai Derbent (Daghestan) dan daerah-daerah di Kaukasus pada pertengahan Abad VII Masehi (abad I Hijriyah) melalui misi-misi ekspedisi penjelajahan bangsa Arab muslim.

Kawasan Kaukasus memiliki posisi dan peranan strategis bagi hubungan ekonomi perdagangan yang menghubungan kawasan Eropa Timur, Asia Tengah dan Timur Tengah yang mendorong persebaran Islam secara damai. Wilayah Daghestan, Chechnya dan Ossetia merupakan gerbang bagi persebaran Islam lebih jauh. Konon di kawasan ini merupakan basis Islam tradisional yang kuat. Umumnya, masyarakat Kaukasus adalah kaum sunni dengan mazhab Hanafi (Chechnya, Kaukasus Utara) dan mazhab Syafii (Daghestan). Sementara Syi'ah mengalami persebaran yang pesat kawasan Asia Tengah khususnya di Azerbaijan.

Tahun 922 Masehi Kerajaan Bulgaria di Volga, di bawah pemerintahan Almysh telah mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Hal ini menjadikan Bulgaria Volga menjadi negara muslim pertama di kawasan Eropa Timur. Sementara itu Kristen Ortodoks baru secara resmi dianut oleh orang Rusia pada tahun 988 Masehi, ketika Pangeran Vladimir dari Kiev melakukan pembaptisan massal dan menjadikan agama Kristen Timur tersebut sebagai agama resmi. Walaupun perjalanan sejarah selanjutnya menunjukkan kedekatannya dengan Peradaban Barat (Kristen), namun nilai-nilai Timur yang sudah terlanjur terjalin merupakan sebuah realitas yang tak terhapuskan. Ini yang pada gilirannya menempatkan Rusia pada posisi khusus yang menghubungkannya antara peradaban Timur dan Barat.

Relasi "Barat-Rusia-Timur" merupakan formula umum dalam menjawab pertanyaan eksistensial bangsa ini sebagaimana yang tertuang dalam Russian Idea, sebuah terminologi filosofis yang mengupas maksud dan inti keberadaan bangsa ini.

Ini menjadikan Rusia lebih 'obyektif' memahami persoalan Timur dan Islam ketimbang masyarakat Barat lainnya yang cenderung prejudis. Ketika Barat 'tersulut' oleh teori Perbenturan Peradaban (Clash Civilisation) pasca Perang Dingin, dengan mencurigai Islam sebagai 'musuh berikutnya', Rusia justru

mengedepankan dialog Islam-Kristen sebagai upaya penguatan peradaban Rusia pasca Uni Soviet.

Sejak diberlakukannya UU tentang Kebebasan Berkeyakinan tahun 1990 (masih pada era Uni Soviet) aktivitas keagamaan di Rusia mengalami peningkatan dramatis. Agama yang sebelumnya dipersepsi sebagai unsur destruktif bagi bangunan sosialis-komunis, justru digandrungi masyarakat, khususnya kaum muda. Saat ini Setidaknya 60 dari 100 orang yang mengaku beragama adalah mereka yang berusia produktif (22-50 tahun) dan 10-15 orang di antaranya adalah beragama Islam. Sebagai upaya mengantisipasi "Islamic boom" kaum muslim Rusia mengambil langkah penting penyiapan kader-kader mubalighnya. Program kerjasama pendidikan dengan negara-negara muslim seperti: Mesir, Arab Saudi, Turki, Qatar dan Syiria dibuat dan langkah konkretnya berupa pengiriman para guru agama untuk memperdalam Islam di negara-negara tersebut. Belum lama ini pemerintah Rusia memfasilitasi berdirinya Universitas Islam pertama di negeri itu. Dalam arena internasional, posisi Rusia seringkali berseberangan dengan Barat (baca: Amerika) dalam menyikapi berbagai konflik yang melibatkan dunia Islam. Kebijakan Rusia menyangkut berbagai konflik di Timur Tengah selain merepresentasikan kepentingan geopolitiknya di kawasan itu, juga menunjukkan empatinya terhadap Timur dan Islam. Tak jarang Rusia menjadi mediator bagi kebuntuan proses penyelesaian konflik Barat-Timur (baca: Islam).

Konsep relasi "Barat-Rusia-Timur" pasca Perang Dingin terimplementasi dalam relasi "Barat-Rusia-Islam" dimana memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Rusia untuk memainkan percaturan politik internasional melalui pendekatan dialog antarperadaban.

Pada buku yang sekarang di tangan Saudara ini, tersirat satu pengakuan sekaligus harapan, setidaknya dari kalangan

intelektual Rusia, bahwa Islam Indonesia memiliki dan bisa memainkan peran yang signifikan dalam menjawab berbagai persoalan dunia dewasa ini. Ini menjadikan posisi tawar Indonesia di mata Rusia menjadi lebih tinggi. Artinya, Islam menjadi faktor positif dalam memperkokoh hubungan Indonesia-Rusia di satu sisi, dan memberikan manfaat dan kemaslahatan kaum muslim dunia, di sisi lain.

Buku ini cocok bagi pemerhati kajian keislaman, studi hubungan internasional dan khalayak umum yang tertarik akan hubungan Indonesia – Rusia. Kami berharap buku ini bisa memberikan stimulan bagi peningkatan peranan Islam dalam mengisi hubungan Indonesia – Rusia di masa-masa yang akan datang.

Depok-Permata Darussalam,
mid-Oktober 2008

Tertanda,

A. Fahrurodji

BAB I
Pendahuluan

Nasib suatu bangsa mengikuti jiwa universal
yang mencerminkan entitas-substansialnya.
Hanya jiwa itulah yang dapat
menghantar suatu bangsa menuju kesempurnaan
dan menuntunnya menuju perkembangan yang tiada henti.
(P.Ya. Chaadayev, Risalah Filsafat)

Dunia ini satu dan tak terbagi. Inilah kebenaran abadi yang senantiasa berlaku dalam hitungan waktu dan epoch manusia. Dunia ini tak terbagi, bahkan dalam ruang dan waktu sekalipun. Suatu peristiwa masa lalu tak pernah berlalu begitu saja, terkadang ia akan kembali hadir meskipun tidak menimpa generasi yang sama, tapi mungkin pada generasi berikutnya dalam wujud yang serupa atau berbeda. Seperti yang sudah diketahui, ikatan suatu generasi terbangun tidak hanya atas sesuatu yang konkret secara materi, namun juga terkonstruksi melalui jalinan spiritual, termasuk kebenaran universal yang mencakup prinsip-prinsip nyata humanisme yang senantiasa hadir dari waktu ke waktu, baik di tingkat bawah sadar maupun yang berlaku dalam persaingan-persaingan motivasi politik manusia.

Dengan menyimak peristiwa-peristiwa masa lalu, sering memaksa kita untuk menyimpulkan bahwa peristiwa atau

kejadian, fakta-fakta, dan juga tendensi-tendensi politik mengalami pengulangan dari masa ke masa. Saat ini, bahkan dalam realitas keseharian, kita pun dapat menemukan adanya kesamaan dan kemiripan dalam semua itu. Fenomena ini dapat dijelaskan tidak hanya dengan sekumpulan instrumen politik manusia yang ada sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Sebenarnya, yang menjadi faktor penentu adalah kekuatan pergerakan yang dilahirkan oleh tindakan dan motivasi manusia. Termasuk dalam kategori ini semua usaha untuk menciptakan kondisi yang nyaman semaksimal mungkin untuk diri sendiri, etnik sendiri, bangsa sendiri, tentunya bukan untuk kepentingan bangsa lain. Namun kadang-kadang diperhitungkan juga posisi negara-negara sekitar demi kepentingan perkembangan bangsa.

Dunia satu dan tak terbagi, namun pada waktu yang sama secara permanen juga menampakkan wajah keberagaman dalam skala global dan regional, dimana setiap perwujudannya memiliki pula pilihan-pilihan warna dinamika tersendiri.

Dalam kajian ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus yang merefleksikan dinamika seperti di atas. Pada tahun 1870-an, rakyat Indonesia di pesisir Utara Sumatera, tepatnya di Aceh, sedang melancarkan perjuangan gigih dalam mempertahankan daerahnya dari serangan kolonial Belanda. Beberapa tokoh dan pemimpin Islam setempat melakukan ikhtiar politik dengan mengajukan permohonan bantuan persenjataan dan militer kepada Tsar Rusia. Permohonan ini mendapat respon langsung dari pemerintah Rusia dengan mengirimkan armada lautnya ke Sumatera untuk menjajaki kemungkinan dukungan militer bagi rakyat Aceh. Sayangnya pada saat itu sangat sulit bagi militer Rusia menjalankan misi bantuan militer ke Aceh, mengingat pangkalan utama militer Rusia di Pasifik (Vladivostok) berada terlalu jauh dari Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, para petinggi Angkatan Laut Rusia menyimpulkan bahwa intervensi militer Rusia secara langsung dalam front melawan Belanda di

Aceh diperkirakan akan berakhir dengan sia-sia. Disamping itu campur tangan militer Rusia di Aceh juga akan sarat muatan politik dan berdampak kurang menguntungkan bagi Rusia dalam percaturan politik bangsa-bangsa Eropa. Demikianlah, seandainya Rusia merealisasikan bantuannya dalam bentuk apa pun bagi perjuangan umat Islam Aceh melawan Belanda, dapat dipastikan hubungan Rusia-Indonesia akan memiliki corak yang berbeda dari saat ini.

Dari contoh kasus politik dan manuver militer, kita berpindah ke contoh lain yang lebih konkret. Sudah umum diketahui bahwa salah satu arah kebijakan publik untuk mewarnai pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Soviet yang digariskan oleh para ideolog dan pendukung Revolusi Oktober 1917 adalah mewujudkan lahirnya hegemoni baru dalam bentuk gerakan anti agama. Gerakan ini telah menciptakan tragedi terbesar bagi seluruh bangsa Rusia, terutama bagi etnis Rusia yang sejak lama telah memeluk agama Pravoslavia (Orthodoks). Tragedi ini sungguh mengerikan karena dijalankan dengan cara dan metode yang tidak berperikemanusiaan. Hegemoni ini telah memberangus tokoh-tokoh suci agama dari semua garis hirarkhi; suatu gerakan pemusnahan yang tiada bandingnya. Tidak ada peradilan, apalagi keadilan. Tanpa saksi dan bukti, ratusan ribu pemuka agama dan umatnya ditembak mati.

Namun demi ambisi dan hasrat politiknya, para pemimpin Revolusi ternyata juga sangat aktif memainkan dan memanfaatkan peran dan peta kekuatan umat Islam, baik secara regional maupun internasional. Pendekatan stratifikasi kelas sosial di kalangan umat Islam diterapkan bagi kepentingan kaum revolusioner untuk menciptakan konfrontasi antara kaum penindas (kolonial Barat) dan yang tertindas (bangsa-bangsa Islam di Asia dan Afrika). Kaum revolusioner menjadikan umat Islam sebagai kekuatan aliansi dalam memperjuangkan hegemoni ide sosialisme dan komunisme. Hal ini terlihat cukup jelas dalam kebijakan-

kebijakan politik kaum revolusioner, yang dapat dikatakan sebagai sebuah persimpangan jalan yang tumpang tindih. Di satu sisi secara represif mereka menindas umat beragama Rusia, di sisi lain mereka mengerahkan kemampuannya untuk memfasilitasi aktivitas dan ritual umat Islam dari berbagai negara Asia Tenggara dan Timur Jauh, termasuk bantuan untuk umat Islam Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji ke Mekkah dan Madinah.

Pada paruh kedua tahun 1970-an abad lalu, dalam materi arsip India telah ditemukan sejumlah dokumen menarik milik Kementrian Luar Negeri Inggris yang menuturkan bagaimana sebuah negara muda, Republik Soviet, yang masih dibelit situasi ekonomi yang sulit, namun masih berusaha menyediakan dana yang cukup besar untuk mengorganisir perjalanan haji tahun 1920-1930an bagi umat Islam Asia Tenggara (terutama dari Indonesia dan Malaysia) ke Mekkah dan Madinah. Pada saat itu dibentuk sistem transportasi haji yang mula-mula menyusuri daratan China melewati Asia Tengah, kemudian menyeberangi Laut Kaspia menuju Baku atau Makhachkala hingga sampai di Odessa (sebagai pelabuhan transit sementara para haji). Selanjutnya dengan menumpang kapal sipil Rusia, rombongan bertolak menuju pelabuhan Jeddah, Arab Saudi. Tatkala prosesi ritual haji tengah berlangsung, kapal Rusia tersebut menunggu di pelabuhan Jeddah sampai pada akhirnya kembali membawa rombongan haji ke Odessa, untuk bertolak kembali pulang ke negara mereka masing-masing.

Untuk menguji validitas data yang terdapat dalam arsip ini, pada tahun 1978-1979, penulis melakukan penelitian ke Museum Bahari di Odessa. Di tempat ini penulis tidak saja memperoleh informasi-informasi yang memperkuat keabsahan data tersebut, tetapi juga berhasil melakukan wawancara langsung dengan salah seorang kapten kapal Rusia, yang telah mengangkut jamaah haji asal Indonesia dan negara-negara Asia Afrika pada tahun 1920-

an. Meski usia sang kapten telah sangat lanjut, namun dengan senang hati ia menunjukkan secara langsung lokasi-lokasi di sekitar pelabuhan Odessa yang pernah digunakan sebagai tempat persinggahan jamaah haji Indonesia sebelum bertolak ke Mekkah.

Ditemukan pula beberapa fakta lainnya yang menuturkan keterlibatan dan peran serta negara baru Uni Soviet dalam percaturan politik keagamaan umat Islam Asia dan Afrika. Tidak diragukan lagi bahwa kampanye aktif Komintern (Komunisme Internasional). Pada saat itu telah dibentuk secara khusus sebuah divisi Islam yang bertugas membuat kontak-kontak intensif dan kerjasama aktif dengan berbagai organisasi Islam Indonesia. Divisi ini dirancang khusus untuk melancarkan strategi kaum revolusioner dengan menjadikannya sebagai salah satu garda terdepan komunis internasional dalam melawan kapitalisme Barat. Namun secara dialektis, penerapan strategi ini justru menunjukkan hasil yang sangat bertolak belakang secara diametral. Dampak nyata dari strategi ini adalah tumbuh suburnya spirit kebangkitan Islam dan kesadaran spritualisme Islam secara umum melebihi perkembangan agama-agama dunia lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha. Hal ini direfleksikan dengan semakin menguatnya spiritualisme dalam kehidupan beragama umat Islam, dibandingkan aspek-aspek lainnya, seperti materialisme dan pragmatisme. Ada pengalaman yang mengajarkan bahwa tatkala suatu kebijakan politik memperoleh hasil yang tak pernah diprediksikan sebelumnya, selanjutnya akan lahir suatu kebebasan yang tak bertanggungjawab. Atau bahkan tak terpenuhinya suatu keinginan (target politik) yang tak jarang berbuntut bangkitnya fundamen-fundamen keagamaan yang jauh melampaui kebutuhan materi duniawi dan kepentingan pragmatisme semata. Dunia yang tak terbagi tak pelak lagi menuntut adanya kesadaran spiritual universal,

yang pada lazimnya senantiasa saling bersinggungan dan (tak jarang) memporakporandakan konsepsi politik dan ide-ide suatu gerakan.

Keinginan untuk memperoleh tujuan-tujuan politik jangka pendek secara instan, tanpa mengindahkan pemikiran dan analisa filosofis yang mendalam tentang suatu masalah, acap kali dipertontonkan oleh negara-negara adi kuasa (Uni Soviet dan Amerika Serikat) dan berakhir dengan hasil-hasil yang tidak diharapkan, yang jauh dari perkiraan. Suatu contoh nyata tentang hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang dapat dikatakan sebagai agenda politik dunia pada tiga dasawarsa terakhir. Kita mungkin sepakat bahwa invasi militer Uni Soviet ke Afganistan pada tahun 1979 merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya suhu aktivitas politik organisasi dan gerakan umat Islam seperti yang terjadi di Afganistan sendiri. Bahkan yang jauh lebih penting adalah fenomena serupa hampir di seluruh bagian dunia Islam lainnya. Rezim Soviet telah merancang dan mencanangkan suatu gerakan untuk kepentingan mereka sendiri, namun fakta di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda, dan yang patut digarisbawahi adalah dampak yang ditimbulkan tidak hanya melahirkan polemik bilateral, namun secara lebih luas lagi telah menghadiahkan suatu tragedi bagi seluruh umat Islam Indonesia, dan sangat mungkin pula, telah menjadi masalah umat manusia secara universal.

Contoh lain dalam kerangka politik serupa yang dapat dikemukakan di sini adalah beberapa peristiwa penting dalam satu darsawarsa terakhir yakni Amerika Serikat dan Osama Bin Laden. Telah diketahui umum bahwa pada tahun 1980-an, Amerika Serikat dengan segenap cara memberikan dukungan dan bantuan kepada Osama Bin Laden saat Osama melancarkan peperangan melawan invasi militer Uni Soviet di Afganistan. Pada saat itu sama sekali tidak terlintas dalam perhitungan Amerika

Serikat, alasan Osama begitu sengit melakukan perlawanan terhadap militer Soviet di Afganistan. Agaknya bagi Amerika Serikat, sepertinya lebih menguntungkan menggunakan tangan umat Islam untuk memukul militer Uni Soviet. Apa yang terjadi kemudian? Jika kita berpegang pada data resmi, meski tanpa dukungan bukti yang meyakinkan, maka otak penyerangan tragedi 11 September 2001 adalah para pengikut setia Osama Bin Laden. Namun penanganan terhadap aktor-aktor tragedi ini belum juga tuntas. Demikianlah, pada era 1980-an pemerintah Amerika Serikat tampaknya tidak pernah membayangkan, apalagi memperhitungkan bahwa dalam waktu tak berselang lama akan lahir gerakan fenomenal seperti yang ditulis oleh media mereka akhir-akhir ini, yaitu "era kebencian umat Islam terhadap Amerika".

Penulis tak memandang perlu membicarakan persoalan hubungan Amerika dengan dunia Islam secara detail dalam tulisan ini. Terlebih lagi problematika tersebut telah dikupas cukup tuntas dalam monografi terbitan "Irfon" di Dushanbe pada tahun 1989. Tentu akan lebih menarik pada studi kali ini untuk memperhatikan proses kebangkitan dan pertumbuhan hukum yang tak mudah goyah serta memelihara keutuhan sejarah secara menyeluruh dan nilai-nilai keadilan yang memperoleh wadah artikulatif dalam konstruksi politik dan kebijakan pengembangan negara, bangsa, dan umat manusia seluruhnya.

Tampaknya, proses kebangkitan dan pertumbuhan hukum dimaksud lebih bersifat relief (fenomena luar) yang dapat diamati dalam rentang waktu yang berkelanjutan yakni sepanjang abad ke-XX. Millenium yang baru lalu agaknya menorehkan jejak-jejak sejarah yang cukup kompleks dan tak jarang saling bertolak belakang. Abad ke-XX ini ditandai sebagai abad perjuangan bangsa-bangsa Asia–Afrika untuk mencapai kemerdekaan. Bersamaan dengan itu di dunia terjadi ketegangan sosial yang serius yang mengiringi dua perang dunia dengan memakan

korban puluhan bahkan ratusan juta jiwa.

Studi ini lebih ditujukan untuk mengkaji persoalan-persoalan hubungan dan jalinan agama dan politik yang terjadi pada umat Islam Indonesia, sebuah populasi muslim terbesar di dunia, dengan organisasi dan gerakan Islam bangsa-bangsa Asia Afrika dalam konteks hubungan internasional. Untuk itu akan dianalisa masalah tersebut dengan cara menaruh fokus pada perkembangan Islam di Indonesia sebagai variabel utama.

Saat ini kata agama dan politik seakan telah menjadi santapan keseharian masyarakat, dan Puji Tuhan, ternyata sikap apriori telah semakin berkurang karenanya. Akhirnya kita pun berangsur secara pasti untuk menjauh dari sikap dan pandangan maupun pemahaman agama yang vulgar dan primitif, yang selama ini banyak mendominasi. Agama tidak menyelimuti seluruh aspek kehidupan sosial-politik, namun agama menempati posisi penting dalam spiritualitas masyarakat.

Menolak agama berarti sama saja dengan menciptakan jurang pemisah dengan masa lalu, padahal masa lalu bisa membantu kita mengetahui apa selanjutnya yang dapat kita lakukan. Agama merupakan wahyu yang diturunkan untuk dan demi kemashlahatan umat manusia. Pendiri agama Kristen, Yesus Kristus, diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dengan menanggung semua dosa di pundaknya sendiri. Para pengikut setianya adalah makhluk hidup, sehingga mungkin ada diantaranya yang berlebih-lebihan dan memberi persembahan kepada Tuhan, ada pula yang ingkar dan berperilaku maksiat. Tak jarang terjadi pula kesalahan karena penafsiran yang keliru dan manipulatif di antara masyarakat. Namun semua itu terjadi karena ulah manusia belaka. Kesalahan tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan agama itu sendiri karena dari abad ke abad di dunia ini selalu ada utusan Tuhan dan penerusnya secara konkret memandu umat manusia. Kalaupun manusia terpilah

menjadi beragam, haruslah dimaklumi bahwa mereka itu bukan tanpa dosa. Oleh karena itu menghakimi suatu agama berdasarkan perilaku umatnya sungguh sama sekali tidak berdasar.

Filosof Rusia N.A Bardyaev menegaskan bahwa "kelahiran kembali (Renaisance) bermula dari adanya perhatian kepada warisan, ide-ide, dan pemikiran yang membawa perubahan, bertolak dari apa yang ada saat ini dengan belajar kepada masa lalu.....Kita berpaling kembali kepada warisan masa lalu untuk mencari bentuk pembaharuan berupa nilai-nilai yang hidup dan berguna, serta idealitas yang fana". Selanjutnya Bardyaev menambahkan, "keabadian akan lebih kita rasakan dalam kesadaran kita akan masa lalu....Semua hal baru, kontemporer, dan yang belum lama tercipta, tidaklah mengerti akan perjuangan agung melawan kebusukan, keabadian hidup bergulir mengiringi arus waktu kehidupan itu sendiri...."[1]

Sejak awal kehadirannya keterkaitan antara politik dan agama memperlihatkan fenomena yang kompleks dan tak jarang saling bertentangan. Pada dasarnya kaitan antara keduanya memiliki prinsip-prinsip moral dan etika, sekalipun masing-masing cukup sering menampakkan otoritas otonomnya. Betapapun sulitnya mempertemukan tuntutan politik dan tuntutan agama, seperti yang terlihat dalam fakta hubungan dan interrelasi keduanya, dalam Islam kedua aspek ini tidaklah terpisahkan dan bahkan hubungan tersebut mendapat justifikasi doktrinal. Sudah dimaklumi, politik dalam aturan idealnya merupakan upaya mengatur dan mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintah bersama masyarakat. Agama juga terpanggil untuk menolong umat manusia. Agama apa pun pastilah membawa misi pengabdian bagi manusia. Dalam pemahaman Kristen, konsepsi "interrelasi otonomi" agama dan politik sangatlah dominan. "Pada dasarnya masyarakat politik dan gereja terpisah

1 Bardyaev, N.A. *Filsafat Pluralisme Filosofiya neravenstava*. Moskwa, 2001. hlm. 567-568.

dan tidak memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya" demikian doktrin Gereja Vatikan. Dan juga sudah tersebar luas doktrin Yesus Kristus yang menjadi fundamen ajaran gerejawi tentang otonomi agama dan politik: "serahkan urusan kekaisaran kepada Kaisar, dan urusan Tuhan kepada Tuhan". Demikianlah sang Juru Selamat memaklumkan otonomisasi antara politik dan agama. Dengan mengakui Kaisar Romawi sebagai pemimpin politik, Yesus Kristus bahkan telah menafikan pemujaan mutlak terhadap sang Kaisar yang dianggap sebagai titisan Tuhan dan kekuasaan dunia sebagai pancaran ilahi.[2]

Agama dan politik dalam doktrin Kristen saling terpisah (otonom), namun hal itu merupakan semata-mata agar antara keduanya tidak terjadi benturan atau tumpang tindih. Paus Johannes XXIII sering menegaskan bahwa: "sekalipun gereja bukanlah sari dunia, tapi ia berada di dunia ini". Berkenaan dengan doktrin Pravoslavia, gereja dan politik tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena keduanya mengabdi untuk kesejahteraan manusia. "Pravoslavia merupakan suatu pencaharian kehidupan pada Tuhan dan bagi kami segala bentuk dimensi kenegaraan dan segenap aspek kehidupan nasional adalah prioritas kedua. Seorang penganut Kristen dapat saja bergelut dalam bidang politik, namun tidaklah berarti bahwa agama telah berpolitik". Demikianlah sikap dan posisi doktrin gereja Pravoslavia Rusia. Ketetapan Dewan Tinggi Gereja Pravoslavia Rusia tertanggal 8 Agustus 1993 mengamanatkan kepada seluruh pengurus untuk mendukung peran serta mereka sebagai calon-calon dalam pemilihan umum legislatif Rusia.[3]

Agama memperlihatkan perannya yang teramat besar dalam politik dan tentunya dalam rangka memahami dunia atau potret

2 Kondrusevich, T. *Keterkaitan Agama Kristen dengan Politik Khristianskoye otnosheniye k politike*. "Vlast'". Moskwa, 1994 no.8, hlm. 69.

3 *Gereja dan Dunia Tserkov i Mir*. Moskwa, 2000, hlm. 78.

dunia yang diformulasikan oleh manusia sepanjang abad, dalam bentuk aktivitas dan gerakan tradisi keagamaan, termasuk norma dan tata nilai. Problematika interrelasi berbagai agama dan politik di beberapa negara memiliki aturan-aturan dan hukum spesifik. Pada waktu yang bersamaan, setiap agama besar dunia (Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghuchu) tidak hanya memiliki spesifikasi tersendiri, namun juga sisi-sisi eksklusif tertentu dalam mempengaruhi kehidupan politik di negaranya. Mempelajari keutamaan-keutamaan spesifik peradaban dan sejarah filsafat keagamaan suatu bangsa seringkali menemui kesulitan karena akan segera dijumpai perbedaan titik tolak analisa dan pemahaman awal terhadapnya.

Studi ini mencoba mencermati perkembangan pemerintah dalam masyarakat Islam terbesar dunia yang memiliki populasi muslim 88% dari keseluruhan jumlah penduduknya yang mencapai kurang lebih 230 juta jiwa. Sudah lama Indonesia dipandang sebagai wilayah feriferi Islam dunia, walaupun umat Islam Indonesia tidaklah menyebut dirinya sebagai kelompok yang baru saja memeluk Islam. Umat Islam Indonesia memandang titik sentrum Islam adalah Mekkah dan Madinah, namun ikatan dan keterpautan antara kedua wilayah senantiasa kokoh direnda bersama negara-negara Arab dan pusat-pusat Islam lainnya. Mencermati hubungan yang sudah berabad-abad lamanya antara Indonesia dan dunia Islam, akan memberikan pemahaman tentang tendensi yang mendominasi kehidupan keduanya dari generasi ke generasi, dari satu bentuk kekuasaan (pemerintahan) ke bentuk lainnya; sejak zaman kolonialisme Belanda, pendudukan militer Jepang, hingga ke era krisis kemerdekaan dan pasca Proklamasi. Zaman-zaman ini telah mengalir melalui beberapa fase pemerintahan; sejak pemerintahan otoriter hingga diktator, dan akhirnya menuju periode pemerintahan yang demokratis.

Adalah benar bahwa bentuk pemerintahan demokratis tidak dapat segera menjadi solusi masalah-masalah sosial-ekonomi dan politik. Tak jarang hasilnya justru sebaliknya. Banyak bermunculan masalah seiring dengan semakin terbukanya kebebasan yang diperoleh warga dan masyarakat; contohnya seperti yang tengah melanda Rusia.

Perhatian besar dalam studi ini dicurahkan untuk mempelajari hubungan Indonesia dengan dunia Islam lainnya yang berlangsung sepanjang abad ke-XX. Tentunya secara praktis, hal ini akan membawa kita mendatangi era kedatangan Islam ke Indonesia. Islamolog Rusia, V.V. Bartold berkeyakinan bahwa dalam memahami kemunculan sesuatu, seperti sebuah gerakan keagamaan, dan mempelajarinya secara utuh sangatlah sulit dilakukan dan tidak memiliki metode penelitian yang genetis. Dalam mempelajari sejarah dan budaya Islam, V.V. Bartold membuat kesimpulan metodologis sebagai berikut; "dengan meneliti proses-proses keagamaan di Timur, kita mau tak mau harus berpaling dari era masa kini ke masa yang lebih awal untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang suatu peristiwa kemunculannya".[4]

Sebutan Indonesia memiliki akar bahasa Yunani kuno. Sebutan ini memiliki arti "kepulauan Hindia". Pada awalanya sebutan Indonesia digunakan oleh dua ilmuwan Inggris pada pertengahan abad ke-XIX. Pada saat itu wilayah kepulauan ini memiliki beberapa sebutan yang berbeda: Kepulauan Kecil di Zona India, Kepulauan India Timur, Hindia Belanda, Pulau-Pulau India, Kepulauan Melayu-Indonesia.

Menurut pendapat para ahli, kebangkitan nasionalisme Indonesia merupakan reaksi terhadap kolonialisme Belanda

4 Krachkovskiy, I. Yu. *V.V. Bartold dan Sejarah Studi Islam (V.V. Bartold v istorii islamovedeniya, izbrannoye sochineniya).* Jilid 6. Moskwa-Leningrad. 1952, hlm. 358.

yang dimulai sejak tahun 1602. Sedangkan paham kebangsaan Indonesia sebagai suatu bangsa yang satu, menurut para ahli, secara utuh barulah timbul menjelang akhir abad ke-XX. Komite Nasional (*Volkskraad*) Indonesia yang dibentuk Belanda pada tahun 1918, telah menjadi wadah penting bagi bertemunya pelbagai unsur-unsur kebangsaan yang ada dan telah mempercepat tumbuhnya kesadaran nasionalisme Indonesia, yang selanjutnya mengidentifikasi diri sebagai kekuatan oposisi terhadap kekuasaan kolonial.[5]

Faktor pemersatu yang juga penting dalam proses pertumbuhan nasionalisme Indonesia adalah faktor agama. Salah seorang pakar Amerika Serikat, sekaligus pendiri Lembaga Kajian Indonesia di Barat, tepatnya Cornell Southeast Asia Program, George Kahin, dalam karyanya "Nasionalism and Revolution in Indonesia (New York, 1954)", mengutip pendapat Thus Fromberg (anggota Mahkamah Agung Hindia Belanda) yang menulis pada tahun 1914: Islam bagi orang Jawa bukanlah sekedar kesadaran beragama saja. Demi menghormati Islam, para tuan tanah Jawa tidak dapat ikut intervensi Islam. Oleh karena itu, agama (di Indonesia -- penulis) merupakan faktor penting yang turut menentukan dasar-dasar nasionalisme. Agama merupakan simbol yang dapat mencirikan bentuk nasionalisme seseorang.[6] Pemimpin Partai Komunis Indonesia, Tan Malaka, saat mewakili partai tersebut dalam Kongres Komunisme Internasional tahun 1922, menyatakan bahwa pan-Islamisme dan setiap bentuk doktrin serta ideologi keislaman lainnya memiliki arti bagi bangsa Indonesia sebagai "perjuangan kemerdekaan nasional".[7]

5 Henley, David E.F. *Ethnographical Integration and Exclusion in Anticolonial Nationalism: Indonesia and Indochina* – "Comparative Studies and History". University of Michigan, Ann Arbor, USA, 1995. hlm. 287-288.

6 Kahin, George M. *"Nasionalism and Revolution in Indonesia"*. Itacha, New York, 1954. hlm. 44-45.

7 *Ibid.* hlm.49.

Sekalipun studi ini memfokuskan periode abad ke-XX, yaitu periode kemerdekaan Indonesia dan negara-negara Asia-Afrika lainnya, namun penulis perlu menyusun kerangka kronologis sekalipun sekilas yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan hubungan umat Islam Indonesia dengan bangsa-bangsa Asia-Afrika.

Bagian terbesar dari studi ini adalah analisa aspek-aspek historis dan politis yang berkaitan dengan proses perkembangan Islam di kepulauan Indonesia dan berbagai pola jalinan yang menggambarkan hubungan intensif antara umat Islam Indonesia dengan dunia Islam internasional yang telah berlangsung selama berabad-abad sehingga memungkinkan peran serta andil besar Indonesia dalam organisasi pergerakan Islam. Variabel utama kajian ditumpukan pada aspek-aspek sosial-politik dalam skala internasional yang diorganisir pemerintah negara-negara muslim Asia-Afrika.

Permasalahan Islam memang cukup beragam dan pelik. Oleh karena itu saat ini tidak semua aspek persoalan ini akan dituntaskan. Masalah ini hanya akan terjawab melalui beberapa serial tulisan yang jauh lebih komprehensif tentunya. Hal yang paling utama yang dibahas dalam studi ini adalah mengkaji problematika keislaman yang timbul sejak kehadiran Islam dan perkembangannya di Indonesia. Tanpa pemahaman aspek sejarah, akan sulit bagi kita memperoleh pemahaman yang tepat tentang apa yang sedang terjadi dan berkembang pada saat ini.

Sedangkan Islam, sebagai agama dunia yang datang paling terakhir, tak dapat dipungkiri oleh siapapun, tengah mencuat ke permukaan. Mengkaji aspek politik keagamaan dalam kerangka hubungan antara negara-negara Asia, Afrika, dan Eropa yang berpenduduk muslim, menjadi sangat penting untuk menata suasana harmoni dan solidaritas kehidupan kontemporer. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah

merubah kehidupan umat manusia dan seluruh bangsa menjadi demikian rapuh dan sensitif terhadap ancaman ekstrimisme dan ekspansionisme. Penghormatan terhadap sesama hanya dapat diwujudkan dengan saling memahami.

Adapun aktualitas kajian ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa dewasa ini tidak satupun negara muslim yang tak terusik badai demokratisasi dalam perkembangan hidup masyarakat, termasuk juga Indonesia. Kini kita dapat mengamati betapa dimensi politik keagamaan telah turut menanamkan sahamnya dalam proses demokratisasi kehidupan bernegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jika dibandingkan dengan pemerintahan-pemerintahan diktator, otoriter, dan monarki yang banyak dianut oleh negara-negara muslim lainnya, Indonesia lebih menampilkan warna perjalanan dan pertumbuhan demokrasi yang unik dan tersendiri. Dan satu hal lagi yang patut disimak; peran yang dimainkan umat Islam Indonesia dalam proses demokrasi tersebut. Hal ini penting dikaji mengingat posisi Indonesia berada di kawasan Asia dan Afrika, kawasan aktivitas partai dan pergerakan Islam dengan massa pendukung yang besar. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama (NU) mengklaim mengantongi massa setia sebesar 40 juta anggota. Angka yang fantastis ini menjadi semakin menarik karena keunikan tradisi keislaman dengan corak keindonesiaan yang dipertunjukkan oleh pendukung organisasi ini. Tanpa mengindahkan keraguan beberapa pihak terhadap data ini, NU dan pengikutnya tetap memainkan peran penting dalam proses pemahaman Islam Indonesia secara keseluruhan dan umat Islam dengan gerakannya di Asia-Afrika pada umumnya.

Untuk mendapatkan hasil kajian yang maksimal, studi ini bertumpu pada penelusuran terhadap sejumlah data dan literatur dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Rusia, Indonesia, dan Inggris. Sedangkan data-data dokumenter diangkat dari kumpulan arsip dan sejumlah publikasi media cetak Indonesia.

Untuk memperkuat dan mempertajam analisa, penulis juga telah melakukan beberapa interview dengan sejumlah tokoh politik, pemuka agama, dan masyarakat baik di Indonesia, India, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Perjumpaan langsung dengan sederetan tokoh telah memberikan pengetahuan dan kesadaran yang lebih berharga pada diri penulis sendiri tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran dan nilai-nilai luhur Islam serta pemeluknya.

Tentu saja kajian ini tidaklah mampu menjawab semua masalah dengan total. Studi ini lebih mengandung ajakan untuk mendiskusikan pandangan-pandangan yang penulis utarakan secara lebih serius dan mendalam. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis tujukan kepada Institut Ketimuran Lembaga Ilmu Pengetahuan Federasi Rusia, Institut Hubungan Internasional Moskwa, Akademi Diplomatik yang telah turut memberikan sumbangsih untuk mempelancar peluncuran buku ini.[]

BAB II
Dunia Islam Dalam Sistem Koordinat Politik Dunia

1. Agama dan Politik

Persinggungan secara aktif agama dalam bidang politik dunia merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan kita dewasa ini. Hal ini merupakan salah satu topik yang menarik perhatian para ilmuwan dari berbagai negara untuk mencermati dan mengkajinya. Tak diragukan lagi bahwa fenomena tersebut lahir sebagai akibat dari semakin kompleksnya kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, disamping adanya sebab-sebab lain. Dalam kategori ini termasuk juga persoalan eksistensi manusia modern sebagai faktor penyebab. Proses "politisasi agama" secara praktis menunjukkan ciri transnasional atau internasional, sekalipun dalam setiap wilayah negara, masalah ini memiliki ciri khas masing-masing. Namun secara keseluruhan persoalan ini memiliki ciri universal.

Sebagai contoh, dalam menganalisa fenomena aktivitas politik organisasi-organisasi agama di Barat, para ahli pada umumnya sangat yakin, bahwa selain organisasi keagamaan tradisional,

dewasa ini tidak ada satu pun institusi sosial yang memiliki potensi kekuatan antibirokrasi. Tak jarang, banyak diantaranya secara moral, etis, dan politis mengalami devaluasi. Akibatnya, muncullah ancaman nyata secara bergelombang dalam bentuk terorisme internasional. Dalam keadaan ini, seharusnya manusia segera kembali mengingat pengertian dan konsepsi humanistik tentang kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan keadilan. Persoalan-persoalan individu dalam masyarakat yang kini bermunculan dengan sebutan dan istilah baru. Solidaritas dan penghormatan, ataupun sebaliknya agresifitas dan kebencian, kini tampil kembali dengan mengusung istilah dan modus baru dalam kehidupan manusia. Kriteria spiritualitas, pandangan-pandangan dunia dan hasrat kebajikan, tak ayal lagi menjadi hal penting dalam flatform hubungan antar bangsa dan antar negara.

Umat manusia harus kembali kepada nilai-nilai budaya asli dan dasar-dasar pandangan dunia mereka sendiri untuk memperoleh akses yang memungkinkan mereka menanamkan pengaruh secara langsung dalam hubungan internasional. Pada titik temu setiap kepentingan individual, manusia hendaknya berupaya mencari jawaban atas setiap permasalahan kemanusiaan nan abadi. Dalam konteks ini manusia hendaknya kembali kepada prinsip-prinsip dan prasyarat universal, yang tak jarang diformulasikan bersama, dan tak lepas dari pengaruh agama yang dianut.

Oleh karena itu, kalaupun ada yang tidak memiliki afiliasi kepada suatu agama, namun tidak ada yang bisa menampik saham besar agama dalam persoalan humanisme, kebajikan, dan moralitas manusia. Sehubungan dengan ini, Hegel pernah mengungkapkan bahwa "mengabdi kepada Tuhan adalah demi beberapa tujuan, namun tujuan tersebut pastilah bersifat

humanistik".[8] Hegel menegaskan bahwa agama merupakan satu diantara tiga penampakan Jiwa Absolut, yang memperkaya potensi emansipatif manusia. Max Weber juga menandaskan bahwa dalam kehidupan modern, manusia diserbu ketiadaan rasa integratif, untuk itu mereka mencarinya dalam agama.

Beragam kesulitan individual maupun masyarakat pada umumnya hampir selalu tak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif organisasi dan institusi keagamaan dalam kehidupan politik. Agama-agama, terutama Islam dan Kristen, memiliki pengalaman panjang selama berabad-abad dalam menerangi kehidupan umat, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Para aktivis keagamaan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan dan harapan umatnya. Oleh karena itu, secara historis, agama-agama tersebut memiliki praktek dan pengalaman panjang dalam mengorganisasi dan mengarahkan umat manusia. Dan sepertinya organisasi keagamaan dapat dinilai sebagai perangkat terkuat manusia yang terorganisir. Namun yang paling utama dari semua ini untuk dicamkan adalah: doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran agama sesungguhnya menyimpan daya intelektual, spiritual, dan humanisme yang kental.

Dalam konteks Islam, agama senantiasa menunjukkan peran pentingnya dan sangat serius mempengaruhi intelektualitas serta mengasah hati nurani ratusan juta penduduk di berbagai negara Asia-Afrika. Untuk saat ini dan selanjutnya, Islam harus dipandang sebagai kekuatan nyata. Dunia Islam tidak bersatu. Islam bervariasi dan tak jarang secara politik saling berseberangan. Pemeluknya hidup dan tinggal di berbagai negara, dengan orientasi sosial politik yang juga beragam, terdiri dari berbagai bangsa dan suku, budaya, kelas sosial, stratifikasi, dan kelompok-

8 Hegel, *Filasafat Agama (Filosofiya Religii)* jilid 2, Moskwa,1977. hlm. 189.

kelompok masyarakat yang berbeda. Namun bagi kebanyakan mereka, meski tidak secara keseluruhan, Islam merupakan bagian sejarah masa lalu dan bagian dari cara pandang dunia mereka.

Sejarah kebangkitan agama dunia berbeda satu dengan yang lain. Sebagaimana yang ditulis oleh Bartold, Islam muncul dalam setting yang berbeda dari dua agama samawi sebelumnya. "Buddhisme, tandas Bartold, dikonstruksi oleh bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Kristen pun demikian, hasil karya kolektif bangsa yang selanjutnya, berhasil menjadi perekat masyarakat kuno menjadi satu, sebagai abdi Tuhan. Sedangkan Islam muncul dan lahir ditengah-tengah suatu bangsa yang saat itu hampir tidak diperhitungkan dalam kehidupan beragama ataupun budaya manusia. Namun para penguasa-penguasa zaman antik baru memeluk agama Buddha dan Kristen ratusan tahun setelah wafatnya para pendiri agama-agama tersebut. Sedangkan Muhammad, sejak awal pencanangan Islam, beliau tidak hanya menyebarkan agama, namun langsung membentuk sebuah negara dan pemerintahan. Islam selama periode kerasulan Muhammad telah melalui proses perkembangan sendiri, suatu proses yang juga dilalui oleh Buddha (sejak Shakyamuni hingga Asoka) dan Kristen (sejak Yesus Kristus hingga Konstantin Agung)".[9]

Dalam pandangan Bartold, agama Islam memiliki perbedaan dengan Buddha dan Kristen, karena perkembangannya "yang sangat historis". Kehidupan Rasul Muhammad SAW sangat dikenal luas seperti halnya kehidupan para reformator Protestant di Eropa abad ke-XVI. Sungguh pada saat ini kita dapat menyimak kata-kata suci beliau yang orisinil karena telah ditulis dan tercatat selagi beliau masih hidup, yang selanjutnya dalam waktu kurang dari seperempat abad sepeninggalnya, telah dikodifikasi dalam sebuah kitab suci, wahyu Tuhan yang diturunkan kepada

9 Bartold, V.V. Islam: *Sebuah Essay (Islam: Sochineniye)*, jilid 6, Moskwa; Leningrad.

Muhammad SAW. Lagi-lagi seperti yang ditekankan Bartold, "keaslian kitab suci tersebut (al-Quran), kecuali pada beberapa tempat, dapat dinilai sebagai sesuatu yang tak diragukan lagi".[10]

Pengalaman sejarah telah menunjukkan kepada semua bahwa tidak diragukan lagi, Islam memiliki kemampuan unik untuk beradaptasi dan memodernisasi berbagai tradisi budaya. Agaknya keunikan inilah yang mendorong suksesnya percepatan penyebaran Islam. Sejak periode awal kelahirannya, Islam berhasil mengukuhkan suatu persatuan funadamental baik berdasarkan keyakinan agama maupun atas kemanusiaan yang universal. Pada masa-masa berikutnya persatuan yang diwujudkan juga merambah ragam peta dan strategi politik yang dijalankan umat Islam di pelbagai belahan dunia. Pada mulanya Islam, seperti agama-agama lain, hadir sebagai formula baru kekuatan etnik dan nilai kebajikan yang memperteguh keagungan tradisi dan adat istiadat. Semua itu bagaikan telah menjadi daya rekat yang kuat bagi akar-akar agama dan telah memperteguh institusi keagamaan dalam bidang politik, hukum, dan struktur ideologi masyarakat.

Selanjutnya, akibat dari pengaruh revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta prinsip-prinsip pandangan dunianya, agama-agama, khususnya Islam, harus mampu menunjukkan kekuatannya sendiri dalam urusan nilai moral, etika, tradisi, dan adat istiadat, yang dewasa ini seakan telah terbelenggu dan dikebiri oleh potensi-potensi politik dan ideologi dari ajaran doktrinalnya sendiri.

Antara tahun 1970-an hingga 1980-an, tampak jelas pada beberapa negara, peningkatan kasus perampasan dan kejahatan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik sebagai akibat pengaruh yang datang dari luar. Nilai-nilai yang diimport, yang sesungguhnya diformulasikan dalam lingkungan sosio-

10 *Ibid.*

kultural yang berbeda, telah menimbulkan pertentangan yang sengit dengan kondisi lokal dan struktur tradisional yang ada. Berlangsunglah proses perombakan yang melelahkan dan destruktif selama berabad-abad.

Seruan untuk kembali kepada kemurnian Islam dapat diinterpretasikan sebagai upaya menjembatani peristiwa-peristiwa perubahan yang melanda masyarakat dan dampak yang ditimbulkannya. Adanya jurang pemisah antara nilai-nilai etika dan moral yang berasal dari luar, di satu sisi, dan struktur sosial di sisi lainnya, dapat dipandang sebagai bentuk sosio-psikologis sumber "kebangkitan Islam", dan untuk itu, Islam sebagai agama tampil dalam perannya sebagai dasar-dasar fundamental bagi pengukuhan jati diri umat Islam dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

Tesis yang mengemukakan bahwa agama membantu umatnya melakukan sendiri pengukuhan dan identifikasi jati diri, sama sekali tak terbantahkan. Secara praktis, sebagian besar peneliti dan pemerhati agama menyerukan hal yang sama. Namun penting juga untuk memahami mengapa, terutama dewasa ini, umat beragama memandang keharusan identifikasi diri sendiri. Mungkinkah hal ini merupakan dampak dari berbagai sebab atau kulminasi pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam seratus tahun terakhir. Jawabannya mungkin ada dua. Pertama, tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat secara nyata mengubah pandangan filosofi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi, seperti kata orang, "apapun dapat dicapai dan dimiliki asal punya uang". Kedua, hampir tak tersisa lagi larangan-larangan, bahkan prinsip bahwa semua dihalalkan menjadi semakin kuat, dan semua orang dapat meraih kebebasan itu.

Kemajuan teknologi telah mewujudkan segala sesuatu yang tak terbayangkan pada masa lalu, dan akses massal yang tak terbatas terhadapnya mengakibatkan tumbuhnya berbagai persoalan dalam lapisan masyarakat. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh filosof Spanyol awal abad ke-XX, Jose Ortega-i-Gasset, "sebelum hal itu terjadi, tak diketahui tenggelamnya di kedalaman panggung, kini ia muncul di layar, dan kini ia menjadi pameran utama, pemain tunggal tak akan ada lagi, yang ada hanya satu kesatuan kelompok".[11] Pada saat yang sama pengaruh revolusi teknologi terus berlangsung selama ribuan tahun, yang tak jarang, tidak sesuai dengan proses perkembangan berbagai bangsa dunia. Hal ini tentu menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan manusia secara menyeluruh. Jika kita tidak mendeteksi kondisi ini, berarti kita haruslah lebih siap lagi untuk mengarahkan masyarakat secara benar, dan berusaha lebih tepat lagi dalam mencermati keadaan ekonomi dan politik yang terus bergulir di pentas dunia.

Intensitas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan tugas yang semakin berat di pundak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dan memacunya menggapai "keajaiban ekonomi" agar tak tertinggal dari bangsa lain. Pemenuhan ekonomi masyarakat sering pula menunjukkan pengaruh yang destruktif bagi pertumbuhan politik dan ekonomi. Masyarakat memang tidaklah menjadi tamak dan buruk dengan sendirinya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut andil dalam membentuk psikologi massa menjadi seakan-akan mengesampingkan, bila tidak menafikan, sebagian besar nilai-nilai moral dan etika yang pernah menghiasi jati diri masyarakat sebelumnya. Masyarakat pun menyadari

11 Ortega-i-Gasset, Jose. *Kebangkitan Massa: Sebuah Ontologi (Vosstaaniye Mass: Izbraniye Trudy)*, Moskwa, 1997, hlm.43.

bahwa ketidakmampuannya dalam mengendalikan keserakahan manusia yang diakomodir oleh kemajuan tersebut, membuatnya semakin besar dan menguntungkan bagi kelangsungan eksistensinya. Motivasi setiap orang berubah agar secepatnya mencapai harapan yang dicitakan, sekalipun harus membayar sejumlah uang, bahkan kalau perlu, menggadaikan moralitasnya. Seperti pendapat Jose Ortega-i-Gasset, "kehidupan masyarakat tidak hanya suatu proses politis. Bersamaan dengan itu, atau bahkan pada awalnya, merupakan suatu proses intelektual, moral, ekonomi, spiritual (mencakup juga adat istiadat, tata aturan, peraturan, sampai kebutuhan pakaian dan hiburan)".[12] Dalam kondisi seperti ini, kembalinya masyarakat kepada agama sepertinya lebih merefleksikan harapan manusiawi untuk memelihara harkat kemanusiaan itu sendiri dalam vakumnya keagungan moral.

Dewasa ini, dalam keadaan yang cukup sulit, dunia Islam sedang menunjukkan perkembangannya. Perbenturan dan perbedaan pandangan internal Islam tak jarang menyebabkan pecahnya konflik-konflik antara sesama negara muslim. Dalam dunia Islam, tetap berlangsung kompetisi tradisional untuk menjadi pemimpin bagi muslim lainnya. Seperti masa-masa sebelumnya, saat ini dalam kalangan umat Islam masih terdapat perbedaan pendapat dan perselisihan antara beberapa aliran pemikiran, ajaran, dan sekte-sekte keagamaan. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara negara-negara muslim dalam bidang sosial, politik, ideologi, dan pembangunan nasional, dijadikan dasar bagi para ahli di Rusia dan negara lainnya memperdebatkan tesis tentang kelemahan umat Islam secara umum.

Menurut pandangan para ahli saat ini, yang bisa dibicarakan pada saat ini hanya tentang sosio-kultural masyarakat negara-negara muslim. Para ahli cenderung tidak memperhatikan

12 *Ibid.*

kemungkinan untuk meneliti persamaan dan kesamaan subjek dalam dunia Islam di panggung internasional. Mereka lebih banyak meragukan politik persatuan dan kemanunggalan Islam. Sebagai contoh, salah satu kontributor majalah *"Islam dan Politik"* (Islam i Politika), terbitan Moskwa 2001, menegaskan bahwa "dewasa ini dunia Islam merupakan subjek yang dikonsolidasikan politik internasional, namun sebenarnya hanya dalam kapasitas proyek uji coba".[13]

Sehubungan dengan ini, ada beberapa komentar yang perlu diutarakan. Tanpa memperhatikan absurditas politik, dunia Islam dengan segenap keragamannya, yang tak jarang mengandung perbedaan dan pertentangan yang cukup serius, aktif berkembang bagaikan sebuah sistem tunggal jika ditinjau dari perspektif hubungan internasional. Adanya perbedaan dan pertentangan dalam tubuh Islam, tidaklah berarti absennya ikatan sosial-ekonomi, politik, ideologi, spirit, dan sejarah yang kuat, yang memperkokoh potensi integratif di antara mereka. Tanpa krisis dan perbedaan, tidak mungkin rasanya bagi gerakan-gerakan dalam skala kecil dan simple untuk dapat tumbuh menjadi lebih besar dan kompleks, serta bekerjasama secara kuantitatif. Proses ini dianggap sebagai bentuk potensial dari kemampuan masing-masing untuk mengatasi krisis yang dihadapi.

Dalam menganalisa secara menyeluruh problematika dunia Islam sebagai subjek dalam kancah hubungan internasional, terdapat aturan persoalan yang sangat mendasar. Karl Marks dan F. Engels memandang struktur ekonomi masyarakat merupakan persoalan dasar yang menjadi latar belakang persoalan elementer, seperti masalah hukum, politik, yang berkaitan dengan bentuk tertentu dari kesadaran masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kondisi ini menjadi semakin dalam dan beragam sampai batas tertentu, sehingga semua fenomena budaya bergantung kepada

13 *Islam i Politika (Islam dan Politik)*, Moskwa, 2001, hlm.9.

persoalan-persoalan ekonomi. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sejak mulainya pertumbuhan paham marksisme di Rusia, G.V. Plekhanov berpendapat "kita harus dapat berpindah dari ide-ide ekonomi ke psikologi massa, karena tidak mungkin menjelaskan sejarah ideologi tanpa mempelajari dan memahaminya".[14]

Hasil dari penelitian sejarah yang diperoleh manusia memberikan argumen yang menyatakan bahwa sampai saat ini tidak bisa ditunjukkan secara pasti ketergantungan secara langsung dimensi kehidupan spiritual dan kultural dengan sejarah materialisme masyarakat. Periode-periode kemajuan ekonomi dan kebangkitan politik atau sebaliknya, tidak memiliki hubungan langsung dengan periode-periode kegemilangan kultural atau kehancurannya. Jika itu memiliki kaitan, maka hubungan itu jauh lebih rumit dan pelik.

Paham materialistik mengenai proses-proses sejarah, sama sekali tidak memberikan makna bahwa sejarah dapat diputar balik untuk kepentingan politik-ekonomi, atau memandang manusia-manusia yang hidup sebagai suatu yang abstrak. Dalam mengkaji fenomena sejarah, dimana setiap individu memainkan peran sesuai dengan karakter, temperamen, dan keunikan masing-masing, tidaklah cukup untuk membawa semua itu hanya sebagai argumen sosial-ekonomis. Karl Marx berpendapat bahwa sejarah sosial masyarakat merupakan sejarah perkembangan individu, baik disadari atau tidak. Dalam konteks ini adalah benar bagi para ilmuwan yang merekomendasikan untuk mencari pemahaman proses sejarah secara tidak dikotomi: "komponen dasar versus komponen elementer", tetapi dengan mencermati sistem-sistem masyarakat dengan individu per individu sebagai fokus utama. Pertanian, politik, agama, seni, dan sebagainya tak lain hanya merupakan ragam bentuk dari perilaku manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Perilaku sebagai pribadi sering kali

14 Plekhanov G.V. *Karya-Karya Filsafat Pilihan (Izbranniye Filosovskiye Proizvedeniya)*, Moskwa, 1962, jilid 2, hlm.247.

terlewatkan dari perhatian para peneliti. Padahal sesungguhnya hal ini merupakan salah satu faktor penentu dalam memahami proses berlangsungnya sejarah.

Masuknya kategori *"politic behaviour"* dalam kajian politik, menuntut pemahaman objektif dan subjektif terhadap perilaku individu maupun kelompok. Para ahli sering mengingatkan bahwa massa tidak melakukan tindakan-tindakan secara otomatis karena semua itu diiringi oleh interes sadar maupun emosional yang terbentuk berdasarkan pandangan hidup tentang tradisi, bahasa, pendidikan, termasuk juga agama. Pemahaman materialistik tentang hakikat manusia sangatlah luas. Belum lama ini kembali disuarakan tentang penolakan terhadap pendapat beberapa pemikir dan filosof Rusia. Sebutlah V.I Soloviev, yang menyerukan kepada pembebasan diri dari paham materialisme. Ia menekankan betapa pentingnya hakikat spiritualisme dalam kerangka pemikiran filsafat dan perilaku manusia. Menurutnya "bangkitnya dimensi materi merupakan akta hukum dalam proses filsafat pembebasan, yang dipandang sebagai materi utama, yang berarti membebaskan diri dari perbudakan material secara faktual atau dari gelombang materialisme. Hingga saat ini manusia belum memandang alam materialisme yang di dalam dan di luar dirinya dengan hampa, manusia belum bisa mencintai atau membencinya, manusia belum terbebas darinya, bahkan materialisme tenggelam dalam manusia seperti sesuatu yang asing, teracuhkan, dan tidak dipedulikan".[15]

Pada zamannya (pertengahan kedua abad ke-XIX [19]), Karl Marx dan F.Engels berkesimpulan bahwa kehidupan menentukan kesadaran. Sedangkan perkembangan yang terjadi di abad ke-XX [20] memperlihatkan bahwa bukan hanya kehidupan yang menentukan kesadaran, tapi kesadaran, ide, dan teori yang banyak membangun kehidupan. Ide, dengan caranya sendiri, telah memandu dan mengarahkan kehidupan. Sesuai dengan pendapat kritikus dan

15 Soloviev, V.I. *Dimensi Sejarah Filsafat (Istoricheskiye Dela Filosofii)* – Voprosy Filosofii (Persoalan-Persoalan Filsafat), Moskwa, 1998, no. 8. hlm. 24.

sastrawan terkemuka I. Zolotussky, "abad ke-XX [20] adalah era kekuatan ide dan abstraksi atas manusia".[16]

Menurut pandangan para tokoh agama, hanya agamalah yang mampu menghentikan proses kekerasan dan kekejaman. Namun lebih tepat jika kita hanya menyetujui sebahagian saja, karena tanpa melihat potensi humanistik yang terdapat dalam agama apapun juga, tak jarang kini kekuatan-kekuatan itu muncul dan berkembang atas nama agama. Cukup banyak fakta yang seperti ini kita jumpai. Sebenarnya, faktor utama tidaklah dimulai dari doktrin agama, tapi dari politik praktis, kepentingan-kepentingan ekonomi kelompok atau lapisan masyarakat tertentu. Sekalipun kesadaran mereka terbentuk di bawah pengaruh agama, namun kekakuan dan ketidaksolideran mereka terbangun berdasarkan tujuan-tujuan duniawi dan target-target nyata. Agama tidak melahirkan politik, tetapi ia sangat berpotensi untuk mengilhami gerakan-gerakan dan program-program politik. Politik berkembang menurut hukumnya sendiri dan mengekspresikan kepentingan-kepentingan kelompok dan segmen masyarakat tertentu secara nyata. Dalam hal ini agama mampu berfungsi tidak hanya sebagai instrumen yang merealisasikan kepentingan-kepentingan politik, tapi juga memperkaya konsepsi doktrinnya demi kepentingan politiknya. Dengan kata lain, keterkaitan dalam permasalahan ini jauh lebih rumit dan kompleks, namun untuk itu dipandang perlu mengesampingkan beberapa pandangan dan penafsiran primitif seperti paham "Fundamentalisme Islam".

Saat ini sedang bergulir peringatan tentang adanya bahaya dan ancaman Islam ke seluruh penjuru dunia. Beberapa *headline* surat kabar dan majalah, terutama sejak peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, dipropagandakan bahaya "Kebangkitan

16 Zolotussky, I. *Khrusheniye abstraktsii (Petaka Abstraksi)* – Novy Mir, Moskwa, 1989, no.1, hlm. 235.

Islam", "Perang Melawan Barat", dan lain sebagainya. Banyak pihak cenderung memandang Islam sebagai ideologi alternatif pemersatu melawan Barat, karena memiliki kemampuan melintasi batas-batas negara modern dan siap untuk menghancurkan masyarakat Barat melalui kontak-kontak politik maupun budaya. Beberapa pihak lainnya mencermati hal tersebut sebagai ancaman utama dari sisi demografi.

Peristiwa yang terjadi pada pergantian abad lalu sebenarnya memperlihatkan ketidakseragaman dan berbedanya politik Islam. Organisasi Islam, seperti "Al-Qaeda", dengan usahanya untuk mendapat dukungan dari rezim yang berkuasa, tampil menjadi organisasi teror internasional. Sementara itu organisasi-organisasi lainnya menyebarluaskan ideologinya melalui peribadatan dan aksi sosial. Semua organisasi tersebut menuntut keikutsertaan mereka dalam pemerintahan dengan cara yang sah secara hukum melalui pemilu yang legal, bukan dengan dukungan senjata dan kekacauan.

Umat Islam, seperti halnya umat beragama lainnya, memiliki ragam pendapat yang cukup tajam dalam menginterpretasikan doktrin ajarannya. Bagi lapisan yang tertindas, Islam merupakan agama dunia dan keadilan sosial yang menstimulir umat untuk tunduk beribadat kepada Tuhan, dan menjadi faktor utama yang menata dan menggerakkan tanggungjawab sosial umatnya. Penggunaan istilah "fundamentalisme Islam" secara serampangan terhadap suatu pemerintahan negara muslim dan berbagai gerakan Islam, dapat mempercepat bersatupadunya friksi-friksi Islam yang dianggap sebagai ancaman. Padahal sebenarnya hal ini sama sekali berbeda dengan apa yang disebut dengan politik Islam. Sebagai contoh, beberapa negara seperti Saudi Arabia, Libya, Pakistan, Iran, terkenal luas sebagai negara fundamentalis. Sedangkan labelisasi tersebut sedikit banyak tidak membahas hakikat sebenarnya dari negara-negara dan organisasi-organisasi

tersebut. Pakistan di bawah rezim Zia ul-Haq dan Saudi Arabia dewasa ini menerapkan corak pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam. Libya mendemonstrasikan karakter pemerintahan yang radikal dan revisionis. Walaupun pada taraf tertentu, fundamentalisme Islam diasosiasikan dengan rasa "anti Amerika dan ekstrimisme", sebagaimana yang diperlihatkan Libya dan Iran, namun pada saat yang sama Saudi Arabia dan Pakistan merupakan sekutu terdekat Amerika.

Tanpa memperhatikan orientasi Islam secara umum, sebenarnya pemerintah negara-negara muslim, dalam berhubungan dengan negara-negara lain di dunia, lebih cenderung memperlihatkan kebijakan politik yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik rakyat mereka.

2. Konsepsi Persatuan Islam

Sebagaimana yang terdapat dalam agama Yahudi dan Kristen, Islam juga memandang penting untuk membedakan sisi filosofis-doktrinal agama dengan praktek keseharian pemeluknya. Perbedaan antara iman, postulat dan dogma fundamental Islam, serta praktek-praktek agama kaum muslim, dapat dipandang sebagai kekuatan atraktif dalam konteks kebangkitan Islam. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai dasar analisa yang kritis terhadap upaya keras umat Islam dalam mencapai kekuasaan politik.

"Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah" adalah frase "sakramen" yang diucapkan setidaknya lima kali sehari semalam, yang merupakan satu dari postulat penting agama Islam. Dalam setiap peradaban, terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengandung ide eksistensial. Dalam Islam, prinsip ini disebut dengan Tauhid (satu dan kesatuan). "Tiada Tuhan selain Allah, dan pada-Nya semua bersatu, Tunggal dan Maha Tinggi". Inilah prinsip yang menerangi seluruh ide-ide spiritual

dan politik dalam peradaban Islam. Seluruh doktrin Islam berasal dariNya. Seluruh gerakan dan pemikiran umat haruslah mencerminkan dan bertolak dari esensi keesaan Allah SWT. Hidup menurut garis Tuhan Yang Maha Esa, serta tunduk dan patuh terhadap hukum dan peraturan-Nya adalah hakikat dari spiritualisme umat Islam. Bagi hukum Islam, prinsip tauhid dipandang sebagai kekuatan tunggal kompas kehidupan umat dan merupakan kriteria utama dalam berhubungan dengan agama-agama dan peradaban lainnya.

Islam bukanlah semata agama saja. Islam juga pandangan hidup, suatu model hidup masyarakat, budaya, dan peradaban. Oleh karena itu, tendensi politik dalam Islam terlihat lebih fundamental dan dominan dibandingkan Kristen. Pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan sejarah umat Islam pada masa klasik. Demikianlah gaya dan pandangan hidup negara-negara Islam pada umumnya, dimana faktor agama sangat hidup dalam politik, hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat secara menyeluruh. Berbeda dengan agama Kristen, Islam sejak dini sudah menjadi agama negara dan pemerintahan. Islam memberikan dasar konsepsi kekuasaan dan menawarkan tatanan ideal sebuah komunitas umat manusia, dimana anggotanya harus berpredikat sebagai seorang warga negara dan pemeluk Islam sekaligus. Islam tidak boleh dipahami sebagai agama yang sempit, yang hanya mengatur persoalan ritual peribadatan, keimanan, dan tata etika. Saat kelahirannya, Islam telah berintegrasi dengan sistem organisasi sosial politik masyarakat.

Masalah hubungan antara negara dan agama merupakan salah satu persoalan yang paling mengusik dan, tak jarang, paling menyakitkan dalam kehidupan politik negara-negara muslim dewasa ini. Pada fase awal dalam sejarah Islam, dikenal suatu pemerintahan Negara Madinah, yang kemudian menjadi model kehidupan politik umat Islam. Dalam model ini, negara

dan agama menjadi satu padu bagai dua sisi mata uang. Dalam Negara Madinah, agama menjadi salah satu faktor dominan yang tidak hanya memberikan legitimasi bagi pemerintahan yang dikepalai oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga menjadi sumber pijakan dalam pengambilan keputusan terhadap seluruh urusan pemerintahan dan berbagai kebijakan politik negara. Pada saat yang sama, negara harus memberikan jaminan bagi terbentuknya kondisi yang kondusif bagi keberhasilan perkembangan agama.

Permasalahan ini tampak menjadi semakin kompleks setelah terbentuknya dunia Islam yang berada di bawah jajahan imperium-imperium kolonialis. Dunia Islam terpaksa memformulasikan sistem-sistem politik dan pemerintahan untuk menjawab konsepsi-konsepsi Barat yang pada saat itu telah tersebar luas dikalangan umat Islam. Sejak saat itu perdebatan tentang konsepsi "negara muslim" semakin memanas. Sebagai contoh, terjadinya perbedaan pendapat antara Presiden Soekarno dengan Muhammad Natsir, yang sampai saat ini tetap memiliki nilai historis dan aktual untuk didiskusikan. Perdebatan yang terjadi antara dua tokoh nasional ini, merefleksikan pertentangan antar umat Islam, dari semua sisi, untuk merumuskan format sistem politik Indonesia. Aktualitas persoalan ini tetap berlanjut sampai sekarang. Dalam perspektif ini, perhatian yang besar juga dicurahkan oleh Tan Malaka, salah seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia. Kita bisa menemukan topik ini dalam beberapa karyanya, terutama dalam "Madilog: Materialisme, Dialektika, Logika", "Islam dan Tinjauan Madilog", "Dari Penjara ke Penjara", dan lain-lain.

Tan Malaka memperlihatkan tidak hanya keberpihakannya yang sangat kuat pada Marxisme, tapi juga pemahaman yang baik tentang aspek-aspek perkembangan sosial dan politik Indonesia. Tampak jelas ia berupaya memodernisasi paham Marxisme dan menuangkannya ke dalam konteks kehidupan Indonesia. Di

antara sekian banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan masyarakat, Tan Malaka memberikan posisi yang besar terhadap peran penting agama (dalam hal ini Islam), yang dipandanganya sebagai instrumen penting dalam aspek dan sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Semua ini ia kupas secara detail dalam karyanya "Islam dan Tinjauan Madilog".

Sehubungan dengan ini, untuk melihat agama sebagai ideologi kelas, sekaligus sebagai ideologi masyarakat yang menopang rezim pemerintah dalam mengeksploitasi setiap individu seperti yang dimainkan oleh Marxisme klasik, Tan Malaka secara khusus menekankan pentingnya peran agama dalam konteks sistem politik masyarakat secara menyeluruh. Menurut pendapatnya, agama harus ditempatkan sejajar dengan ideologi-ideologi politiknya dalam masyarakat. Spirit keagamaan, nilai-nilai monoteistik, dan moralitas keagamaan, sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan politik bernegara.[17] Tan Malaka menekankan: pertama, agama begitu kuat telah terintegrasi dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu, untuk menafikannya sangat tidak mungkin. Agama dalam masyarakat memiliki dan menyimpan potensi kekuatan dinamis yang memungkinkan setiap individu bisa melakukan perubahan-perubahan positif, memerdekakan dirinya dari tirani, dan mampu mengolah produk-produk pemikiran, ide, dan aksi gerakan. Oleh karena itu, menurut Tan Malaka, institusionalisasi seluruh aspek-aspek tersebut harus diterima sebagai satu kesatuan karya manusia yang utuh dan tak terpisahkan. Kedua, Tan Malaka berpendapat bahwa dengan kebebasan beragama, pemahaman agama akan tumbuh berkembang seiring dengan prinsip-prinsip humanisme. Seiringan dengan itu, kehadiran agama tidak terbantahkan dan menjadi penting, dan bahkan, hal ini merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Agama dapat

17 Azhar, Khairul. *The Relation Between State and Religion in Islam: Tan Malaka point of View*. Studia Islamica, Indonesian Journal Far Islamic Studies, Jakarta, 2000, vol.7, no.2, hlm. 119.

menjadi sumber inspirasi gerakan aksi dan kekuatan institusi yang memiliki orientasi humanisme universal. [18]

Pandangan Tan Malaka dapat dikategorikan sebagai keinginan atau tendensi politik, karena memang tidak bertentangan atau berseberangan dengan pandangan umum umat Islam. Apalagi, menurut pendapatnya, ajaran-ajaran Islam dapat menjadi faktor pendukung politik praktis. Dengan demikian, dapatlah dipahami, mengapa dalam perjuangannya untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia, Tan Malaka sangat menghormati dan menjunjung tinggi prinsip: "ciptakan yang terbaik bagi masyarakat dan sedapat mungkin hindarilah anarkhi".[19]

Sebagian besar negara-negara muslim digolongkan sebagai negara-negara berkembang yang menanggung beban persoalan yang berat. Mereka menyadari ketertinggalan dari Barat dan menyadari keharusan revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengejar ketinggalan [ketertinggalan] tersebut. Masalah ini tidak mudah diatasi, apalagi jika melihat banyaknya perbedaan yang mencolok dalam garis batas domestik negara-negara ini. Sebagai contoh, Indonesia tidak hanya tertinggal jauh dari Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Serikat, tapi Indonesia juga harus menghadapi kenyataan bahwa perbedaan-perbedaan dalam skala domestik juga tinggi. Jika di Jawa sedikit banyak telah berkembang dengan sukses transportasi kereta api, radio, televisi, dan sebagainya, maka bagi sebagian besar penduduk Kalimantan, Irian Barat masih belum terangkat dari peradaban dan budaya primitif. Pada akhirnya, seluruh negara-negara muslim harus bersepakat untuk menentukan posisi agama dalam masyarakat mereka. Islam diakui oleh para pemeluknya telah menyatukan perdagangan dengan kesadaran beragama secara utuh, kesadaran berpolitik yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Penyair India yang terkenal, Iqbal, menyatakan bahwa Islam sejak dari

18 *Ibid*. hlm. 120.

19 *Ibid*.

awal kelahirannya sudah membentuk masyarakat sipil (*civil society*).[20] Para ilmuwan Barat juga berpendapat, bahwa "Islam merupakan agama yang lebih dari sekedar sistem teologis. Islam adalah suatu peradaban yang komprehensif".[21]

Islam tidak memisahkan kehidupan spiritual individu dari tradisi dan kebiasaan, perilaku sehari-hari, namun juga mengatur masalah keduniawian yang ditilik dari sudut pandang agama. Syari'at Islam memberikan tuntunan bagi setiap muslim untuk menjalankan pengabdiannya kepada Tuhan dan berhubungan dengan sesama manusia. Dalam persoalan ini, banyak para orientalis, terutama E. Roshental menunjukkan, "sangat sulit menggunakan terminologi-terminologi Barat ke dalam Islam karena perbedaannya dengan Kristen, Islam tidak memandang adanya pemisahan agama dengan kehidupan dunia".[22]

Perbedaan Islam dengan Kristen tak dapat dipungkiri lagi, karena keduanya hadir dalam periode yang berbeda. Yesus Kristus dalam versi Bibel, merupakan anggota komunitas Yahudi, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Ia tidak bermaksud berperan aktif dalam permasalahan-permasalahan politik yang timbul pada saat itu di kalangan masyarakat. Ia hanya memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu menyelamatkan jiwa manusia. Yesus mencoba memperkuat prinsip "Tuhan manusiawi", yaitu merasakan adanya penyatuan internal batiniah antara dimensi ke-Tuhanan dengan manusia, kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Salah satu postulat utama dalam ajaran Yesus menurut Hegel adalah "hukum batin adalah hukum kebebasan, dimana manusia dengan sukarela tunduk kepadanya, hukum tersebut abadi, termasuk pula ada padanya kesadaran hidup abadi. Janji Yesus adalah menyibak hukum

20 *The Reconstruction of the Religious Thought in Islam*, Lahore, 1951, hlm.153
21 Gibb, H.A.R. *Whither Islam*, London, 1932, hlm.12
22 Roshental, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam. An Introductionary Outline*. Cambridge, 1958. hlm.8

tersebut kepada manusia..."[23] V. Solovyev menyatakan bahwa pengabdian utama seorang Kristen terletak pada "agama yang menjunjung tinggi arti penting manusia tanpa syarat apapun, yang abadi sebagai eksistensi spiritual dan material..."[24]

Berbeda dengan Kristus, Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pemimpin agama yang juga merangkap sebagai pemimpin pemerintahan. Kepentingan untuk berjuang secara batiniah dan lahiriah untuk mengukuhkan kekhalifahan sebagai suatu bentuk pemerintahan, telah mampu memperteguh pandangan umat tentang Islam sebagai suatu doktrin politik keagamaan. Oleh karena Islam memperkokoh pemerintahan negara, maka fenomena politisasi Islam sudah terlihat sejak agama ini baru hadir. Adalah benar bahwa dalam setiap epoh sejarah, politik Islam selalu dipenuhi muatan-muatan sosial tertentu dan pada saat yang sama, bersinggungan dengan pertumbuhan aspek-aspek keagamaan yang murni.

Sejarah panjang interrelasi antara politik dan agama ini tidak menimbulkan struktur Islam dengan unsur-unsur khusus yang dipolitisir. Fakta sebenarnya adalah: kekuatan Islam di bidang politik tidak terletak pada teks-teks Al-Quran, bukan pada perpaduan hipotetik antara agama dan politik, tapi pada rumitnya aktivitas-aktivitas dan gerakan yang terdapat antara ide-ide keislaman, pengalaman sejarah umat Islam, serta sistem sosial politiknya. Agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang pengaruh faktor-faktor tersebut, haruslah mencermati kembali sejarah dan kehidupan politik negara-negara Islam masa kini.

Pengaruh Islam terhadap kehidupan politik negara-negara muslim cukup luas dalam berbagai aspek; baik dalam kehidupan pribadi sampai urusan bernegara. Bagi banyak orang, kebangkitan

23 Hegel. *Zhizn' Iesusa (Kehidupan Yesus).* "Filosofia Religii" (Filsafat Agama). Moskwa, 1975. Jilid I. hlm. 60.

24 Solovyev, V.I. *Istoricheskiye Dela Filosofii (Aspek Sejarah Filsafat).* Voprosy Istorii. Moskwa, 1988, no.12. hlm. 113.

Islam masih sering diartikan sebatas keagungan *theopathy*, sedangkan bagi yang lain, hal ini merupakan kebangkitan secara umum dan universal. Islam sebagai agama samawi termuda tetap memiliki ketegasan di satu sisi dan elastisitas di sisi lain. Islam tidak hanya menjadi instrumen bagi kekuatan politik tertentu, tapi berpotensi mempengaruhi formasi program-program politik, seperti yang dikemukakan oleh O.P. Florensky, "Iman menentukan bentuk ritual pengabdian, sedangkan pengabdian (ibadah) menentukan pandangan dunia yang melahirkan budaya yang menjadi dasar gerakan politik"[25]

Upaya untuk mempersatukan dan memperkokoh dunia Islam diyakini oleh umat Islam lebih dari sebatas tujuan dan target politik. Bagi mereka hal ini sudah seperti kebutuhan "pangan" untuk memenuhi tuntutan prinsip ketauhidan yang Esa. Namun hal ini tidaklah absolut baik dari segi ruang dan waktu. Namun dalam kasus-kasus tertentu, beberapa peristiwa mengisyaratkan bahwa fanatisme agama tidak ayal ditingkahi pula oleh ragam kekerasan, konflik, dan kecurigaan antar sesama umat Islam. Seperti yang didengungkan oleh Muamar Kaddafi: "ada Al-Quran dan ada umat Islam, Al-Quran adalah satu hal, sedangkan umat Islam adalah suatu yang lain". Praktek Islam diformulasikan oleh sejumlah orang dari berbagai etnik yang berbeda, beragam kelas sosial dan kelompok di dunia. Islam di kalangan proletar, pada saat tertentu, bisa memiliki bentuk yang berbeda dengan Islam di kalangan borjuis yang minoritas, begitu juga dengan Islam di kalangan intelektual. Islam dapat saja digunakan sebagai alat penopang rezim penguasa, tapi bisa juga digunakan sebagai alat perjuangan bagi perubahan status-quo sosial-politik. Pada saat yang sama, sebagian kecil umat Islam ada yang meyakini bahwa dengan menentang ajaran Islam, berarti harus siap menghadapi perlawanan politik dan ideologis. Dalam permasalahan ini, terjadinya perbedaan di kalangan umat Islam

25 Florensky, P. *Autopotret*. Voprosy Filosofii. Moskwa,1988, no.12. hlm.113.

tidak dapat dipungkiri dan diakhiri. Hal ini akan berlangsung entah sampai kapan. Umat Islam akan senantiasa bersatu padu dalam semangat mempertahankan Islam, walaupun masing-masing memiliki perbedaan pemahaman interpretasi ajaran agamanya.

3. Beberapa Fundamen Filosofis Struktur Organisasi Islam

Dunia Islam sebagai sub-sistem yang berdiri sendiri dalam hubungan internasional, memiliki organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Titik sentral rangkaian kerjasama ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara muslim dunia dimainkan oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dapat dikatakan sangat sulit untuk menemukan aspek hidup atau aktivitas individu yang tidak bersinggungan dengan pemerintah-pemerintah negara muslim. Inilah yang menjadi landasan persoalan-persoalan agama, politik, ekonomi, budaya, teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, dan masalah remaja, olah raga, dan pariwisata. Tentu saja tidak semua segi dan setiap kerja sama tersebut tumbuh dengan seragam. Terkadang banyak masalah yang tidak terpecahkan bahkan sampai tingkat bilateral dan multilateral. Faktor terpenting dan sangat menentukan semua ini adalah tendensi pemerintah negara-negara muslim untuk mempererat lagi hubungan dan jalinan kerjasama di bidang-bidang tersebut.

Selain OKI, yang bergerak di bidang sosial, politik, dan ekonomi, terdapat juga organisasi yang bergerak di bidang ideologi gerakan perjuangan umat Islam, yaitu Liga Islam (Arab). Jika OKI bertanggungjawab menangani masalah kerjasama politik dan ekonomi, maka Liga Arab bertanggungjawab atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ideologi gerakan Islam. Aktivitas Liga Arab sebagai organisasi non-government jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan OKI, berkaitan dengan

pra-syaratnya sebagai suatu organisasi trans-nasional. Liga Arab mempersatukan para tokoh ilmuwan, agamawan terkemuka, aktivis-aktivis politik, dan pemimpin partai atau organisasi-organisasi Islam. Dalam anggaran dasarnya, Liga menyatakan bahwa "tidak akan melewatkan satu kesempatan pun untuk mendukung persatuan umat Islam sedunia, dan untuk itu siap memberikan bantuan yang dimilikinya baik berupa moral, budaya, dan materi."[26] Pada hakikatnya, OKI dan Liga Arab saling menopang dalam kegiatan-kegiatannya dengan menekankan aspek tunggal, yaitu demi teguhnya persatuan negara-negara muslim.

Membicarakan keinginan umat Islam untuk memperkuat persatuan mereka di dunia Islam, memerlukan sebuah syarat yang sangat prinsipil. Secara umum, masing-masing negara muslim berupaya menyatukan dua fenomena yang sangat sulit membaur. Di satu sisi, mereka berusaha menguasai teknologi modern untuk mengangkat taraf hidup dan kekuatan nasional mereka, sedangkan di sisi lain, terdapat juga keinginan yang kuat untuk memelihara khazanah tradisi luhur, yang telah dibangun selama berabad-abad. Dari sudut pandang sosio-psikologis dan sosio-filosofis, sangat tidak mudah mewujudkan harmoni tersebut, jika tidak mau disebut "sama sekali mustahil".

Politisasi Islam yang menjamur dewasa ini di negara-negara Timur, dapat dilihat sebagai bagian dari proses besar dan rumit, yang mendorong umat Islam beradaptasi dengan dunia modern. Dalam arena internasional, tidak jarang agama yang dipandang sebagai dasar identifikasi dan ekspresi kemerdekaan bagi kebanyakan negara-negara Islam. Ide nasionalisme semakin popular, namun nasionalisme kini menjadi lebih relijius dibandingkan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada saat ini, upaya untuk mempersatukan seluruh umat Islam

26 Sharipova, R.M. *Liga Islamskogo mira. Panislamizm segodnya (Liga Islam. Panislamisme Kini)*. Moskwa, 1986. hlm.56-57.

digunakan oleh para politikus negara-negara muslim bukan untuk membangun komunitas tunggal, tapi untuk membentuk pemerintahan Islam yang berdaulat dan diakui secara *de jure* dan *de facto*. Berbeda dengan situasi pada tahun 1940-an sampai 1960-an, saat ini sedikit sekali politikus yang merencanakan pembentukan pemerintah Islam yang tunggal. Sebagian besar politikus dan ulama telah menyatakan bahwa dunia Islam kontemporer berbentuk *polisentris*. Mereka menilai keruntuhan sosial dan kebejatan moral yang tengah dialami umat Islam merupakan akibat dari penyimpangan Islam "jalan lurus", Islam yang sejati. Tema utama yang diusung adalah pemurnian Islam, dengan kembali pada sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran dan sunnah, yang dipraktekkan pada masa-masa awal periode kekhalifahan. Gerakan ini dilancarkan oleh golongan yang dipandang suci, sehingga mampu memperbaiki forma-forma peribadatan, pendidikan dan pengajaran, serta perlu dengan mengumandangkan "perang suci" (jihad).

Ada juga segolongan pemuka agama yang mendakwahkan "modernisasi Islam". Sejak akhir abad ke-XIX [19], aktivitas gerakan Islam reformis ini mencoba menjembatani jarak antara warisan-warisan tradisi Islam dengan modernitas untuk menumbuhkan rasa bangga, percaya diri, dan memberikan kekuatan baru kepada semangat umat muslim yang ditindas pemerintah kolonial. Islam modernis bertujuan memperbaharui gerakan reformasi pendidikan dan perubahan sosial, serta memperjuangkan kemerdekaan nasional. Namun tampaknya gerakan ini hanya menarik simpati kalangan elit-intelektual sehingga pengaruh gerakan ini sangat terbatas. Sebagian besar umat Islam tetap berada dalam posisi penantian yang penuh harap akan lahirnya konsep-konsep dan program-program yang mampu memerdekakan dan mengeluarkan mereka dari perangkap ketidaksesuaian antara pandangan dan paham keagamaan mereka dengan realitas yang terjadi.

Kedahagaan dan kerinduan yang seperti inilah yang melahirkan organisasi-organisasi seperti Ikhwan al-Muslimin di Mesir, dan Jama'ah Islam di Pakistan. Pengaruh mereka, sebagai prototipe umum dari kelompok gerakan modern yang radikal, sangat dilebih-lebihkan. Kedua organisasi ini memberikan dua fenomena yang sangat penting, *pertama,* Islam akan senantiasa aktif mempengaruhi politik negara-negara Islam, *kedua,* gerakan-gerakan dan aktivitas serupa akan menjadi contoh bagi organisasi-organisasi tiruan di tempat lain. Pada tahun 1970-1980-an, muncul organisasi-organisasi, grup-grup, kelompok-kelompok, serta ajaran-ajaran yang bertujuan mewujudkan bentuk pemerintahan dan negara hukum Islam, baik yang ditopang dengan kekuatan senjata maupun melalui program rancangan sosial dan aksi politik.

Kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi radikal ini melakukan aksinya untuk membela lapisan masyarakat yang tidak mampu dan terbelakang. Kekayaan, kemewahan, cermin hidup ala Barat, dan berkembangnya korupsi seiring sejalan dengan meningkatnya kemiskinan dan besarnya angka pengangguran. Norma-norma Barat tidak begitu saja mudah diterima dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, namun pada tingkat tertentu membentuk fundamen sosio-psikologis bagi kebangkitan Islam. Islam radikal tidak hanya menolak status-quo politik, ekonomi, dan sosial, tapi juga kemapanan agama resmi negara. Di negara-negara sunni, para ulama dipandang sebagai abdi yang siap melayani para pejabat negara. Sedangkan para aktivis Islam radikal Mesir menegaskan bahwa hukum dan pemerintahan Islam berasaskan syari'at Islam, oleh sebab itu pemerintahan seperti rezim Anwar Sadat yang dianggap tidak mengindahkan tradisi Islam, merupakan pemerintah yang tidak sah dan layak digulingkan. Secara umum, pemerintahan yang seperti ini menjadi obyek "perang suci" dan harus diberantas. Umat Islam berkewajiban untuk menghancurkan pemerintah

non muslim seperti ini dan berjuang melawan umat Islam yang lain, yang tidak mau berfikir dan bertindak radikal. Kelompok ini tercatat sebagai kelompok Islam yang paling berbahaya. "Jihad" melawan kelompok yang tidak sejalan dengan mereka menjadi suatu keharusan, baik dari sudut pandang agama maupun politik.

Aktivitas politik kelompok-kelompok garis keras dan ekstrim tampak semakin jelas sejak pertengahan tahun 1980-an. Pengaruh besar yang mewarnai kelompok ini berasal dari paham dan gerakan *Khomeinisme* Iran. Walaupun kelompok-kelompok ini terbilang tidak banyak, namun keanggotaannya tampak mengalami perkembangan. Pada beberapa waktu, mereka berhasil mencapai keberhasilan tertentu dalam aksinya di dunia politik, namun mereka belum mampu memobilisasi massa dalam jumlah yang besar. Sehubungan dengan ini kita dapat sepenuhnya sependapat dengan orientalis terkenal dari Amerika Serikat, John Esposito, yang menyatakan bahwa bagi kebanyakan umat Islam yang tertindas, kebangkitan Islam menjadi proses identifikasi diri, kebebasan yang lebih terbuka untuk melaksanakan ajaran agama, memperkuat hubungan kekeluargaan, memperbaiki moral dan akhlak. Membentuk pemerintahan berdasarkan syari'ah Islam dipandang sebagai suatu keharusan dan syarat mutlak untuk transformasi sosial maupun individual.[27]

Tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi antara golongan radikal dengan muslim awam, sebenarnya mereka mempunyai satu tujuan yang sama walaupun dengan cara yang berbeda, yaitu memperkuat posisi umat Islam di arena internasional dalam menghadapi Barat. Sistem perekonomian Barat mereka tolak karena tidak mampu mengurangi angka kemiskinan yang tersebar di negara-negara muslim. Oleh sebab itu mereka mencanangkan sistem ekonomi yang lebih adil secara material. Ideologi kapitalisme dinilai sebagai fetish

27 Esposito, J.L. *Islam, the Straight Path*. New York, 1988. hlm. 174.

terhadap benda, materialisme yang vulgar, membuat manusia buta terhadap masalah keadilan sosial. Kemudian datang saat untuk menyingkirkan sosialisme karena unsur "anti tuhannya". Padahal Tuhan merupakan faktor terpenting dalam inti agama.

Sebagai contoh, mantan pemimpin Ikhwan al-Muslim dan ideolog terkenal kebangkitan Islam, Sayid Qutb, menggarisbawahi bahwa pemecahan masalah-masalah kemanusiaan secara utuh bagi umat Islam, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Islam itu sendiri, karena marksisme dan kapitalisme tidak mampu melakukannya. Sayid Qutb menulis bahwa kesulitan ekonomi yang melanda dunia kapitalis, bertambah kuatnya keberpihakan kepada Uni Soviet untuk memecahkan masalah, menunjukkan ke arah mana krisis materialisme ini berjalan. "Tak ada yang dapat membantu, tapi semua dapat melihat betapa canggung dan malunya orang-orang yang hidup dalam sistem ini. Mereka malu karena nilai-nilai yang melekat pada sistem ini". Menurut Sayid Qutb, semua kegagalan ini merefleksikan keruntuhan jiwa dan spiritualitas Marksisme dan Kapitalisme. Ia menandaskan bahwa dalam kondisi dan situasi seperti ini hanya Islam yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan umat Islam karena dalam ajaran agama Islam, terdapat paduan aspek spiritual dan material.[28]

Ketidakpercayaan kepada sosialisme dan kapitalisme sebagai suatu sistem, mampu memberikan kemampuan untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi umat Islam. Ketidakpercayaan tersebut sudah tertanam di kalangan aktivis politik dan ulama. Dan mereka menggunakan segenap kemampuan untuk mendiskreditkan sosialisme dan kapitalisme di mata umat Islam.

28 *Islam and Power*. London,1981. hlm. 9-10.

4. Pengaruh Islam terhadap Politik Negara-Negara Muslim

Untuk memahami permasalahan pengaruh Islam terhadap politik negara-negara yang berdaulat secara utuh, tidak hanya perlu mengkaji beberapa faktor sejarah, sosial-ekonomi, dan perkembangan politik negara-negara tersebut, namun juga konfessi yang berlaku. Seperti yang telah ditekankan oleh para Islomolog, tanpa memandang semua kekayaan dan beragamnya kondisi keberadaan negara-negara muslim di dunia, Islam mampu membentuk kedekatan secara spiritual dan sosial pada bangsa-bangsa yang memeluknya. Stereotype Islam yang dangkal masih mendominasi kalangan kaum miskin perkotaan dan kaum petani yang masih tradisional secara sosial-psikologis. Nilai-nilai Islam tidak jarang mengisi bagian-bagian penting warisan budaya nasional. Islam, seperti sebelumnya, tidak hanya tampil sebagai ajaran agama, namun juga sebagai simbol ragam wawasan hidup sosial dan nasional.

Setelah mengadakan studi perbandingan empat agama dunia – Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen – para ahli membagi beberapa ciri-ciri Islam yang spesifik: yaitu, sejarah Islam, struktur persatuan, dan kehadiran sejumlah posisi yang egaliter, ide persamaan hak, yang terkandung dalam ajaran doktrinnya.

Penggunaan istilah "agama-agama yang bersejarah dan tidak bersejarah", seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan Barat ini, tidak berarti bahwa seolah-olah ada agama yang berdiri di luar sejarah. Dalam kasus ini, termin tersebut digunakan untuk analisa perbandingan dan pembagian spesifikasi utama, yang terdapat dalam berbagai sistem filsafat agama.

Misalnya, dalam filsafat Yudo-Kristiani-Islam, sejarah merupakan kategori dasar, sehubungan dengan paham bahwa

sejarah dimulai sejak penciptaan dunia. Sehubungan dengan ini, Tuhan ikut campur tangan dalam proses sejarah melalui wahyu yang diturunkan kepada para rasul-Nya. Dalam hal ini sejarah memiliki peran penting dalam mendekatkan dan menyempurnakan pesanNya. Menurut para ahli, sejarah harus berakhir setelah pelaksanaan wahyu tersebut. Berdasarkan konsep ini, dalam ajaran Indo-Buddha yang non-history, sejarah tidak dapat ditemukan di sini. Kehidupan dipandang sebagai proses siklus yang tiada henti demi penyempurnaan moral. Masa keemasan berganti dengan degradasi dan keruntuhan, kemudian muncul kembali masa kebangkitan dan dimulailah siklus berikutnya. Sesuai dengan ajaran kepercayaan agama ini, nasib suatu masyarakat tidak dapat diprediksi, karena ia bergulir dalam proses kosmis yang tiada akhir.

Dengan adanya kemungkinan bagi kedua sistem filsafat agama ini berpengaruh terhadap perkembangan politik masyarakat, para ahli memperhatikan, bahwa sistem agama historis memiliki potensi yang mendorong terjadinya perubahan sosial karena agama-agama seperti ini mengajarkan para penganutnya menerima proses sejarah sebagai "awal dan akhir", walaupun itu juga termasuk asal usul Tuhan.

Di kalangan para ilmuwan negara-negara muslim, tersebar pendapat yang menyatakan, bahwa sejarah merupakan proses yang mendorong masyarakat primitif berubah menjadi "masyarakat muslim sejati." Mereka juga beranggapan, bahwa perjuangan berlangsung sepanjang perjalanan sejarah dan berakhir dengan terbentuknya masyarakat muslim pertama di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, perlu diperhatikan, bahwa pendukung pendapat ini, dalam masalah pendidikan masyarakat, tidak memasukkan pemikiran "kelas sosial", bahkan jika mereka berbicara tentang produksi material, sebelumnya mereka memahami bukan formasi masyarakat

ekonomi, melainkan civilisasi. Walaupun para pengarang membahas perubahan yang primitif, tentang masyarakat primitif yang diubah oleh pemerintah, setidaknya, yang terpenting buat mereka adalah "tujuan". Dengan kata lain, pengertian sejarah bagi para mereka, termaktub dalam ideologisasi, penegasan agama Islam dalam masyarakat. Walaupun setelah proses pembentukan masyarakat ini, menurut pendapat mereka, sejarah sudah tidak dapat lagi memberikan kepada orang-orang yang beriman pelajaran yang berharga. Jika terjadi perubahan yang mengakibatkan keruntuhan, degradasi, maka untuk mengatasinya hanya dengan kembali ke konsepsi yang sudah ada.

Para ilmuwan muslim ini melahirkan kesadaran tentang pentingnya renovasi yang mengarah kepada gerakan renaissance dunia Islam. Menurut pendapat profesor Universitas Kairo, Ali Desuki, konsep pemahaman sejarah seperti ini telah menyebabkan beberapa tokoh muslim berkesimpulan, bahwa progres sosial dan politik, dari sudut pandang perspektif muslim, harus memiliki tujuan demi kebangkitan masyarakat madani, dan untuk itu, setiap pembangunan bangsa harus sesuai dengan rangka dan stereotype Islam.[29]

Selain itu, perlu juga diperhatikan, bahwa di antara pandangan dan pendapat aliran dan mahzab yang beragam dalam Islam terhadap proses sejarah menurut aspeknya, dan dalam hal ini, perbedaan tersebut sangat mengakar. Misalnya kaum Syi'ah setuju dengan kaum Sunni, bahwa sejarah umat Islam sejak pemerintahan Khulafa' al Rasyidun (11-40 H. /632-661M.) dianggap sebagai "kisah bencana". Namun, jika kaum Sunni menganggap peristiwa sejarah pada zaman tersebut sebagai "gerakan penjauhan dari konsep pemerintahan ideal", maka kaum Syi'ah sebaliknya menerima perjalanan sejarah ini sebagai langkah awal dari terbentuknya pemerintahan yang adil

29 Desuki, Ali. (ed.). *Islamic Resugense in the Arab World*. NY.1982. hlm. 8.

di muka bumi. Walaupun begitu, proses pergerakan di dunia Islam, terutama di kawasan Afro-Asia, memiliki model yang sangat berbeda dengan Barat. Menurut pendapat ahli dari Rusia B.S. Yerasov, "situasi Eropa abad pertengahan telah memberikan ide dan inspirasi kepada golongan Borjuis Eropa untuk berjuang demi masa depan mereka".[30] Di negara-negara Timur, suatu perkembangan ditentukan melalui perbaikan peninggalan-peninggalan dan warisan masa lalu. "Apalagi, gerakan tersebut berasal dari dorongan sejarah, dan sepertinya, elemen-elemen modern terlihat tidak sesuai dan bahkan mematikan proses perkembangan yang diharapkan".[31]

Mengakui perkembangan sejarah Islam, setidaknya, terdapat pembatasan oleh ajaran-ajaran Al-Quran, wahyu Allah yang berisi dogma-dogma dasar yang mengandung format organisasi masyarakat. Sesuai dengan ajaran Islam, semua ayat-ayatnya merupakan suatu yang absolut bagi semua dan setiap pemeluknya. Keabsolutan itu, terutama yang berhubungan dengan masalah kebenaran yang hakiki dan kepercayaan, tidak mentolerir setiap pendapat dan pemikiran yang bertentangan dengannya. Pada pelaksanaannya, hal ini menghasilkan suatu formulasi dogma yang tidak mengakui adanya hak alternatif terhadap perbedaan pemikiran dan pendapat, walaupun kadang-kadang sejumlah ayat Al-Quran diinterpretasikan sebagai rujukan terhadap hal-hal yang tidak dipaksakan dalam agama. Menurut pendapat para ahli muslim sendiri, gaya pemikiran seperti ini telah menyebabkan menguatnya sistem pemerintahan negara yang otoriter.

Keunikan Islam yang lain adalah struktur organisasinya yang sama sekali sangat berbeda dengan agama Kristen, terutama Katholik, Buddha, dengan tiadanya institut hirarkhi gereja,

30 Yerasov, B.S. *Tradisi Sosio-kultural dan Kesadaran Sosial di Negara-Negara Asia-Afrika (Sotsial'no-kul'turnye traditsii i obshyestvennoye soznaniye v razvivayushikhsia stranakh Azii i Afriki).* Moskwa,1982. hlm.5.

31 *ibid.*

tidak diakuinya perantara antara manusia dan Tuhan. Dapat dicontohkan disini perbedaan antara pendeta dan imam. Pendeta yang bertugas sebagai perantara antara manusia dan Tuhan, mendapat otoritas dari hasil pelaksanaan tugasnya tersebut, sedangkan imam, sebaliknya, tidak memiliki peran seperti ini, tapi memanfaatkan pengetahuannya dalam hukum Islam, sehingga dianggap sebagai panutan, guru, dan pemimpin umat. Seperti yang diperhatikan oleh ahli dari Amerika Serikat, D. Pipes, "para pendeta pemimpin jamaah gereja telah menimbulkan *hullabaloo* saat terlalu jauh memasuki ajang politik : para imam juga merupakan pemimpin politik, namun mereka akan mendapat oposisi penuh jika mengeluarkan penafsiran dan pernyataan sendiri tentang agama dan Al-Quran".[32]

Tampaknya sistem hirarkhi keagamaan dalam Islam dan Hindu terarah menuju perkembangan prinsip persatuan antara agama dan umat, sedangkan sistem hirarkhi gereja yang terdapat dalam agama Buddha dan Kristen, peran penting institut organisasi dan struktur hirarkhi : Ordo Bikshu – Sangha, dan Ekklesia – Majelis Tinggi Kristen. Secara linguistik, termin sangha dan ekklesia dapat berarti "*assamble*, grup, yang berdiri seperti *mansion* dalam masyarakat". Sehubungan dengan kuatnya pengaruh politik gereja Kristen sebagai institut yang menekan perkembangan pemikiran masyarakat, Bertrand Russel menyatakan, bahwa "dalam agama Kristen, dari sudut pandang sosial dan sejarah, gereja lebih banyak memainkan peran utama dibandingkan Kristus".[33]

Di kalangan para ahli, terdapat pendapat, bahwa sistem hirarkhi keagamaan, yang sangat memperhatikan kekokohan struktur institusinya, memperlihatkan kemampuan yang sangat baik dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul sebagai

32 Pipes, Daniel. *In the Path of God. Islam and Political Power*. N.Y,1983. hlm.38.

33 *Op.Cit.*, hlm.9.

akibat dari perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, dapat terlihat, bahwa struktur hirarkhi tersebut memungkinkan mereka lebih mudah menentang setiap usaha pemerintah melaksanakan politik sekulerisasi, dan mempertahankan otoritas politiknya dalam masyarakat.

Agama seperti Islam, yang tidak memiliki institut hirarkhi yang berkembang pesat seperti dalam Kristen, secara berarti mundur dengan *flexible*, efektif, dengan sedikit kerugian dalam menentang politik sekulerisasi. Selain itu, sejumlah ahli berpendapat, bahwa tidak benar jika menyatakan proses sekulerisasi, modernisasi, tersingkirnya agama dari arena politik yang berlangsung di dunia Kristen dapat disamakan dengan proses yang terjadi dalam dunia Islam.[34]

Sebenarnya, proses sekulerisasi mungkin lebih berhasil jika diakuinya peran "pendekatan differensialisme". Dalam Islam, pada tahap tertentu, tidak ada pengakuan terhadap pemisahan universal menjadi partikular, tidak ada tempat bagi pendapat-pendapat yang berasal dari luar ajaran Islam. Kenyataannya, di negara-negara muslim mana pun, di luar ketergantungan dari orientasi politik rezim yang berkuasa, sedikit sekali yang mampu menampilkan dirinya menentang Islam, karena aksi seperti ini harus dibayar teramat mahal. Sebagai contoh yang berhubungan dengan pendapat ini, pada tanggal 25 April 1967, dalam surat kabar militer Syria "Tentara Rakyat", dipublikasikan artikel seorang perwira muda Ibrahim Khalis yang berjudul "Bagaimana Membentuk Generasi Arab yang Baru", yang berbicara "kaum sosialis Arab yang baru, yang melanjutkan tradisi percaya kepada Tuhan, agama... dan semua yang lain, harus dikirim ke museum, kita hanya memerlukan orang yang tidak bersujud (beribadah-ed.)...". Artikel ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan, yang berakhir dengan dihukumnya penulis artikel dan redaktor surat kabar hukuman penjara seumur hidup, dan radio Damaskus

34 *Ibid.*

mengumumkan, bahwa "orang-orang tersebut merupakan musuh Islam, agen imperialisme, sionisme, dan lain sebagainya".[35]

Atau kita ambil contoh dari kehidupan negara muslim non-Arab, Malaysia. Di bulan Juli 1986, Kementrian Dalam Negeri Malaysia mengeluarkan larangan terhadap buku karangan Dr. Kasim Ahmad (mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia), yang berjudul "Hadis: Sebuah Tinjauan Ulang". Menurut keputusan Kementrian, buku ini dilarang "dengan tujuan demi menyelamatkan bangsa dan negara". Permasalahan apa saja yang dibahas dalam buku ini? Penulis buku ini tertarik untuk membahas permasalahan mengapa hadis muncul setelah 250-300 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan mengapa terdapat dua versi yang berbeda, yang satunya dipakai oleh golongan Sunni, dan yang satunya lagi dipegang oleh kaum Syi'ah. Kemudian ia juga mempertanyakan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kumpulan hadis, dan bagaimana hubungan antara penerbitan kumpulan hadis dengan keruntuhan, ketinggalan, yang dapat diperhatikan saat kumpulan hadis itu dimunculkan. Sepertinya dalam buku Ahmad Kasim ini tidak ada termuat kritikan anti Islam, namun pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakannya sudah cukup membuat kaum Islam fanatik meminta buku ini dilarang beredar[36]

Dapat dikatakan, bahwa pembela Islam sangat effektif menentang segala upaya yang memperjuangkan sekulerisasi, fakta yang menyatakan, bahwa lebih dari 40 negara muslim dunia, hanya Turki yang berhasil secara formal mendeklarasikan sekularisme pemerintahannya, namun di negara tersebut, para aktivis muslim senantiasa menekan dan menakuti kaum sekuler dan selalu menyiapkan priventisasi terhadap semua aksi sekularisme.

35 Lewis, Bernard. *Return of Islam.- Religionaud Politicsin the Middle East.* Colorado,1981. hlm. 24.

36 *Arabica.* London. 1986, vol.6, no.62. Oktober. hlm.51

Hal lain yang menyangkut ciri spesifik Islam adalah ide egaliter dan tiadanya prinsip hirarkhi yang berkembang dalam agama Buddha dan Kristen, sehingga dapat dipastikan, bahwa ide persamaan, persaudaraan, dan lainnya, dapat mendorong perkembangan aktivitas politik massa. Namun pada prakteknya justru sebaliknya. Walaupun prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, tapi realisasinya, mulai dari masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, abad pertengahan, dan sampai pada masa sekarang, terdapat pembagian kelompok masyarakat menjadi "awam" dan "elit". Islamolog asal Rusia, V.V. Naumkin, berdasarkan materi-materi yang cukup luas berhasil menunjukkan, bahwa walaupun dari awal Islam sering digambarkan sebagai ajaran yang egaliter, namun dalam agama ini sejak awal sudah meletakkan ide ketidaksetaraan antara manusia. Al-Quran mengakui sistem perbudakan. Dalam pemerintahan muslim-Arab era Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sistem sosial hirarkhi. Dalam sistem ini, manusia ditentukan dengan kriteria religi dan genealogi.[37]

Pengelompokan masyarakat seperti ini, telah berpengaruh terhadap perkembangan civilisasi umat Islam, dan dalam banyak hal, telah menjelaskan alasan-alasan, mengapa ide egaliter yang termuat dalam Al-Quran tidak hanya tidak direalisasikan, namun juga mempengaruhi secara negatif pendidikan politik massa, yang sudah terbiasa menuruti semua perintah para pemimpin mereka, kadang-kadang dengan fanatisme yang luar biasa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan, bahwa dari zaman dahulu sampai sekarang, golongan awam tidak mampu mendapatkan prestasi politik yang gemilang walaupun sudah diiringi dengan tingkat keaktifan yang tinggi. Dalam kasus ini, diperlukan keberadaan infrastruktur politik yang sudah berkembang dan budaya politik yang tidak memuat unsur kekerasan dan orthodoksalime dalam metode berpikir.

37 Naumkin, V.V. *Persoalan "Khusus dan Umum"- Islam dalam Sejarah Bangsa-Bangsa Timur (K voprosu"khassa i amma"- Islam v istorii narodov vostoka).* Moskwa.1981. hlm. 40.

Selanjutnya, pembatasan cara berpikir seperti ini sangat berarti dalam menyempitkan kesempatan untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi dan politik jangka panjang demi kepentingan perbaikan kondisi kehidupan massa pekerja. Menurut pendapat para ahli dari negara-negara muslim, keaktifan politik massa umat Islam sangat sering berakhir dengan pawai-pawai dan rapat jalanan, tidak jarang diprovokasi oleh tokoh-tokoh demagogis atau keagamaan dibawah pengaruh aksi irasional atau rasional mullah, yang menyuarakan perlawanan terhadap sesuatu atau seseorang yang tidak Islami dari sudut pandang mullah itu sendiri.[38]

Aktivitas politik seperti ini sering berakhir dengan sia-sia dan juga memberikan kesempatan berbagai jenis avanturisme dan ekstrimisme dalam merebut kekuasaan. Fakta-fakta kehidupan politik umat muslim masa kini menegaskan pendapat para islamolog, bahwa rezim diktator ekstrimis di negara-negara muslim tidak berhasil berkuasa lama, tanpa berpijak pada warisan politik Islam dalam pengertian yang luas.[39]

Perlu diperhatikan, bahwa penerimaan umat Islam terhadap aktifitas politik di sekeliling mereka, tidak hanya dalam bentuk stereotip sejarah. Alat politik dan propaganda yang hebat menekankan stereotip-stereotip yang diperlukan oleh para penguasa. Seorang muslim yang taat, pada prakteknya setiap hari berhadapan dengan formula ideologi dan politik di mesjid, dalam perbincangan dengan mullah atau imam setempat, melalui radio, televisi, pers. Sebagian besar muslim taat, yang merupakan kaum yang buta huruf atau setengah buta huruf, berada dalam kondisi yang sulit, yang tidak hanya disebabkan oleh banyaknya sumber informasi, tapi juga sebagai hasil psikologis dari terbentuknya

38 Gureshi, Saleem. *Militery in the Policy of Islam: Religion as a Basis of Civil Military Interaction. – International Political Science Review. 1981, vol.2, no.3. hlm.282.*

39 *Ibid. hlm. 283.*

pola pikir dan cara menerima peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Seperti yang sudah diketahui, sistem pemikiran manusia yang melek huruf, yang menerima informasi melalui bacaan, berbeda dengan sistem pemikiran manusia yang hanya menerima pengetahuan dan informasi melalui pendengaran. Orang yang hanya menerima informasi melalui pendengaran lebih cenderung kepada cara berpikir kharismatik dan *adequate* sebagai bentuk dan metode perjuangan politik.

Cara berpikir kharismatik, pada umumnya, mendapat dukungan yang luas terutama saat terjadinya situasi yang krisis. Timbulnya berbagai macam gerakan pembaharuan, yang selain yang telah diungkapkan di atas, mencerminkan masyarakat yang tidak berdaya dalam memutuskan masalah yang sedang terjadi. Setelah mengungkapkan kemungkinan ada atau tidaknya kondisi sosial yang lebih baik, masyarakat masuk ke jalan buntu dan di sini mulailah tumbuh harapan terhadap intervensi transendental. Depresi ekonomi, tekanan sosial-politik masyarakat menciptakan situasi seperti ini, saat harapan besar mereka dihapus, sebagai jalan keluarnya adalah dengan kedatangan seorang pemimpin yang dapat menyelamatkan mereka. Pemimpin tersebut harus memiliki energi yang besar dan daya hidup, dengan intelektual yang tinggi. Pemimpin ini harus menguasai kemampuan menanamkan dalam pikiran massa ide-ide baru dan mengkonversi mitos, simbol, dan nilai-nilai lama, terlebih lagi, bahwa sistem pemikiran pada periode krisis lebih cenderung untuk menerima pemimpin seperti ini.[40]

Krisis menyebabkan timbulnya kharisma, lalu kharisma harus menghadirkan stabilitas dan ketertiban. Seorang pemimpin yang kharismatik bukan sekedar seorang pemimpin yang dihormati. Dia harus menampilkan kwalitas dirinya yang mampu

40 Merriem, Allen H. *Charismatic Leadership in Modern Asia: Mao, Gandhi and Khomeini.* – Asian Profile, Hong Kong,1981, October, vol. 9, no. 5. hlm. 389-390.

menyatukan massa yang luas menjadi suatu kesatuangerakan demi perubahan sosial. Menurut pendapat dua orang ahli Amerika Serikat, Rejai dan Philips, "berbicara tentang seorang pemimpin yang kharismatik berarti berbicara tentang gerakan-gerakan kharismatik, karena dua fenomena ini tidak terpisah".[41]

Gerakan kharismatik dapat memperkuat tradisi institusi-institusi tradisional. Di negara-negara yang menjaga pengaruh agama, agama merupakan cerminan tradisi kejiwaan yang utama. Seperti yang diungkapkan oleh B.S. Yerasov, agama di negara-negara Timur "mewakili ekspresi umum dan universal dalam hubungan individu, yang disalurkan pada super objek ketuhanan seperti sanksi normatif terakhir ketertiban".[42]

Bentuk pemikiran yang kharismatik bukanlah suatu bagian yang terpisah dari kesadaran beragama. Namun saat agama yang menjadi hegemoni, bentuk pemikiran seperti ini memerlukan waktu yang lama dan format penuh, dan dengan sendirinya, menyimpan gaya idealis dalam memandang dunia dan proses yang terjadi di dalam dunia tersebut.

Pernyataan di atas, tentunya, tidak berarti ciri spesifik Islam sama sekali bertanggungjawab terhadap semua pengaruh yang disebabkan oleh agama tersebut pada perkembangan sosial-politik negara-negara muslim. Seperti yang sudah diungkapkan, di sini bergerak komplek yang sangat besar dari faktor-faktor sejarah, sosial-ekonomi, politik, ideologi, hubungan internasional, dan etno-psikologis. Di sini kita hanya membahas beberapa ciri spesifik Islam secara umum saja karena lebih dominan dalam menunjukkan adanya pengaruh terhadap potongan perjalanan sejarah, juga terhadap berbagai kelas, grup, lapisan masyarakat

41 Rejai, M. Philips, K. *World Revolution Leader*. London, 1983. hlm. 31.

42 Yerasov, B.S. *Tradisi Sosio-Kultural dan Kesadaran Sosial di Negara-Negara Berkembang Asia-Afrika (Sotsial'no-kul'turnye traditsii i obshyestvennoye soznaniye v razvivayushyikhsia stranakh Azii i Afriki)*. Moskwa,1982. hlm.265-266.

yang berbeda, dan juga terhadap aliran dan mahzab dalam Islam. Dalam penyelenggaraan politik pemerintahan negara-negara muslim, ciri-ciri Islam bisa saja muncul dengan tidak sendirinya, melainkan dengan aspek perkembangan sosial-ekonomi dan politik negara-negara tersebut. Apalagi, tanpa menyelidiki ciri-ciri Islam tersebut, tidak diragukan lagi, sulit untuk memperkirakan betapa besarnya pengaruh yang diberikan oleh agama ini terhadap politik dalam dan luar negeri pemerintahan negara-negara muslim. Sebagian besar para ahli setuju dengan pendapat yang menyatakan, bahwa dari semua agama-agama Timur, Islam merupakan agama yang lebih *membumi*, dan di wilayah-wilayah penyebarannya, hubungan agama dan politik selalu tampak lebih jelas baik di bidang hubungan sosial, maupun ideologi, juga dalam struktur pemerintahan dan kehidupan masyarakat.[43]

Bagi seorang muslim, Islam merupakan reglamentasi semua sisi dan aspek kehidupan dan kematian seorang muslim. Baginya, Islam bukanlah suatu yang abstrak, melainkan suatu perwujudan dari ide praktek kehidupan sehari-hari. Secara pasti, hubungan organik agama dan politik merupakan kharakter umum yang mewarnai masyarakat muslim negara-negara di Asia dan Afrika. Berbeda dengan Kristen, Islam tidak hanya mendominasi urusan pribadi penganutnya.Di negara-negara Timur, Islam berperan dalam urusan agama, sekaligus juga menjadi contoh tatanan sosial yang meliputi semua aspek tingkah laku manusia, yang merupakan atribut penting "masyarakat muslim sejati". Akibatnya, kesadaran seorang muslim digolongkan sebagai suatu kondisi dikotomi, yakni kemampuannya untuk memahami dunia sekitarnya hanya dengan dua kategori, yaitu sesuai dengan ajaran Islam dan yang menentang ajarannya. Seorang manusia bisa menjadi seorang yang beriman atau kafir dan seterusnya. Islam dipahami oleh para penganutnya sebagai agama yang terbaik dan

43 *Islam dalam Politik Modern Negara-Negara Timur(Islam v sovremennoy politike stran Vostoka).* Moskwa,1986. hlm.7.

sempurna. Kemampuan Islam yang sangat kuat mempengaruhi emosi masyarakatnya pemeluknya telah menjadikan agama ini sebagai faktor penentu dalam kehidupan politik negara-negara muslim.

PemahamanumatIslamterhadapajaranagamanyaberdasarkan pada Al-Quran dan sejarah awal perkembangan Islam. Bagi semua generasi muslim, era Islam zaman Rasulallah SAW dan para sahabat merupakan periode ideal bentuk kehidupan islami. Di sebahagian besar negara-negara muslim, sudah muncul gaya kehidupan seperti ini, dimana agama sangat berhubungan erat dengan politik, hukum, dan masyarakat dengan utuh. Struktur pemerintahan dan masyarakat Islam tradisional menghasilkan suatu konstruksi khas yang dipakai sebagai model oleh generasi muslim selama berabad-abad sampai saat ini.

Berbeda dengan Kristen, Islam sejak awal kelahirannya sudah menjadi negara teokrasi. Agama ini menjadi dasar konsepsi kekuasaan dan menegakkan landscape sebuah masyarakat madani. Para anggota masyarakat ini harus terdiri dari orang-orang yang beriman dan sekaligus menjadi warganya. Islam tidak bisa dipahami dengan pemahaman sempit, yang hanya berdasarkan dari praktek ibadah keseharian, doktrin kepercayaan, dan nilai-nilai etika. Islam menambahkan peran pentingnya dalam pembentukan organisasi sosial masyarakat, menjadi falsafah hidup pemeluknya, dan memberikan pengaruh kuat pada pembentukan prinsip sistem ekonomi dan berbagai format pemerintahan.

Banyak di antara para ahli muslim yang menunjukkan sejumlah perbedaan antara ruang lingkup Islam yang luas dengan dunia Kristen yang terbatas. Mereka mengungkapkan, bahwa Kristen lebih memfokuskan perhatiannya pada spiritual individu, bukan pada permasalahan 'individu sebagai bagian dari suatu yang utuh'. Seorang sejarawan dan tokoh politik dari

Irak yang terkenal, Abd al-Rahman al-Bazaz, menulis, bahwa perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen tidak dapat dihindari lagi karena sudah terdapat pada saat kedua agama ini lahir.44 Bartold menunjukkan, bahwa cendekiawan muslim yang terkenal, Biruni (abad ke-XI) menegaskan, bahwa aliansi antara negara dengan agama sebagai tingkat tertinggi perkembangan peradaban manusia.45

Dalam memperhatikan permasalahan hubungan timbal balik agama dan politik di negara-negara muslim, Islam mungkin dapat diterima sebagai suatu komplek sistem sosial-budaya perkembangan bangsa-bangsa negara-negara tersebut. Dalam hal ini dapat diungkapkan lebih jelas, mengapa semua upaya kaum islamis dalam menyempurnakan mekanisme perannya dalam kehidupan sosial-ekonomi, ideologi, dan politik negara-negara Timur tidak berhasil. Mereka berusaha menghambat stagnasi karena sebaliknya dapat terjadi deformasi semua sistem.

Dari sudut pandang ini, sangat penting memaparkan pengaruh Islam terhadap politik luar negeri dan hubungan internasional di negara-negara Asia-Afrika. Dibandingkan dengan permasalahan perkembangan internal, Islam di arena internasional tampil lebih luas dan kaya, tidak hanya menampilkan sosio-kultur community, namun juga menjadi simbol solidaritas, yang menjadi fondasi kebijakan politik internasional negara-negara muslim. Walaupun community ini tidak jarang tampil berantakan dan tidak solid, namun setidaknya saat berjuang demi kemerdekaan politik dan ekonomi, dapat memainkan peran penting. Di tingkat internasional, potensi ideologi, politik, dan kesempatan Islam untuk bermain lebih terbuka luas. Pada praktek keseharian

44 Al Bazaz, Abd al-Rahman. *Islam and Arab Nationalism – in "Islam in Transition"*. N.Y. 1982. p. 34-35.

45 Bartold, V.V. *Khalifah dan Sultan (Khalif i sultan)*. Essay, jilid 6. Moskwa, 1966. hlm. 29.

sosial-politik berbagai rezim pemerintahan, Islam memperkuat spesifikasinya di arena internasional, dengan menjadikan hubungan ini lebih rumit dan kontardiktif.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka mengalami masa perjuangan keras demi independensi pembangunan bangsa mereka. Pada saat itu tumbuh dan berkembang spesifikasi baru peran mereka dalam perjalanan sejarah dunia. Walaupun perbedaan kelas sosial di dalam negara-negara tersebut semakin menguat, namun semua tendensi dan arah politik tetap mengacu pada integrasi. Mereka berusaha mengidentifikasi diri mereka sebagai sub-sistem mandiri di arena politik internasional.

Tendensi politik luar negeri seperti ini memiliki karakter yang rumit dan kontradiktif karena negara-negara Timur secara ekonomi, finansial, teknologi, politik-militer, selalu tergantung pada kekuatan luar. Dalam hal ini, Barat berusaha memperluas zona dan tingkat ketergantungan tersebut, dengan menanamkan politik adu domba. Di antara negara-negara merdeka tersebut terjadi pertikaian untuk merebut prioritas-prioritas strategis, yang kemudian diakhiri dengan perjuangan merebut tempat kepemimpinan. Selanjutnya tendensi pendekatan regional dari sisi kelompok-kelompok yang berbeda mendapat perkembangan yang semakin berarti. Kebijakan politik luar negeri negara-negara muslim tidak jarang digambarkan penuh kontradiksi, berlapis-lapis, dan *multy-coloured*.

Oleh sebab itu pengaruh Islam dalam proses hubungan internasional tidak lah satu macam saja dan tidak jarang sangat kontradiktif. Dalam pandangan kami, Islam sebagai fenomena politik internasional dapat dimasukkan dalam tiga hipotesis. Pertama, sebagai ajaran doktrinal dan konseptual. Kedua, Islam mampu berfungsi sebagai simbol politik luar negeri

yang menyatukan berbagai kelompok dan lapisan masyarakat untuk menghadapi berbagai macam permasalahan. Ketiga, Islam sangat sering menjadi alat parasitisme. Berbagai rezim, partai, organisasi, gerakan, dan tokoh-tokoh di negara-negara muslim menggunakan dogma, kedudukan Islam, integritasnya yang mampu memobilisasi potensial dengan tujuan untuk merealisasikan program politik yang konkret. Di bawah panji-panji Islam terbukalah kepentingan-kepentingan sosial-politik, ekonomi, ideologi berbagai kelas, kelompok, dan lapisan masyarakat negara-negara muslim.

Dengan demikian, saat pembicaraan menyinggung peran dan posisi Islam dalam politik dan hubungan internasional, diperlukan untuk melihat dan membedakan persatuan dialektis dan hubungan timbal balik tiga hipotesis di atas secara proporsional dari setiap sisi. Walaupun agama tidak mampu melahirkan politik (agama seolah-olah hanya memberkati dan mensakralkan), namun setidaknya dogma, norma-norma yang tertulis, dan kedudukan Islam, setelah menjelma menjadi praktek politik yang konkret dari berbagai kelas, kelompok, dan lapisan masyarakat, merupakan salah satu komponen sosial-budaya yang penting dalam perpolitikan negara-negara muslim. Penting juga untuk diingat, bahwa posisi negara-negara muslim dalam sistem global hubungan internasional ditentukan setidaknya oleh posisi mereka sebagai bagian dari perkembangan dunia, dalam hal ini potensi setiap negara muslim mendapat makna penting, terutama, jika kita membicarakan tentang negara-negara besar, yang memainkan peran penting di region masing-masing. Salah satu dari negara tersebut, yang mampu memperlihatkan pengaruh geopolitik pada vektor perkembangan dunia Islam adalah negara terbesar di Asia Tenggara, yaitu Indonesia.

Indonesia sudah memiliki tradisi kenegaraan selama berabad-abad, yang sudah menempatkan agama sebagai suatu

unsur kesatuan dalam kehidupan sosial dan politik. Pada abad pertengahan sudah terdapat di wilayah Indonesia kuno kerajaan-kerajaan Hindu (dan Buddha-ed.) seperti Sriwijaya dan Majapahit, dan juga kerajaan-kerajaan Islam yang menggantikan mereka, yang berdasarkan pada agama. Namun pada era Indonesia modern, unsur agama tidak terintegritas secara otomatis ke dalam struktur pemerintahan dan politik. Antara agama dan kehidupan sekuler terdapat jarak tertentu. Ajaran Islam sepertinya diterapkan dalam institusi-institusi pemerintahan seperti hubungan keluarga dan perkawinan.

Debat-debat yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan merupakan saksi nyata ketegangan yang tersimpan. Juga pada periode pasca Soeharto, permasalahan pengakuan Pancasila sebagai ideologi negara muncul ke permukaan. Berdasarkan fakta bahwa umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, sejumlah tokoh Islam terus memperjuangkan agar ciri dan karakter Islam semakin mewarnai konstitusi. Namun sebagian besar umat Islam lebih cenderung memisahkan agama dari dasar-dasar negara, sehingga mereka lebih mempertahankan bentuk pemerintahan yang sekuler.

Para pendukung syari'at Islam menegaskan, bahwa karakteristik dasar agama Islam mencegah terjadinya perubahan pemerintahan muslim menjadi negara teokrasi karena Islam tidak memiliki institusi gereja dan pastorial. Menurut mereka, pemerintahan negara muslim bertanggungjawab atas pelaksanaan dasar-dasar ajaran Islam di masyarakat demi kemaslahatan bangsa. Namun di antara penyokong ide ini juga saling berselisih pendapat mengenai metode pelaksanaan konsep ideologi tersebut. Haruskah kekuasaan terkonsentrasi di tangan tertentu atau diberikan kepada umat diiringi dengan intensifikasi ajaran-ajaran agama di masyarakat? Secara teoritis, bisa saja diterapkan suatu usaha untuk menyatukan dua metode

ini. Umumnya, partai-partai Islam di Indonesia lebih memilih cara-cara demokratis dan damai, walaupun beberapa segmen kelompok muslim kurang toleran dan menyerukan penggunaan metode kekerasan, namun mereka merupakan kelompok minoritas. Biasanya kepemimpinan dipegang oleh pemimpin yang toleran. Namun jangan lupa, bahwa selama jangka waktu 10 tahun pada tahun 1950-an abad ke-XX, berlangsung gerakan separatis "Darul Islam" yang bersenjata, yang memperjuangkan ide pembentukan pemerintahan Islam.

Masalah lain, walaupun semakin berkurang, umat Islam di Indonesia sangat sering terlibat dalam perbedaan dan perselisihan pendapat mengenai teokrasi dan ideologi, atau berdebat dengan golongan nasionalis sekuler, atau dengan sesama kelompok muslim sendiri, dalam hal ini, sering dipicu oleh masalah-masalah yang tidak prinsipil. Akibatnya, dari umat Islam sedikit sekali bermunculan ide-ide yang dapat memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi yang tajam, yang sedang dihadapi oleh Indonesia modern.[•]

BAB III
Episentrum Agama-Politik Dunia Islam

Sejak dahulu, sudah terkenal pusat-pusat tradisional peradaban Islam, yang berpengaruh secara politik, ideologi, dan agama terhadap perkembangan bangsa dan pemerintahan muslim. Contohnya, tempat-tempat suci umat Islam di Mekah dan Madinah di Saudi Arabia, atau Najaf dan Karbala di Irak bagi kaum Syi'ah. Pengaruh intelektual diberikan oleh pusat-pusat pendidikan seperti Universitas Al Azhar. Berdiri lebih dari 1000 tahun yang lalu, universitas ini pada saat pergolakan perjuangan kemerdekaan memainkan peran penting dalam memodernisasi konsep Islam agar dapat diterapkan di negara-negara yang baru merdeka. Umat muslim dunia menganggap Universitas Al Azhar sebagai penjaga warisan islam, dan mengakui lembaga ini sebagai salah satu otoritas tinggi dalam bidang teologi, hukum Islam, filsafat, dan berbagai disiplin lainnya. Al Azhar modern merupakan pusat persiapan tokoh agama terbesar bagi semua negara-negara Islam. Bagi kaum Syi'ah, sebagai pusat perziarahan dan pendidikan agama adalah Najaf dan Karbala, juga kota Kum yang berada di Iran. Setiap tahun ke Kum berdatangan sejuta penziarah. Ribuan Taliban (pelajar ilmu agama) belajar di madrasah-madrasah Faizaiyye dan di tempat-tempat pendidikan Syi'ah di kota ini.

Sebelumnya, otoritas pendidikan Islam dipegang oleh Bukhara, Samarkand, dan Tashkent. Sudah dikenal luas tentang universitas Islam di India. Pada saat ini, di seluruh negara-negara muslim, terdapat ribuan institusi pendidikan tinggi dan menengah Islam, yang menjadi tempat penggodokan para spesialis agama, dan juga para ahli ilmu-ilmu alam dan humaniora. Pada akhir tahun 1980-an, penulis berkunjung ke Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, yang dibangun dan dibiayai oleh Organisasi Konferensi Islam. Di universitas ini, penulis memperhatikan daftar panjang spesialisasi yang dapat dipilih oleh generasi muda dari seluruh negara Asia. Di universitas ini digodok calon-calon dokter, dosen sejarah, sosiolog, ahli hukum, ahli ekonomi, insinyur, arsitek, dan agronomist. Tentu saja di sini juga dijumpai Fakultas Teologi, yang tidak hanya memberikan pengetahuan agama, tapi juga mengajarkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia-Afrika, situasi ekonomi dan politik negara-negara berkembang pada zaman modern, dasar-dasar hukum internasional, dan hubungan internasional.

Di universitas ini bekerja sejumlah profesor dan dosen, yang mewakili pusat-pusat studi dan *research* dari negara-negara muslim ternama. Universitas ini pertama kali dipimpin oleh seorang profesor lulusan Al Azhar, yaitu Dr. Abdul Rauf. Menjelang penunjukkannya sebagai rektor Universitas Islam Kuala Lumpur ini, Abdul Rauf selama 10 tahun mengepalai Pusat Studi Islam milik pemerintah Amerika Serikat di Washington. Di antara para mahasiswa dan pengajar di Universitas ini, terdapat sejumlah mahasiswa dari Afganistan, yang beremigrasi dari Afganistan setelah terjadi perebutan kekuasaan pada April 1978. Biasanya mereka kuliah di Fakultas Hukum dan Teknik.

Walaupun Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur ini memiliki status istimewa, sebagai pusat pendidikan dan penelitian di bawah pengawasan langsung pemerintah Malaysia

dan sekretariat OKI, setidaknya, perkenalan penulis dengan universitas ini telah memberikan pendapat tertentu. Di dunia Islam, masalah persiapan kader-kader unggul mendapat perhatian utama. Tidak diragukan lagi, bahwa kebijakan seperti ini memberikan keuntungan pada kehidupan politik dan ekonomi negara-negara muslim. Dewasa ini di negara-negara Asia, Afrika, Eropa Barat, dan Amerika Utara telah didirikan sejumlah pusat-pusat Islam seperti ini.

1. Saudi Arabia sebagai Pusat Islam Internasional

Dalam menentukan pengertian pusat kekuatan dunia Islam, agaknya tidak cukup dengan hanya mempertimbangkan institusi-institusi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Hanya faktor-faktor sejarah, agama, ekonomi, politik, dan intelektual yang mampu mendukung status pusat kekuatan bagi sebuah negara muslim. Faktor-faktor inilah yang dimiliki oleh Saudi Arabia, yang menambahkan ke faktor sejarah masa lalunya, kekuatan ekonomi dan finansial sejak seperempat abad terakhir. Dengan semua faktor yang dimilikinya, pada saat ini otoritas Saudi Arabia dalam dunia Islam sedikit sekali yang meragukan.

Bagi umat Islam, Saudi Arabia merupakan tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. dan Islam. Mekkah dan Madinah dengan sejumlah tempat-tempat sucinya yang bersejarah telah memberikan status tinggi kepada negara ini di dunia Islam. Dari tahun ke tahun semakin meningkat jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Menjelang akhir tahun 90-an abad lalu, jumlah jamaah haji setiap tahunnya mencapai 2 juta orang. Saat musim haji tiba, pemerintah terpaksa meninggalkan semua urusan untuk mengatur pelaksanaan haji di tanah suci. Untuk melayani jamaah yang membludak, selama 30 tahun terakhir dibangun fasilitas-fasilitas transportasi, bandar udara, dan hotel-hotel. Berbeda dengan abad sebelumnya, pendapatan dari haji sudah tidak

memainkan peran penting dalam perekonomian Saudi Arabia, karena pengeluaran untuk mengatur pelaksanaan haji lebih besar dan lebih cepat. Pemerintah Saudi Arabia sangat menyadari hal ini, namun di sisi lain mereka mengharapkan pengeluaran ini dapat tergantikan dengan meningkatnya pengaruh politik dan moral di mata dunia Islam. Demi menguatnya prestis internasional dinasti Saud ini, menjelang pertemuan kepala negara negara-negara Islam di Kuwait, Januari 1987, Raja Fadh berhasil menambah gelar kehormatannya sebagai Pelindung dan Penjaga dua kota suci umat Islam, Mekkah dan Madinah.[46]

Otoritas Saudi Arabia di dunia Islam sangat bertumpu pada tingginya tingkat kehidupan beragama masyarakat Saudi Arabia. Sistem keagamaan dan kekuasaan pemerintah terus berjalan di kerajaan ini dengan tak terpisahkan. Kemitraan "agama-orientasi politik" telah berlangsung sejak tahun 1744, sebagai hasil dari aliansi ideolog dan pendiri gerakan Wahhabi, Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, dengan penguasa Saudi, Pangeran Ed Dziri Muhammad Ibn Sa'ud. Gerakan Wahhabi muncul di tengah kerusakan psikologis yang serius, yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan spiritual pada saat itu. Wahhabisme merupakan reaksi terhadap krisis masyarakat Arab, yang di dalamnya secara spontan melahirkan aspirasi-aspirasi idealisme baru. Dogma dan praktek agama Wahhabisme selama abad ke-XIX dan XX telah menimbulkan ketidakpuasan, bahkan sikap bermusuhan di antara golongan Sunni dan Syi'ah. Sebagaimana yang telah diperhatikan oleh peneliti Sovyet, A.M. Vasilyev, Wahhabisme telah melahirkan garis keras, yang menolak semua bid'ah, dengan kembali ke Al-Quran dan Sunnah sahih.[47]

Pada masa lalu, gerakan ini dituduh oleh berbagai kelompok di dunia Islam berada dalam fanatisme, puritanisme, dan tidak

46 The Washington Post, 22.02.1987.

47 Vasilyev, A.M. *Sejarah Saudi Arabia (Istoriya Saudovskoy Aravii) (1745-1973).* M. 1986. hlm. 76.

toleran terhadap aliran-aliran Islam lain, bahkan dituding "tidak menghormati" Rasulullah Muhammad SAW. Dewasa ini, beberapa elemen gerakan ini mendapat simpati dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan "kemurnian" Islam, yang memperjuangkan pembersihan bid'ah-bid'ah yang sudah menumpuk selama berabad-abad, walaupun seperti sebelumnya, masih banyak yang terus menentang peran penting Wahhabisme dengan menyebutnya sebagai ajaran sekte.

Permasalahan filosofis, praktek keagamaan Wahhabisme, evolusinya, sehubungan dengan aliran-aliran dalam Islam memiliki karakter yang rumit dan membutuhkan penelitian khusus. Dalam buku ini, saya sangat ingin membahas potensi politik gerakan ini. Sepanjang perjalanan sejarahnya, Wahhabisme menjalankan fungsinya sebagai tendensi kuat yang mempersatukan dasar-dasar ideologi di Arab. Meskipun pembentukan pemerintahan Saudi baru terlaksana pada tahun 20-30-an abad ke-XX, setidaknya saat ini dinasti yang berkuasa berniat menggunakan potensi integrasi gerakan ini secara maksimal. Selama dua abad kerjasama dinasti kerajaan dengan ulama telah menghasilkan mekanisme *support* yang halus dan flexible dari kedua belah pihak. Dinasti yang berkuasa mengizinkan alim ulama ikut campur dalam urusan pemerintahan, sedangkan para ulama memberikan jaminan berupa loyalitas rakyat dan pengesahan secara syariah berbagai kebijakan pemerintah. Semua perubahan yang terjadi di Saudi Arabia selama abad ke-XX, dimulai sejak tahun 1930-an, baru dapat berjalan setelah disetujui oleh alim ulama. Setiap minggu alim ulama bertemu dengan raja. Selain itu terdapat juga jalur-jalur informal yang menghubungkan alim ulama dengan keluarga kerajaan. Sebenarnya semua praktek ini berakar pada tradisi lama suku Arab-Badui, dimana para kepala suku secara teratur membicarakan berbagai macam masalah dengan sejumlah pemuka suku. Walaupun sedikit sekali yang

dapat diketahui dari perbincangan mingguan raja dengan alim ulama, setidaknya dapat diperkirakan bahwa permasalahan-permasalahan politik dalam dan luar negeri termasuk di dalam pembahasan mereka.

Para ahli memperhatikan, bahwa pada tahun-tahun terakhir abad ke-XX pengaruh alim ulama sedikit berkurang. Setelah *"oil booming"*, di kerajaan ini bermunculan perindustrian modern, bentuk-bentuk baru aktifitas ekonomi dan administrasi, perkembangan pesat pendidikan, serta banyak dari penduduk Saudi Arabia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, puluhan ribu generasi muda yang memperoleh pendidikan di pusat-pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan Barat. Semua ini mau tidak mau telah mengguncang otoritas alim ulama Saudi. Bersamaan dengan itu, rezim pemerintahan juga berusaha melemahkan tekanan alim ulama, yang selalu menentang kebijakan-kebijakan baru. Misalnya, pada tahun 1965, di kerajaan ini dimulai penyiaran televisi, yang sangat ditentang oleh alim ulama dengan mengadakan demonstrasi dan bahkan berusaha menggempur pusat penyiaran TV. Polisi mulai melepaskan tembakan, namun diantara demonstran yang tewas, terdapat keponakan Raja Faisal, yang bernama Khalid Musa. Tak berapa lama kemudian, Raja Faisal tewas ditembak oleh saudara kandung Khalid Musa, Faisal Musa. Secara resmi pemerintah menyatakan bahwa raja dibunuh oleh aktivis agama yang fanatik yang ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya.[48]

Pada tahun 1960-an, para pendukung moral agama terpaksa menyetujui penjualan rokok, pemutaran musik, cineplex pribadi, penyebaran surat kabar dan majalah yang memuat ilustrasi, perempuan yang berprofesi sebagai penyiar radio. Namun lebih dari itu mereka tidak mengizinkan. Mereka menuntut pelarangan pembukaan bioskop-bioskop umum, pengedaran gambar-

48 Bright, A. *The Saudi Religious elite (ulama) as participant in the political system of the kingdom*. – *"International Journal of the Middle East Studies"*, 1985, vol.77, no.1, p.41.

gambar atau figur berbentuk manusia, dan juga barang-barang yang bentuk dan bungkusannya yang mirip dengan salib.[49] Alim ulama terus melanjutkan perannya sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh, yang mau tidak mau, rezim yang berkuasa harus memperhitungkannya, walaupun begitu penguasa berusaha tidak membuka kesempatan bagi golongan ini untuk mengontrol pemerintahan dari segala sisi kehidupan negara dan masyarakat.

Raja Faisal termasuk aktif membatasi pengaruh ulama di kerajaannya. Dengan pengalaman selama bertahun-tahun dalam urusan pemerintahan, setelah menduduki tahta kerajaan pada tahun 1964, Raja Faisal mulai secara perlahan menyingkirkan para ulama dari posisi kunci pemerintahan. Terlihat sekali saat ia mulai mengontrol sistem peradilan. Seperti yang telah diketahui, periode pasca Perang Dunia II, setelah tahun 1945, tidak satu pun post penting dalam pemerintahan yang tidak diduduki oleh alim ulama, baik itu post perdana menteri, menteri luar negeri, menteri ekonomi nasional, menteri pertahanan, menteri kesehatan, menteri pertambangan dan lain sebagainya. Dari waktu ke waktu alim ulama menguasai post kementerian pendidikan dan hukum. Permasalahan pengadilan sebenarnya dipegang oleh Mufti Agung, yang biasanya dipegang oleh keturunan al-Wahhab–keluarga syeikh yang sangat berpengaruh. Saat syeikh agung wafat pada tahun 1969, Raja Faisal tidak menunjuk penggantinya. Selanjutnya salah seorang dari anggota keluarga tersebut, Syeikh Ibrahim Muhammad ditunjuk sebagai menteri kehakiman. Secara *de facto,* ia merupakan tokoh utama dalam sistem peradilan dan hukum negara. Sedangkan jabatan Mufti Agung dihapus.

Dengan kata lain, dari satu sisi, Raja Faisal telah mengembalikan ke tangan ulama kontrol terhadap sistem peradilan dan dengan ini ia berhasil memperkuat posisinya di kalangan alim ulama.

49 Vasilyev, A.M. *Sejarah Saudi Arabia (Istoriya Saudovskoy Aravii) (1745-1973).* M. 1986. hlm.505.

Dari sisi lain, berbeda dengan Mufti Agung, menteri kehakiman sebenarnya bertanggungjawab langsung kepada perdana menteri dan raja. Keputusan ini bermakna, bahwa sejak saat itu semua peradilan syariat di kerajaan ini merupakan objek kekuasaan politik pemerintah. Pembaharuan ini mengandung arti, bahwa secara de facto, rezim penguasa mengakui basis kekuatan politik kaum ulama–kontrol terhadap sistem peradilan. Walaupun reformasi ini memiliki karakter yang terbatas, setidaknya perubahan status peradilan yang telah terjadi, menunjukkan tendensi keruntuhan peran politik ulama secara perlahan. Perlu diperhatikan, bahwa mantan penguasa Saudi Arabia ini berusaha memperkecil peran politik ulama, termasuk menekan pengaruh Klan Syeikh. Demikianlah, pada tahun 1971, Raja Faisal membentuk Dewan Ulama Tinggi. Dari 17 anggota dewan ini, hanya satu orang yang berasal dari keluarga Syeikh, yaitu Ibrahim Muhammad. Raja Faisal berusaha menekan peranan Klan yang sangat berpengaruh ini dengan mengangkat otoritas kelompok ulama yang lain.

Upaya rezim kerajaan untuk membatasi peranan ulama dalam kehidupan masyarakat Saudi mau tidak mau telah menimbulkan protes dari kalangan ulama. Saat Raja Fahd naik tahta, alim ulama menjadi waspada. Raja ini menyatakan akan mengadakan politik modernisasi di kerajaan. Selanjutnya alim ulama menjadi saksi pembangunan sederetan pusat pendidikan modern dan berkembangnya fungsi kementerian kehakiman, yang semakin nyata berusaha mengambil alih peradilan syariat. Politik seperti ini akhirnya berhadapan dengan ketidakpuasan masyarakat Saudi konservatif, dan tidak tercegah lagi, hal ini langsung dimanfaatkan oleh para pemimpin ulama.

Sehubungan dengan ini, sejumlah peneliti Barat menyampaikan pendapat-pendapat yang cukup menarik, termasuk juga tentang peristiwa pendudukan Masjidil Haram di

Mekah di bulan November 1979. Seandainya peristiwa ini tidak diprovokasi oleh para ulama yang berpengaruh, setidaknya mereka memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Staf peneliti Universitas Yerusalem J.A. Kochichan memperhatikan, bahwa ketidakpuasan alim ulama terhadap politik modernisasi Raja Fahd dapat mengakibatkan pembenaran terhadap aktivitas kekerasan, yang diserukan oleh kelompok pendukung anti modernisasi.50 Menurut Kochichan, jika ulama tidak mengetahui rencana pendudukan ini, setidaknya mereka sudah mengerti bahwa sikap ekstrimis sudah tumbuh pesat di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Sangat banyak mahasiswa perguruan tinggi teologi Mekah dan Madinah di antara para tawanan tahun 1979–awal 1980. Apalagi setahun sebelum peristiwa ini, yaitu pada tahun 1978, Utaibah, sang pemimpin kelompok yang menduduki Masjid al Haram, dan sejumlah pengikutnya tidak hanya sekali ditangkap polisi sebagai akibat dari aksi-aksi mereka yang anti pemerintah. Di antara yang cukup sibuk untuk membebaskan mereka adalah tokoh-tokoh ulama penting, misalnya Syeikh al-Baz yang menjabat ketua Dewan Tinggi Agama, Syeikh Lakhidan, dan lain-lain. Sangat menarik, bahwa dalam fatwa, disebutkan masalah perampokan, bukan tentang penyimpangan agama. Syeikh al-Baz dalam mengadili pelaku pendudukan mesjid, dalam konteks tertentu berusaha membenarkan aksi mereka.51

Seperti yang sudah diketahui, pendudukan Masjidil al Haram pada bulan November 1979, yang berarti mendekati awal abad ke-XV tahun Hijriah, merupakan pukulan keras dan memalukan bagi harga diri rezim raja Saudi Arabia. Perayaan agung umat muslim tercoreng oleh peristiwa ini. Pemerintah kerajaan terpaksa mengerahkan pasukan bersenjata untuk menghadapi aksi ini, yang tentu saja menimbulkan kesan yang

50 Kochichan, J.A, *"The Role of Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case in Saudi Arabia"*. "International Journal of the Middle East Studies", 1986, vol.18, no.1, p.60.

51 *Ibid.*

sangat tidak simpatik bagi umat Islam. Tidak diragukan lagi Raja dan pembantunya menilai peristiwa ini sebagai peringatan pihak konservatif, bahwa kelompok agama tidak bersimpati dengan proses modernisasi yang berlangsung di negara mereka. Kemungkinan, bukan suatu kebetulan jika saudara kandung raja dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Mekah. Dan begitu juga dengan kepala dinas keamanan, yang digantikan oleh Jenderal Rahman al Syeikh. Pergantian jabatan ini merupakan pertanda bahwa kekuasaan alim ulama menguat lagi. Penunjukan jenderal dari keluarga ulama terkenal dinilai sebagai upaya pemerintah Saudi Arabia kembali mempererat tali ikatan yang menyatukan anggota kerajaan dengan keturunan al Wahhab.

Setelah peristiwa ini, koalisi keluarga Saud dengan Klan Syeikh mendapat perkembangan baru. Mungkin Raja Fahd dan pendukungnya sudah menyadari, bahwa tidak ada jaminan pasti terhadap keloyalan alim ulama saat terjadi krisis politik yang serius di dalam negara. Urusan utama ulama adalah memperkuat posisi Islam. Dapat dipastikan mereka siap bekerjasama dengan siapa saja yang berkuasa demi keberhasilan rezim pemerintahan wahhabisme dan kesejahteraan pribadi. Dinasti kerajaan merasakan bahwa pemangkasan peranan politik alim ulama dapat melahirkan anggapan umum dalam masyarakat Saudi, bahwa faktor agama dalam sistem pemerintahan semakin berkurang. Anggapan ini dapat memprovokasi gerakan pembaharuan Islam di kerajaan ini, yang serupa dengan gerakan yang terjadi di negara-negaraTimur Jauh dan Timur Tengah.

Pemerintah kerajaan berusaha sekuat tenaga untuk meminimalisir kerugian dari situasi ini. Sehubungan dengan ini, para ahli banyak memberikan perhatian khusus pada kemampuan keluarga Saud menyelesaikan krisis ini. Kelenturan dinasti penguasa kerajaan ini mampu dengan cepat mengatasi perubahan yang terjadi. Surat kabar Amerika Serikat membandingkan kemampuan pemerintah Saudi dengan perusahaan-perusahaan

Barat yang setiap menit sangat flexibel menghadapi perubahan pasar.52 Pada saat ini, Dinasti Saudi, yang terdiri dari lebih kurang 500 pangeran dari garis darah langsung beserta istri-istri dan anak-anak perempuannya, ditambah dengan anggota-anggota keluarga dari garis tidak langsung, terhitung lebih kurang sebanyak 20.000 orang. Tentunya mereka semua sangat memperhatikan kelansungan hidup kerajaan dan dinasti mereka.

Keluarga kerajaan sering mengejutkan orang-orang yang skeptis dengan kemampuan mereka dalam mengatasi krisis, dan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang sensitif, yang disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan nasional dan meningkatnya standar pendidikan. Situasi yang terjadi di Saudi Arabia pada akhir abad ke-XX bukan tidak ada penyebabnya. Selama dua dasawarsa terakhir negara ini mengalami modernisasi yang cepat, yang tidak bisa dibandingkan dengan proses yang terjadi pada tahun 1960-1970-an abad ke-XX. Masyarakat Saudi semakin aktif dan berpendidikan. Oleh sebab itu dinasti terpaksa bertindak dalam kondisi yang rumit, karena pemerintahan negara-negara Teluk berhadapan dengan panggilan Iran dan perubahan-perubahan politik regional yang dihasilkan oleh perang Irak-Kuweit pada tahun 1991.

Selain itu, hubungan Saudi Arabia dengan negara-negara Arab lain memiliki sejumlah karakter utama. Para ahli memperhatikan, bahwa bangsa Arab tidak senang dikuasai oleh keluarga Saudi. Para pemimpin Syria, Mesir, Lebanon yang sudah di-westernisasi, dengan wawasan mereka yang sekuler, tidak mendukung kepemimpinan Saudi Arabia di dunia Arab, walaupun banyak negara-negara Arab yang tergantung pada bantuan finansial dan ekonomi Saudi. Walaupun banyak anggota keluarga Saudi yang mendapat pendidikan di Barat, namun mereka tetap

52 "International Herald Tribune", 15.07.1982.

dianggap sebagai Badui kaya, yang memuja pakaian tradisional padang pasir. Hubungan serupa juga muncul di kalangan aktivis Yordania, banyak orang Arab yang menganggap para politisi mereka hanya memiliki tingkat pemikiran semi Badui.53

Anggapan terhadap keluarga Saudi yang beraneka ragam di dunia Arab timbul tidak hanya pada saat ini. Hal ini lebih berdasarkan pada perasaan *prejudice* yang sudah terjadi selama berabad-abad serta penerimaan antara penduduk padang pasir dan perkotaan. Fenomena sosial-psikologis seperti ini tidak hanya dapat ditemui di Timur Tengah. Namun di kawasan ini, faktor tersebut terus mempengaruhi aktivitas politik. Dalam batas bagaimana keluarga Saudi akan memaksakan perannya sebagai pemimpin, maka akan semakin rumit bagi mereka mengatasi perlawanan sosiokultur seperti ini.

Namun, sebagai kehormatan bagi keluarga Saudi, perlu diperhatikan, bahwa mereka sangat menyadari hambatan ini, sehingga mereka berusaha untuk tidak memperlihatkan ambisi sebagai pemimpin dunia Arab. Walaupun memiliki kekayaan minyak dan finansial, Saudi Arabia bukanlah sebuah negara yang kuat. Dari aspek militer dan demografi, kerajaan ini tidak bisa dibandingkan dengan Mesir, Irak, Syria, atau Aljazair. Dalam bidang pekerja yang memiliki kualifikasi baik, Yordania memiliki kelebihan dalam hal ini dibandingkan dengan Saudi Arabia. Orang-orang Lebanon, Mesir, Palestina memiliki intelektual, budaya, dan politik lebih tinggi dalam kehidupan wilayah Arab. Semua ini telah membangkitkan rakyat Saudi untuk mencari gaya dan metode sendiri dalam berpolitik. Untuk mendapatkan posisi sebagai leader, Saudi Arabia sering tampil sebagai penengah dalam konflik-konflik di kawasan Arab. Mereka berusaha menjalankan tugasnya sebagai penengah dalam permasalahan yang berhubungan dengan pencapaian konsensus antara negara-

53 Jansen, Godfrey. *"Can arabs go forward from Jez?"* International Journal of the Middle East Studies, L.,21.12.1982, no.165.

negara Arab yang bertengkar. Dari sudut pandang ini, Saudi berhasil menemukan persamaan pandangan dengan sebahagian besar rezim di kawasan Arab.

Menyadari ketidakmampuannya menjadi pemimpin dunia Arab, Saudi Arabia tampil sebagai penghalang kepentingan negara-negara Arab lain, yang menunjukkan niatnya untuk berperan sebagai pemimpin. Saudi berusaha mendukung keseimbangan tertentu di wilayah ini. Selama puluhan tahun, di Arab Timur aliansi bermunculan dan berjatuhan. Saudi pada prinsipnya berusaha mempertahankan sikap netral. Pada saat-saat tertentu, Saudi berusaha memperkuat pengaruhnya dalam memerangi aliran radikal di dunia Arab, namun dalam hal ini mereka tetap menjaga sikap netralnya dan tidak ikut campur dalam konflik dalam negeri negara lain. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ahli ketimuran dari Amerika Serikat, W.B. Quandt, "*prudent* (penuh pertimbangan) dan hati-hati, serta menghindari tindakan sembarangan dan advanturism merupakan prinsip dasar pendekatan Saudi Arabia terhadap semua permasalahan".[54] Saudi menghindari pertengkaran dan konflik dengan negara-negara kuat di Arabia, dan berusaha menjaga hubungan netral dengan kelompok radikal dan konservatif, liberal atau monarkhis. Mereka mengerahkan upaya yang tidak sedikit demi mempererat hubungan dengan Kairo, Damaskus, dan Tripoli. Namun tidak selalu usaha ini berhasil. Tapi setidaknya, Riyadh berusaha menjaga hubungan yang baik dengan salah satu ibukota tersebut. Selama bertahun-tahun, Saudi berusaha menjalin hubungan baik dengan kelompok pejuang Palestina. Dengan diplomasi seperti ini, Saudi Arabia mengharapkan agar ancaman yang berasal dari rezim Arab radikal dapat diminimalisir, serta serangan provokatif terhadap kerajaan ini dapat ditahan.

54 Quandt, W.B. *Saudi Arabia in the 1980-s. Foreign Policy, Security ind Oil*. Washington, 1981, pp.15-16.

Salah satu sisi terkuat Saudi Arabia adalah mencuatkan tema-tema keislaman. Sejak baru berdiri, kerajaan ini langsung secara aktif mengerahkan bantuan bagi masyarakat muslim internasional. Termasuk pada tahun 1926 di Mekah diadakan kongres pertama umat Islam, yang sebagian keputusannya menjadi faktor penguat status quo negara yang baru saja berdiri ini, baik di kalangan negara-negara muslim, maupun internasional. Selanjutnya, pendiri Saudi Arabia, ibn Saud Faisal secara intensif menformulasi ajaran Islam sebagai salah satu dasar politik luar negeri negara ini. Secara aktif Saudi Arabia menggunakan propaganda agama dalam menghadapi Gamal A. Nasher. Misalnya, pada musim haji tahun 1962, pemerintah Saudi secara demonstratif menolak *kiswah* dari Mesir. Kiswah merupakan penutup Ka'bah yang berada di tengah Masjid al-Haram. Sebelumnya, selama bertahun-tahun, kiswah yang berhiaskan bordiran emas ayat-ayat al-Quran, pada setiap awal musim haji selalu didatangkan dari Kairo. Tindakan yang demonstratif ini tidak diragukan lagi telah menunjukkan, bahwa dalam usahanya melawan ide-ide Nasher yang radikal, Saudi tidak segan menggunakan ideologi Islam. Pada musim haji, Saudi mengadakan konferensi internasional, yang menghasilkan pembentukan Liga Islam, yang menyatakan perang terhadap ideologi sosialisme dan ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Saudi berusaha melikuidasi , atau setidaknya menetralisasi kekuatan yang berada di sekeliling Nasher. Hal yang membuat kekhawatiran ini adalah dukungan yang diberikan oleh Universitas al Azhar kepada kebijakan politik Presiden Mesir ini. Pada pertengahan pertama tahun 1960-an, kelompok al Azhar yang terdiri dari sebagian alim ulama dan tokoh-tokoh agama bersatu melawan imperialisme, dan ikut serta dalam menentukan doktrin resmi negara "sosialisme Arab". Dengan tujuan melawan ideologi tersebut, Liga Islam menggalakkan ide pembentukan

Pakta Islam Internasional yang dipimpin oleh Saudi Arabia.[55]

Pada bulan Desember 1965, Raja Faisal dan Shah Pahlevi berinisiatif mengadakan pertemuan negara-negara muslim. Sebulan kemudian di Yordania, Raja Faisal mengumumkan, bahwa para penentang pembentukan Pakta Islam merupakan musuh Islam.56 Jelas sekali, bahwa pemerintah Saudi Arabia sering menggunakan Islam untuk membentuk blok oposisi internasional demi menghancurkan Nasherisme di dunia Arab dan internasional. Saudi sangat mengkhawatirkan keberlangsungan sistem pemerintahan monarkhi yang mereka anut. Mereka menganggap, bahwa ide Nasher yang sangat revolusioner dapat menghancurkan rezim monarkhi Arab. Kekhawatiran ini semakin diperkuat dengan aktivitas Mesir dalam membantu gerakan-gerakan antimonarkhi di Jazirah Arab, terutama di Yaman, Oman, dan Dafar. Untuk menentang ideologi yang kuat ini diperlukan ideologi alternatif. Islam menjadi pilihan utama. Sebetulnya, hakikat dari politik antinasherisme ini tidak disebutkan, malah disembunyikan dalam penjelasan-penjelasan umum yang berisikan manfaat dan kebaikan Islam bagi kemajuan bangsa Arab. Seperti yang diungkapkan oleh penasehat politik Raja Faisal, Syeikh Kamal Adham, bahwa Raja Faisal sudah dari awal menyadari dan yakin akan kemampuan politik Islam. "Dengan bantuan Islam, Raja Faisal bermaksud menyatukan bangsa Arab dan mengembalikan martabat dan kekuatan mereka. Raja Faisal mengorganisir gerakan pembaharuan Islam bukan sebagai ideologi alternatif Internasionalisme Arab, melainkan sebagai shelter yang menyatukan semua bangsa Arab sebagai satu keluarga".[57]

55 Sharipova, R.M. *Liga Islam. Pan Islamisme Dewasa ini.(Liga islamskogo mira. Panislamizm segodnya)*. M. 1986, hlm. 16-17.

56 The Times, L.,23.01.1966; 1.02.1966.

57 Piscatory, J.R. *"The Formation of the Saudi Identity: a case study of the Utility of Transnationalism"*. –Ethnic Identities in a Transnational World. Ed.by Stack J.F., Westport, L., 1981, p.125.

Tidak diragukan lagi, bahwa Raja Faisal sebenarnya memimpikan persatuan bangsa Arab dalam satu keluarga. Namun dalam keluarga tersebut semua harus hidup tidak hanya menurut hukum Islam, tapi juga harus menurut sudut pandang pemahaman Saudi tentang Islam dan bentuk pemerintahan yang mereka idealkan. Tentu saja prinsip-prinsip ini harus berdasarkan pada warisan monarkhi supaya tidak ada seorang pun yang berpikir untuk menggoyang sistem ini dan menggantinya dengan sistem pemerintahan lain, walaupun jika mereka juga akan menamakannya dengan sistem Islam.

Tinjauan peristiwa bersejarah tahun 1960-70-an ini membuat kita memahami maksud kepentingan Saudi yang berperan sebagai pembela kepentingan umat Islam, seperti yang juga ia lakukan pada saat ini. Selama 20 tahun terakhir dengan bantuan Saudi Arabia, telah didirikan puluhan yayasan, gerakan, dan organisasi Islam. Kerajaan ini mendanai pembangunan puluhan pusat ilmu pengetahuan dan budaya di berbagai negara, pendirian ratusan mesjid di seluruh benua. Sangat sering Saudi Arabia memanfaatkan fasilitas yang mereka danai sebagai jalur resmi proses kebangkitan Islam. Apalagi, pemerintah Saudi Arabia beranggapan, bahwa mereka memiliki hak untuk ikut campur dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum agama, tidak hanya di negara-negara muslim, tapi juga di seluruh dunia. Saudi sangat jarang tampil dengan inisiatif yang mengejutkan, karena mereka lebih memilih untuk bertindak diam-diam, tanpa gembar-gembor berita, dengan bertumpu pada kekuatan uang. Dengan mengenalkan jabatan-jabatan baru, seperti Sekretaris Liga Islam, Sekjen OKI, *chairman* Universitas Islam Internasional, Imam Masjid Agung, dll. , yang sebelumnya tidak pernah ada dalam dunia Islam, Saudi menciptakan lapisan besar tokoh-tokoh muslim, yang merasa berhutang budi kepada kerajaan ini. Tentu saja, semua tokoh ini berusaha semaksimal mungkin mengangkat pamor dan otoritas induk semangnya di lingkup dunia Islam.

Dengan bermodalkan bantuan dan suntikan devisa petro-dollar, Saudi berusaha mempengaruhi semua organisasi Islam di seluruh penjuru dunia, yang mengakibatkan ditetapkannya azas Islam tradisional yang keras sebagai landasan utama sebahagian besar organisasi tersebut. Puritanisme Islam Wahhabi dapat dijumpai di sebahagian besar penganut Islam di Asia-Afrika Selain itu rezim pemerintahan Saudi Arabia juga memberikan bantuan materi kepada masyarakat muslim. Sebagai imbalannya, masyarakat muslim ini secara terbuka menyatakan pengakuannya kepada Saudi dan sama sekali tidak membenarkan penyampaian kritik-kritik terhadap realita kehidupan di Saudi Arabia.

Sehubungan dengan ini, saya teringat bagaimana kerasnya reaksi mahasiswa muslim di Katmandhu, ibukota Nepal, terhadap pendapat yang saya sampaikan dalam suatu kuliah mengenai himbauan pemuka ulama Saudi Arabia yang konservatif, Abd al Aziz bin Baz, yang menyatakan bahwa semua umat Islam harus menyangkal teori per edaran bumi mengitari matahari (heliosentris), karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Demikianlah, selanjutnya bagian yang memuat pembahasan teori ini dari textbook Astronomi di hilangkan. Namun para mahasiswa muslim Nepal ini tetap tidak setuju dengan penilaian terhadap karakteristik Syeikh Baz sebagai tokoh yang konservatif. Hal ini dapat dijelaskan, bahwa mungkin sikap ini berkaitan dengan bantuan finansial dari Saudi Arabia yang diberikan kepada mereka, dan juga kegiatan-kegiatan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu, para mahasiswa ini merasa wajib mempertahankan kehormatan Saudi Arabia. Sebenarnya saya tidak ingin berpikir seperti ini. Dari pengamatan saya, alasan sebenarnya adalah, para mahasiswa ini cenderung menganggap bahwa bentuk kehidupan di Saudi Arabia adalah idealisasi yang hampir mendekati kebenaran Islam sejati. Apalagi, saat seorang lektor dari negara atheis Uni Sovyet memberikan *review* tentang seorang ulama Saudi, tentu saja timbul keinginan spontan untuk

menentang karakteristik yang saya berikan. Setelah bertemu dengan berbagai orang muslim di negara-negara Timur lainnya (India, Malaysia, Sri Langka, dll.), saya sering menyaksikan betapa tingginya penghargaan dan penilaian yang diberikan oleh umat Islam kepada tokoh-tokoh ulama dan pemerintah Saudi Arabia. Orang-orang ini sedikit sekali mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang maksud dan tujuan dari pemerintah Saudi Arabia. Mereka selalu dikelilingi oleh permasalahan kebutuhan hidup, kemiskinan, tidak memiliki hak, buta huruf dan tidak berpendidikan. Namun, mereka mengetahui bahwa untuk pembangunan masjid dan madrasah, uang dikirimkan oleh suatu organisasi Islam dari Saudi Arabia, yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan. Mereka mendengar dalam pertemuan atau melalui radio, bahwa perhatian utama kebijakan politik luar negeri Saudi Arabia adalah perjuangan menegakkan Islam yang murni, menolong umat Islam, dan menerapkannya dalam praktek kehidupan sehari-harinya di perkotaan dan pedesaan. Beginilah kenyataan sebenarnya.

Reaksi rakyat biasa, penilaian dan cara pandang mereka tidak selalu sesuai dengan posisi pemerintah dan negara yang sosialis. Namun dapat dibayangkan, bahwa pendapat umum perlu diperhitungkan dalam menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh agama, emosional, dan sosio-psikologi dari berbagai pusat dunia Islam. Saudi Arabia yang menaruh kepentingan di dunia Islam, dinilai oleh umat Islam sebagai negara yang dengan ikhlas berjuang demi kepentingan Islam dan umatnya.

Namun Saudi Arabia perlu mendukung dan memperkuat otoritasnya dengan berbagai cara. Untuk itu, Saudi mengerahkan dana yang besar sekali untuk membantu perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan di negara-negara muslim, menciptakan pusat-pusat kajian khusus program dan metode

pengajaran, mengadakan seleksi para profesor dan pengajar. Dinas khusus Saudi Arabia dengan seksama mengikuti publikasi-publikasi dan kehidupan masyarakat sebagian besar negara-negara muslim, dan dari waktu ke waktu siap memberikan ganjaran kepada pihak yang menurut mereka telah menyimpang dari puritanisme Islam.

Berkeinginan untuk menguasai kepemimpinan di dunia Islam, Saudi memperhitungkan bahwa sedikit sekali masalah dalam mempersatukan umat Islam. Jika persatuan tidak terwujud, maka tidak akan ada pemikiran khusus untuk memperjuangkan kepemimpinan tersebut. Saudi dalam kebijakan politiknya sangat realistis. Oleh karena itu, diperlukan untuk menciptakan suatu *problem center* yang dapat menggulirkan terbentuknya kerjasama di bidang sosial, politik, ekonomi, dan ideologi. Untuk itu, Saudi mengangkat masalah pembebasan Yerusalem Timur dari pendudukan Israel sebagai faktor penyatu dunia Islam. Hal ini memiliki dasar yang sangat kuat. Politik Israel yang ekspansionis di Arab Timur sangat ditentang oleh seluruh umat Islam, yang menganggap masalah ini sebagai perjuangan bersama demi membela Islam. Pendudukan Yerusalem Timur oleh Israel merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan pusat civilisasi Islam. Pembakaran Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga umat Islam, pada Agustus 1969, telah menimbulkan kemarahan umat Islam. Di tengah gejolak amarah ini, Saudi Arabia berhasil mengadakan pertemuan tingkat tinggi negara-negara muslim, yang menyepakati pembentukan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Dalam daftar panjang tujuan organisasi, di tempat pertama tertulis perjuangan bersama demi pembebasan tempat-tempat suci Islam dan mengontrol kembali Yerusalem Timur.

Tentu saja tidak benar jika menyatakan bahwa OKI hanya memperjuangkan apa yang diinginkan Saudi Arabia. Namun setelah pembentukan OKI, Saudi mendapatkan kesempatan untuk

memperkuat otoritasnya di dunia Islam di tingkat hubungan antar negara. Setelah pendirian OKI, Saudi secara aktif memanfaatkan permasalahan pembebasan Yerusalem demi kepentingannya. Saudi berusaha memberikan makna yang lebih luas terhadap usaha mereka menjadi pemimpin umat Islam. Dalam kondisi yang sulit, Saudi mampu dengan mudah membebaskan diri dari kepentingan internasionalnya. Dengan mengangkat citra Islam, pemerintah Saudi tampil seolah-olah sebagai otoritas masyarakat muslim internasional. Hal ini dapat terlihat dalam permasalahan Pilipina Selatan tahun 1970-an dan konflik di Afganistan tahun 1980-1990-an.

2. Tendensi Iran: Menjadi Pemimpin Umat Islam

Pada tahun 1980-an abad lalu, Saudi Arabia menghimbau dunia Islam untuk mengasingkan Iran dari kancah politik. Berakar pada sejarah yang sudah terjalin selama berabad-abad, persaingan Arab-Persia mendapat warna baru menjelang berakhirnya abad ke-XX yang pada akhirnya menjadi faktor yang dapat mengancam persatuan umat Islam. Seperti yang sudah diketahui, pada tahun 1980-an, perang Irak-Iran yang berlangsung dan menumpahkan darah selama bertahun-tahun telah menjadikan simpati dunia Arab terpecah. Beberapa negara Arab, seperti Syria, Libya mendukung Iran, sedangkan yang lain mendukung Irak.

Perang di zona Teluk Persia, politik "ekspor revolusi Islam" yang diumumkan oleh Imam Khomeini, mengakibatkan negara-negara Arab menjadi gelisah, termasuk pemerintahan Saudi Arabia. Sebelumnya, saat Shah Iran masih berkuasa, Saudi beberapa kali merasa terancam melihat perkembangan angkatan bersenjata di Iran dan ambisi politik Shah. Pemerintahan Saudi Arabia sangat mengkhawatirkan pertahanan kerajaannya, mengingat peningkatan persaingan militer dapat mengundang

campur tangan negara-negara adi kuasa, Uni Soviet dan Amerika Serikat, ke dalam masalah regional ini.

Runtuhnya kekuasaan Shah dan berdirinya Republik Islam Iran pada tahun 1979, tidak dapat melunakkan kecurigaan Saudi Arabia terhadap negara ini, sebaliknya malah kecurigaan itu menjadi semakin meningkat. Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, yang telah memimpin perjuangan melawan rezim monarkhi, menyatakan bahwa Islam dan prinsip monarkhi tidak sejalan. Dalam tulisannya yang terkenal, "Pemerintahan Islam", yang diterjemahkan pada akhir tahun 1978 oleh bagian penerbitan CRU ke dalam bahasa Inggris, Khomeini menekankan, bahwa "ajaran Islam tidak mengakui sistem monarkhi dan prinsip warisan kekuasaan, karena tidak ada tempatnya dalam Islam".58 Selanjutnya, setelah kemenangan revolusi Iran, Khomeini mulai berbicara atas nama umat Islam. Minoritas Syi'ah di Saudi Arabia, seperti juga di kesultanan dan keemiratan Teluk, tanpa ragu-ragu lagi memperlihatkan sikapnya terhadap himbauan Khomeini. Apalagi, pada bulan November 1979, kemudian pada Februari 1980, terjadi kerusuhan di antara penganut Syi'ah yang berdiam di propinsi Timur Saudi Arabia. Sejak tahun 1980-an, pemerintah Iran mulai menyiarkan siaran propaganda reguler terhadap Saudi Arabia dalam bahasa Arab atas nama Organisasi Revolusi Jazirah Arab. Sebagai jawabannya, Saudi meningkatkan propaganda agamanya, dengan menekankan, bahwa Kerajaan Saudi Arabia berdiri dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh pemerintahan Saudi mulai terang-terangan menyangkal dengan membandingkan sistem monarkhi Riyadh dengan rezim Shah di Iran. Secara perlahan, serangan mulai mereda, namun sampai saat ini, secara menyeluruh masih belum berhenti. Dari waktu ke waktu bergejolak gelombang ketidak senangan dan ketidak percayaan satu sama lain. Pada tahun 1987, terjadi peristiwa

58 Imam Khomeini, *"Islam and Revolution. Writings and Declarations"*. Translation by Hamid Aldar. Berkeley, 1981, p.30.

tragis di Mekah di tengah pelaksanaan haji. Jamaah haji Iran yang mengusung propaganda politik, berusaha memprovokasi kekacauan. Polisi Saudi melepaskan tembakan yang menewaskan dan melukai puluhan jamaah Iran.

Pemerintah Iran memanfaatkan insiden ini sebagai alat propaganda anti-Saudi Arabia di negaranya sendiri dan di arena internasional. Sebenarnya, claim Iran sebagai pemimpin umat Islam perlu diperkuat dengan aksi-aksi nyata. Sejak dulu Iran diakui sebagai pemimpin kaum Syi'ah, yang selalu dicurigai bahkan ditentang oleh golongan Sunni. Misalnya, Universitas Al-Azhar sebagai pusat teologi terdepan golongan Sunni, sampai tahun 1954 menegaskan, bahwa Syi'ah adalah ajaran yang sesat. Hanya belum lama ini alim ulama Mesir pada akhirnya mengakui Syi'ah sebagai aliran resmi dalam Islam.

Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Iran untuk mengklaim kepemimpinannya di dunia Islam. Namun peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 1970-an abad lalu telah merubah situasi. Revolusi di Iran, tampilnya para ulama di pemerintahan, serta proses politisasi gerakan Islam di negara-negara yang baru merdeka, telah menciptakan kondisi yang baik bagi perjuangan Khomeini dan pengikutnya untuk memperkuat otoritasnya di dunia Islam. Tampilnya Khomeini sebagai pemimpin Iran bukanlah suatu kebetulan. Peristiwa ini merupakan hasil perjalanan sejarah Iran sepanjang abad ke-XX. Sebenarnya hal ini merupakan buah dari kerja keras para ulama Syi'ah. Selama tahun 1960-1970-an, masyarakat Iran dihadapkan dengan modernisasi, yang direalisasikan melalui sederetan reformasi yang dipimpin oleh Shah Reza Pahlevi. Rakyat Iran mengalami periode mobilisasi sosial yang intensif, yang sayangnya tidak diiringi dengan meningkatnya kemampuan penguasa dalam mendidik rakyatnya berpolitik. Pada saat itu, Shah memberangus segala hal yang berhubungan dengan organisasi politik massa. Akibatnya, terjadilah krisis partisipasi, saat massa dengan reformasi sosial-

politiknya secara objektif siap berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan politik, namun saat mereka memperlihatkan sedikit upaya memperjuangkan kebebasan individu, maka para tokoh mereka akan disiksa dengan kejam. Meningkatnya gerakan oposisi mencerminkan ketidaksesuaian antara potensi politik yang semakin berkembang dengan tidak adanya kesempatan untuk merealisasikanya. Perjuangan gerakan anti-Shah dalam banyak hal dikategorikan sebagai orientasi politik kekuatan yang berperan sebagai pemimpin dalam gerakan ini.

Tidak diragukan lagi, bahwa agama merupakan salah satu elemen inti revolusi antimonarkhi. Pengamat ahli dalam permasalahan sejarah modern Iran, Hamid Enayat, dengan objektif menilai, bahwa peranan Islam dapat sepenuhnya dilihat dalam dua fase revolusi. Fase pertama, dimulai pada tahun 1977, didominasi oleh kelompok sayap kiri dan intelektual sekuler. Mereka mengeluarkan petisi-petisi dan pidato-pidato, mengadakan "malam-malam seni" dan meminta kepada organisasi-organisasi internasional agar melindungi hak dan kebebasan warga negara.[59] Periode ini bersamaan dengan kampanye administrasi Carter di Amerika Serikat, yang menyuarakan hak azazi manusia.

Namun, pada berikutnya, terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh intelektual dan sayap kiri ini. Penolakan pemerintah Shah memberikan kebebasan, dan karya-karya propaganda alim ulama Syi'ah memberikan landasan bagi kekuatan agama pada fase kedua, yang dimulai pada bulan Januari 1978, setelah berlangsung demo anti Shah di kota suci Kum. Syi'ah berubah menjadi ideologi gerakan anti pemerintah. Penting untuk diperhatikan juga, bahwa pada saat itu, Syi'ah sebagai ajaran agama dan politik sedang mengalami transformasi serius. Hamid Enayat memperhatikan bahwa dalam konteks Revolusi 1979,

59 Enayat, Hamid. "*Revolution in Iran 1979: Religion as Political Idelogy*". Revolutionary Theory and Political Reality Brighton,1983, p. 30.

telah terjadi pengulangan sejarah sebanyak 4 kali di Iran, yaitu: pemberontakan Babid di pertengahan abad ke-XIX, revolusi 1905, yang menghasilkan transformasi Iran sebagai negara konstitusi, gerakan nasionalisasi oil dan industrinya, dan demontrasi anti pemerintah yang gagal pada tahun 1963, pada saat itu sudah dipimpin oleh Ayatullah Khomeini.

Walaupun masing-masing peristiwa ini memiliki perbedaan, namun terdapat beberapa persamaan yang mendasar. *Pertama,* peristiwa ini mewakili kolaborasi tiga kekuatan sosial dan politik di Iran, yaitu: ulama, golongan borjuis kecil dan menengah, golongan liberal-nasionalis sekuler. *Kedua,* dalam semua peristiwa, gelombang massa yang besar bangkit atas himbauan tokoh-tokoh agama. Pada tahun 1963, Khomeini gagal mengangkat gerakan anti-Shah karena alim ulama tidak bersatu. Dalam revolusi 1979, alim ulama tampil ke depan, karena sudah memiliki pengalaman berjuang, serta taktik dan strategi yang matang. Mereka sudah bertekad untuk berjuang sampai akhir. Setelah menguasai kekuasaan, mereka tidak berpikir untuk berbagi dengan kelompok liberal-nasionalis sekuler. Kegagalan pada tahun 1963 telah menyadarkan mereka, bahwa persatuan kaum teolog sangat penting. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh radikal sayap kanan ulama, Ayatullah Motahari, yang menulis pada tahun 1978, bahwa sejarah gerakan Islam pada abad-abad terakhir memiliki kekurangan yang sangat serius, yaitu mereka berjuang hanya untuk mencapai kemenangan, selanjutnya mereka tidak ingin lebih jauh melangkah, sehingga kekuatan lain dapat memanfaatkan situasi ini.[60]

Diarahkan untuk meraih tujuan politis, usaha mengembangkan dan memperkuat politik, merupakan ciri-ciri dari perjuangan golongan ulama Iran dalam revolusi 1979. Oleh sebab itu, ajaran Khomeini dan para pengikutnya tidak hanya lurus dan

60 *Ibid.*

diakhiri sesuai dengan isinya, namun pada tingkat tinggi sudah dipolitisasi. Dengan tajam, ajaran ini langsung mengenai jantung kehidupan politik umat Islam pada tahun 1980-an. Aktifitas di Iran, perkembangan Syi'ah yang spesifik sepanjang abad ke-XX, telah melahirkan ajaran Khomeini. Ajaran ini telah menjadikan gerakan Islam lebih *purposeful*. Prinsip dasar dalam karya-karya Khomeini yang sangat terkenal, di antaranya sudah disebutkan sebelumnya, "Pemerintahan Islam", terdiri dari 3 situasi utama; pertama, umat Islam wajib mendirikan institusi-institusi politik di negara mereka masing-masing, sedangkan kekuasaan politik harus tunduk pada tujuan, situasi, dan kriteria Islam. Kedua, Kewajiban tokoh-tokoh agama adalah menciptakan pemerintahan Islam dan membentuk institusi-institusi hukum dan pengadilan. Dengan kata lain, alim ulama wajib menggagaskan doktrin pemerintahan Islam dan pelaksanaan hukum. Ketiga, Khomeini mengadakan program aksi untuk mendirikan pemerintahan Islam, dengan berbagai metode reformasi dalam *religious establishment*.

Khomeini berusaha memodifikasi pemikiran politik Syi'ah. Sebelum Khomeini, tidak satu pun tokoh Syi'ah abad ke-XX yang memikirkan perlu atau tidaknya golongan ulama menjadi pemimpin negara. Khomeini mengecam praktek penantian pasif "kembalinya Imam Mahdi" yang merajalela di Iran. Ia mengusulkan agar memperjuangkan pembentukan pemerintahan Islam. Khomeini telah mendemokratisasi Syi'ah, dengan menekankan pentingnya partisipasi massa dalam perjuangan politik. Dan ia sangat menentang elitisme dalam Islam.

Walaupun terjadi kekerasan dalam menjalankan politik islamisasi, dan banyaknya korban yang berjatuhan dalam perang melawan Irak, setidaknya sebagian besar penganut Islam di Iran dan berbagai negara lain menaruh rasa hormat yang tinggi pada figur Khomeini. Mereka menyebutnya sebagai pemimpin

Islam, yang berjuang demi kepentingan nasional dan sosial. Dan walaupun golongan Sunni menyiratkan rasa tidak senang terhadap rencana tokoh-tokoh Syi'ah yang berniat menguasai umat Islam, namun mereka menggunakan ajaran Khomeini yang memiliki pengaruh luas, saat berjuang menghadapi kekuatan politik luar.

Pada saat yang bersamaan, tidaklah patut jika sepenuhnya membenarkan reaksi berbagai penguasa negara-negara muslim. Banyak umat Islam yang menaruh simpati pada pemerintah Syi'ah Iran, namun sebagian besar pemerintah negara-negara muslim tidak menutupi kecurigaan dan sikap bermusuhan mereka terhadap ajaran Khomeini. Hal ini tidaklah mengherankan, karena alasan kekhawatiran ini adalah himbauan Khomeini kepada seluruh umat Islam untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Para pemimpin Iran selalu menyebut pemerintahan negara-negara muslim sebagai rezim boneka, koruptor, yang hanya mengkhianati kepentingan umat Islam. Sepanjang tahun 1980-1990-an, sejumlah perwakilan Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Yordania, Kuweit, Mesir, dan lain-lain, mengeluarkan pernyataan resmi, menandatangani akta-akta khusus, yang bertujuan untuk menekan dan mengecam politik ekspor "Revolusi Iran", yang dikampanyekan olah Iran.

Kecaman dan kritikan yang dialamatkan pada ajaran Khomeini juga dikeluarkan oleh tokoh-tokoh agama golongan Sunni. Namun hal ini tidak berhubungan dengan politik ekspor revolusi, melainkan dengan usaha Khomeini dan para pengikutnya mengidentifikasikan Islam dengan karakter negara dan pemerintahan Iran. Dari sudut pandang ini, mereka menganggap, bahwa bahaya diskreditasi bukanlah hasil pemikiran para pemimpin Iran, tapi merupakan ajaran Islam itu sendiri. Mereka menegaskan, bahwa negara dan pemerintah

datang dan pergi, sedangkan sistem pemerintahan masyarakat mengalami perkembangan dan kejatuhan. Oleh sebab itu janganlah terlalu erat menghubungkan pengertian Islam dengan bentuk pemerintahan yang konkret. Islam itu sendiri abadi, dan tidak dicampuradukan dengan fenomena singkat dari suatu bentuk pemerintahan dan negara.

Selain itu kontur politik negara-negara muslim yang selalu berubah tentunya mempengaruhi naik turunnya pengaruh Khomeini. Walaupun demikian, secara umum ajarannya dan ide Revolusi Iran oleh umat Islam sedunia terus diasosiasikan sebagai tahap baru perkembangan gerakan Islam. Pemimpin gerakan "Amal" di Lebanon, Nabib Berri menyatakan pendapatnya sebagai berikut, "kami memandang Revolusi Iran sebagai revolusi agung dalam sejarah manusia. Revolusi pertama adalah Revolusi Perancis, yang kedua – Revolusi Rusia, dan sekarang Revolusi Islam Iran, yang akarnya merubah banyak hal dan cara pandang terhadap dunia. Inilah revolusi yang membuka jalan menuju Revolusi Muhammad SAW".[61]

Begitu tingginya penilaian terhadap Revolusi Iran oleh tokoh Lebanon. Hal ini dapat dijelaskan dengan peranan Iran dalam kehidupan negara-negara Arab pada akhir abad ke-XX, termasuk di dalamnya dukungan Iran kepada kehidupan masyarakat Syi'ah di Lebanon. Ideologi Syi'ah sudah lama menjadi ideologi protes sosial dalam Islam. Gerakan Syi'ah di Lebanon mencoba merubah simbol dan ritual Syi'ah menjadi alat perjuangan politik modern. Hal ini dapat dilihat dari sosok Imam Musa al-Sadr, yang secara misterius hilang saat mengunjungi Libya pada bulan Agustus 1978. Dalam pemilihan ketua Dewan Tinggi Syi'ah, ia mengatakan; "kami memulai gerakan ini karena iman kepada Allah, dan dengan teguh kami sangat yakin, bahwa orang-orang yang beriman, yang tidak tertarik dengan nasib kaum

61 Rabin, Wright. *"Sacred Rage. The Wrath of Millitant Islam"*. L., 1987, p. 61.

yang tertindas, sebenarnya merupakan orang-orang yang tidak bertuhan dan pendusta".[62] Saat berpidato di tempat yang lain, Ia bersikukuh mengajak semua penduduk selatan Lebanon untuk memperjuangkan haknya, karena, menurut pendapatnya, "siapa yang tidak mempertahankan haknya, ia lebih berdosa daripada orang kafir".[63]

Simbolisme agama telah mendukung *direct transfer needs* dan *demands* perjuangan sosial ke bahasa agama, yang cukup mempengaruhi kesadaran dan wawasan orang-orang yang beriman. Gerakan oposisi Islam Syi'ah di Lebanon menggunakan simbolisme Islam untuk membangkitkan kesadaran kolektif umatnya, yaitu sejarah Syi'ah yang memiliki lembaran-lembaran berdarah. Hampir setiap pengikut Syi'ah menghubungkan kepercayaannya dengan gerakan Syi'ah masa lalu yang cemerlang, dengan sederetan pemberontakan melawan kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Mamlyuk, imperium Utsmaniyah dan Perancis. Penggunaan simbolisme agama dalam mobilisasi massa membutuhkan pemimpin yang kharismatik, seperti Imam al-Sadr dan lain-lain. Dapat juga ditambahkan ke kelompok ini tokoh penggagas ideologi Revolusi Iran, seperti Ayatullah Talegani dan Syari'ati.

Dua pemimpin Iran ini memiliki karakter kiri, ulama Syi'ah yang beraliran demokrat-revolusioner. Mereka berpendapat, bahwa situasi kontemporer negara-negara muslim, hanya Islam yang mampu mengangkat dan menyatukan massa untuk berjuang demi hak sosial dan politik. Sayed Mahmud Telegani dalam perbincangannya dengan Duta Besar Uni Sovyet menyatakan, "seandainya saya hidup pada zaman Marx dan Engels, tentu saja saya akan bangkit berjuang melawan agama, karena pada saat itu agama, termasuk Islam, melayani kepentingan kaum penindas,

62 "Merip Reports"., Chicago, June 1985, no.133, p.14.

63 Fouad, Ajami. "*The Vamished Islam. Musa al-Sadr and the Shia of Lebanon*". Ithaca, N.Y., L., 1987, pp. 148-149.

menolong mereka menindas rakyat, dan sekarang, saat revolusi di Iran menunjukkan dukungan rakyat kepada Islam, tentu saja Islam itu sendiri juga berubah". Islam dibersihkan sampai ke akar-akarnya, sehingga menjadi agama yang yang netral, dan tentunya sudah tidak melayani kepentingan kaum penindas. Talegani sama sekali tidak melihat adanya perbedaan antara Islam dan komunisme. Bahkan tujuan kedua ideologi ini sama, hanya jalan untuk mencapainya berbeda.[64]

Sedangkan Ali Syariati (1933-1977) menafsirkan Islam sebagai "doktrin pertama dalam sejarah pemikiran manusia, yang mengakui massa pekerja sebagai kekuatan dasar sejarah, bukan elit, seperti yang diajarkan oleh Nitsze, bukan golongan aristikrat dan bangsawan, seperti yang ditegaskan oleh Platon, bukan pribadi-pribadi yang tidak terkenal, seperti yang diungkapkan oleh Carmail dan Emerson, bukan orang-orang berdarah biru, bukan juru dakwah, bukan kaum intelektual, melainkan massa itu sendiri".[65] Namun massa dapat memainkan perannya, hanya saat mereka kembali mendapatkan martabat, saat mereka menyadari asal mulanya dan jati dirinya, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ali: "Tuhan–diluar benda, tapi bukan dalam pengertian seperti itu, bahwa Ia asing bagi benda; Ia dalam benda, namun bukan dalam pengertian seperti itu, bahwa Ia seperti benda itu".[66]

Himbauan Ali Syariati yang penuh semangat mengajak berjuang demi keadilan dan persamaan, penolakan terhadap Islam ala istana dan raja, ajakan untuk mencela para kompromis, telah menjadikan dirinya panutan kaum muda. Ceramah-ceramah, buku-buku, dan artikel-artikelnya telah diterjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab, Urdu, Turki, dan bahasa-

64 Vinogradov, V. *"Dari Shah sampai Khomeini (Catatan Duta Besar Uni Sovyet). (Ot shaha do Khomeini (zapiski sovetskogo posla))"*. "Znamya"., M., 1987, no.2, hlm.203.

65 Yadegari M. *"Ideological Revolution in the Muslim World"*. Brentwood, 1983, p.3.

66 *Ibid*. p.4.

bahasa lain, yang populer di seluruh benua. Karya-karyanya dijadikan sebagai buku pegangan bagi kelompok-kelompok muslim radikal di negara-negara berkembang.

Agresifitas ajaran Syariati yang ditujukan untuk perjuangan politik telah mempesona para pengikutnya. Dalam salah satu bukunya, ia menulis, bahwa tidaklah cukup dengan hanya menyerukan untuk kembali ke Islam. "Kita mengharapkan Islam militan, bukan Islam-nya pemimpin spiritual, bukan Islam ala khalifah, melainkan Islam kebebasan dan kebangkitan, Islam keluarga Ali, bukan Islam-nya dinasti Safawi".[67] Syariati mengkritik orang-orang yang percaya, bukan kepada Islam revolusi, melainkan kepada Islam reformasi, seperti yang ia ungkapkan dalam tulisannya, yang membenarkan karya-karya para tokoh skolastik, filsuf, teolog, tokoh-tokoh pemerintahan, dan ahli hukum. "Islam skolastik hanya dimengerti oleh ahli-ahli asing dan aktifis-aktifis reaksioner, Islam revolusi, sebaliknya, dimengerti oleh orang-orang biasa yang tidak berpendidikan".[68]

Pada hakikatnya, otoritas Ali Syariati di kalangan radikal mengungkapkan banyak hal. Dalam ajaran-ajarannya, Syariati memberikan interpretasi dari konsep dan situasi Islam yang sangat dinamis. Ia menyesuaikan konsep-konsep Islam tradisional dengan kebutuhan sosial-politik kontemporer. Konsep-konsep dasar Islam, seperti umat, imamat, adil, syahadat, hijrah, syirik, diterjemahkan oleh Syariati menjadi konsep yang tegas, aktif dan dinamis. Misalnya, seruan Rasulullah SAW untuk melempar jumrah 3 kali dalam pelaksanaan haji, bagi Syariati menerimanya sebagai perintah untuk melemparkan batu ke berhala-berhala kapitalisme, despotisme, dan kemunafikan beragama. Seluruh proses pelaksanaan haji bagi Syariati merupakan persiapan

67 Shariati, Ali. *"Islam Shenasi"*.n.p. 1972, pp. 14-15.

68 *Ibid*. p.4

penting untuk menjadi seorang pejuang demi menegakkan agama dan keadilan.[69]

Revolusi anti monarkhi, yang menggulirkan sejumlah tokoh-tokoh politik yang berasal dari pemikir-pemikir agama, tidak diragukan lagi, telah merubah Iran menjadi salah satu pusat dunia Islam yang penting. Jika pada tahun 1970-an, terjadi peningkatan kekuatan ekonomi di Iran, maka pada dasawarsa selanjutnya Iran berubah menjadi pusat gerakan Islam internasional. Dalam hal ini kita dapat membenarkan pendapat seorang ahli dari Universitas California, Maridi Nahasa. Menurutnya, Revolusi Iran mempersatukan proses perkembangan pengaruh politik Islam di Timur Dekat dan Timur Tengah, mengembalikan agama ke tengah-tengah kehidupan masyarakat dan internasional. Karakter Revolusi Iran yang radikal, ajaran Syi'ah yang tegas dan anti kompromi telah mempengaruhi tendensi dalam menghadapi permasalahan sosial dan politik negara-negara muslim dunia.[70]

Dengan membandingkan kebijakan politik Iran dan Saudi Arabia, sebagai dua pusat kekuatan utama dalam dunia Islam pada akhir abad ke-XX, dapat diperhatikan, dalam konteks tertentu, mereka bisa menjadi partner, namun dalam konteks lain, mereka tampil sebagai dua poros yang bersaing merebut pengaruh dalam dunia Islam. Kedua pihak ini bersaing untuk memperkenalkan prinsip-prinsip dan kedudukan Islam dalam kehidupan sosial-politik bernegara dan kehidupan masyarakat Islam internasional. Kedua negara ini aktif mencampuri urusan dalam negeri negara-negara muslim lain dan bersaing dalam memperkuat posisi Islam. Dalam hal ini, dengan alasan demi konsolidasi dan menegakkan Islam, mereka tidak jarang melanggar norma kesepakatan internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara-negara yang berdaulat.

69 *Ibid.*p.43
70 The New York Times, 2.12.1981.

Dapat dibayangkan, bahwa perbedaan antara dua kekuatan juga tidak kurang dari persamaan ciri-cirinya. Saudi Arabia bertumpu pada mayoritas Sunni dunia, sedangkan Iran didukung oleh minoritas Syi'ah. Selanjutnya, Saudi Arabia tidak hanya berusaha merangkul masyarakat muslim, namun juga pemerintahan negara-negara muslim. Bersama-sama mereka, Riyadh berusaha memperkuat organisasi-organisasi internasional, yang mampu mengontrol kekuatan Islam sebagai suatu negara maupun dalam arena internasional.

Politik Iran dalam dunia Islam memiliki karakter yang lebih rumit dan bertolak belakang. Bagi kelompok tertentu, Iran dianggap sebagai pusat kekuatan, sebagai suri tauladan untuk dicontoh, sumber kebanggaan dan lainnya. Bagi kelompok lain, Iran merupakan sumber kekuatan impulsif, yang menggoyang kestabilan *status quo* negara-negara Asia-Afrika. Dalam tahap tertentu, Saudi Arabia dapat dinilai sebagai pusat kekuatan Islam elit dan penguasa tinggi. Sedangkan Iran merupakan pusat kekuatan Islam jelata. Namun seperti dalam pembagian kerja, sama sekali tidak tertutup kemungkinan bagi kedua belah pihak untuk berubah posisi atau tampil bersama, walaupun hal ini jarang terjadi.[•]

BAB IV
Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia (1980-1990)

1. Arah Perkembangan Politik Indonesia dan Dunia Islam

Seluruh dunia menyaksikan bagaimana proses kebangkitan kembali Islam pada dua dekade di penghujung abad ke-XX ini tengah berlangsung. Umat muslim di Indonesia juga turut ambil bagian dalam proses tersebut. Tampak jelas bahwa umat Islam, seperti pemeluk agama lainnya di Indonesia, tidak hanya telah mampu bertahan bahkan tengah mengembangkan berbagai aktivitasnya menghadapi perubahan zaman. Tampak sejak pertengahan kedua tahun 1980-an telah terjadi peningkatan pengaruh Islam terhadap politik di Indonesia, seperti terlihat dalam beberapa kebijakan dalam negeri pemerintahan Soeharto yang berpihak kepada kepentingan kelompok Islam. Di saat yang sama, tak dapat dihindari bahwa proses kebangkitan Islam tersebut telah pula mempengaruhi politik luar negeri Soeharto, apalagi umat Islam di negara-negara lainnya tampak semakin aktif mengumandangkan ambisi internasionalismenya. Revolusi Iran tahun 1979, konflik berkepanjangan Arab-Israel, invasi dan

perang tentara Uni-Soviet dengan rakyat Afgan di Afghanistan, semua itu menjadi fenomena yang tak terbantahkan akan adanya pengaruh kuat faktor ideologi Islam dalam perpolitikan dunia.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tampak harus selalu dekat dan aktif bekerjasama dengan sesama negara muslim. Sejalan dengan itu umat Islam di Indonesia terlihat berupaya keras menyingkirkan segala keterbatasan dan mengedepankan berbagai potensi yang ada dalam melakukan pembaharuan di bidang pemerintahan agar dapat menggunakan secara luas prinsip-prinsip keislaman dalam politik luar negerinya. Namun demikian pemerintahan Soeharto, yang didominasi kaum nasionalis (di luar kelompok agamis), secara terus menerus mengontrol berbagai aktivitas umat Islam di Indonesia. Kaum nasioalis ini tidak berkenan bila Islam dijadikan sebagai dasar konseptual dalam berbagai kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Akan tetapi tampak pula adanya sejumlah besar kelompok Islam di Indonesia yang telah menerima dan mengakui Pancasila sebagai prinsip dasar ideologi dalam struktur kehidupan bernegara, yang tidak membeda-bedakan agama. Dengan demikian, Indonesia tidaklah bisa dianggap sepenuhnya sebagai negara Islam seperti dalam arti kata tersebut, sekaligus bukan pula negara sekuler. Oleh sebab itu Indonesia sebenarnya memiliki status negara tersendiri yang unik dan pandangan yang menganggapnya sebagai negara Islam tak lebih karena sebagian besar penduduknya menganut agama Islam (88%). Selain itu penting dicatat bahwa sekalipun terdapat Departemen Agama dalam struktur Negara Indonesia namun peran dan tugas terpenting dari kementerian tersebut adalah menjalankan berbagai kebijakan negara bagi perkembangan seluruh agama yang ada serta menjaga nilai-nilai etika-moral sebagai poros utama dalam struktur kehidupan masyarakat dan politik negara.

Banyak peneliti dan para ahli baik dari dunia Barat, seperti juga di Rusia dan bahkan di Indonesia mengesampingkan Islam sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Tentu saja dalam beberapa hal ini dapat diterima, mengingat secara praktis faktor utama perkembangan nasional Indonesia setelah kemerdekaan bertumpu pada kepentingan bidang sosial dan ekonomi. Sesuai dengan pendapat tersebut salah satu peneliti terkenal Indonesia yang juga mantan diplomat, Hashim Jalal, secara tepat mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia seperti biasa akan tetap berjalan menurut kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi agar rencana politik luar negeri dapat mendukung kebijakan dalam negeri yang bertujuan menciptakan upaya modernisasi masyarakat.

Menurut pandangan tersebut politik luar negeri Indonesia bertujuan membentuk dan memperkuat iklim di kawasan regional dan internasional, yang akan dapat menjamin kestabilan Indonesia baik dalam sisi pertumbuhan sosial-ekonomi di kawasan regional maupun iklim persahabatan dan kerjasama Internasional. Terkait dengan itu usaha untuk menjamin keamanan internasional dan kerjasama dengan semua negara, seperti diyakini para ahli, menjadi pusat perhatian diplomasi Indonesia.

Faktor lain yang turut mempengaruhi politik luar negeri Indonesia adalah kepedulian pusat kekuasaan atas terjaganya kesatuan nasional. Masalah ini menjadi sangat penting bagi Indonesia, dimana penduduknya terdiri atas beragam faktor etnis, budaya, bahasa dan agama. Dalam skala yang sama, hal tersebut diperburuk dengan adanya potensi perpecahan yang diakibatkan oleh besarnya perbedaan tingkat pertumbuhan di berbagai daerah dan wilayah hingga pelosok negeri baik bermotif sosial dan ekonomi. Terdapat pula perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan pembagian pendapatan Negara yang tak jarang menumbuh suburkan

tendensi separatisme. Oleh sebab itu, pluralitas etnis, agama, budaya dan bahasa sebagiannya telah menimbulkan tindakan sosial dan politik yang saling berlawanan, bahkan pada kasus-kasus tertentu telah menciptakan peluang pendekatan kekerasan dari pemimpin daerah terhadap pemerintah pusat. Karenanya, salah satu misi utama politik luar negeri Indonesia adalah menjalankan ketentuan internasional untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Faktor ketiga yang memperjelas wajah politik luar negeri Indonesia, menurut para ahli yaitu berbagai upaya Indonesia di dunia internasional dalam rangka menciptakan iklim yang adil dan penegakan supremasi hukum di dunia. Hal ini tampak setelah jatuhnya pemerintahan rezim diktator tahun 1998 dan terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Saat itu, pada akhir tahun 1980-an diawal tahun 1990-an, dalam kebijakan politik Soeharto mulai menampakkan kecenderungan yang semakin kuat kepada Islam. Pada tahun 1990 Soeharto berkunjung ke kota Samarkand dan mendirikan shalat di mesjid monumental, Masjid Bukhari. Umat muslim Indonesia, sebagaimana umat muslim lainnya, sangat mengenal kota Bukhara sebagai tempat kelahiran Imam al-Bukhari, salah seorang periwayat utama hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Soeharto tampak semakin mengesankan di mata umat muslim Indonesia karena perubahan pandangannya terhadap Islam. Jika pada tahun 1985 Soeharto menetapkan agar semua partai dan organisasi Islam mengakui dan memberlakukan Pancasila sebagai dasar prinsip organisasi dan aktifitasnya serta memerintahkan untuk menyatukan mereka dalam satu partai, maka pada Desember 1990 Soeharto melakukan langkah yang benar-benar radikal. Atas restunya, telah dibentuk Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai wadah berorganisasi bagi seluruh sarjana dan intelektual muslim Indonesia dengan menunjuk B.J. Habibie sebagai

ketuanya, yang saat itu juga sedang menjabat Menteri Riset dan Teknologi. (Selengkapnya di BAB berikutnya).

Pada tahun 1990-an pemerintahan Soeharto tampak semakin terbuka menunjukkan "posisinya" dalam berhubungan dengan umat Islam. Pada tahun 1995, Soeharto mengunjungi Samarkand untuk kedua kalinya. Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah pada tahun 1991 Soeharto, bersama istri (yang meninggal pada tahun 1996) dan putra-putrinya, melakukan ibadah haji ke Mekkah dan Madinah. Hal ini menimbulkan berbagai respon dari umat muslim di Indonesia maupun di negara lain yang pada umumnya menilai bahwa langkah Soeharto tersebut merupakan sinyal nyata bahwa dirinya secara pribadi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari umat Islam. Maksud khusus dari perjalanan haji tersebut antara lain juga untuk menerima penganugerahan nama awal "Muhammad" bagi Soeharto yang diberikan langsung oleh Raja Arab Saudi, sehingga setelah peristiwa itu ia memiliki nama lengkap Haji Muhammad Soeharto, sedangkan istrinya dianugerahi nama awal Fatima.

Peristiwa ini cukup menimbulkkan beragam diskusi dan kontroversi. Pertanyaan utama yang dibicarakan apakah Soeharto melakukannya atas motif agamanya secara pribadi ataukan hanya bertujuan menarik simpati untuk kepentingan politiknya. Sebagian besar umat muslim percaya bahwa itu merupakan semata-mata tindakan dari seseorang yang menjalankan kepercayaannya, yang ingin melaksanakan kewajiban kelima umat Islam–melaksanakan ibadah haji ke tanah kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW. Namun pengamat dari luar negeri menganggap itu lebih dari sekedar tindakan yang dimotivasi oleh agama. Sebagai contoh, pengamat Islam terkenal Indonesia Michael Leifer mengatakan dalam artikel di surat kabar harian Amerika, bahwa Soeharto seolah-olah melakukan hal tersebut untuk meyakinkan dirinya sebagai penguasa status-quo di

Indonesia. Pengamat lain, Margaret Scott menyebutkan, setelah menunaikan haji, Soeharto mengharapkan dapat "memainkan kembali kartu Islam dalam karir politiknya".

Tanpa mengindahkan semua pendapat dan pemikiran diatas, Soeharto beserta istri dan anak-anaknya kembali mengunjungi Mekkah dan Madinah pada tahun 1995 setelah menghadiri Konferensi Non-Blok ke XI di Kolombo. Menurut pernyataan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, Soeharto kembali berhaji untuk berterimakasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehubungan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 50. Terakhir kalinya Soeharto mendapatkan sambutan tepuk tangan dari umat Islam adalah ketika ia mengunjungi bekas reruntuhan perang di Sarajevo pada April 1995. Kunjungan ini dianggap sebagai kekuatan solidaritas umat Islam Internasional. Banyak yang menganggap ia gagah berani dan mengambil langkah yang jantan, karena kunjungan ini dilakukan saat Sarajevo dalam kepungan api perang dimana Presiden Indonesia dapat saja dengan mudah menjadi sasaran penembak jitu. Sebagai tanda peringatan kunjungan bersejarah tersebut Komisi Nasional Indonesia untuk solidaritas muslim Bosnia memutuskan untuk membangun mesjid yang diberi nama Masjid Haji Muhammad Soeharto di Sarajevo. Seperti diberitakan di koran-koran terbitan Indonesia tahun 1996 terdapat berita mulainya pelaksanaan rencana tersebut.

Sehubungan dengan itu, terdapat pertanyaan bagi para pengamat, apakah Islam dan pengikutnya dapat mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Jawaban untuk pertanyaan tersebut sama yaitu tidak dapat. Meskipun demikian, "faktor Islam" dimulai dari akhir tahun 1960-an memiliki pengaruh nyata dalam membentuk karakter hubungan internasional seperti yang terjadi di wilayah Afro-Asia dan juga dunia secara keseluruhan. Tingkat dan waktu pengaruhnya terhadap suatu masalah tidaklah

sama dan mungkin tidak bersifat permanen. Akan tetapi, tidak pula dapat disangkal pengaruh Revolusi Khomeini di Iran, Radikalisme pejuang "Hizbullah" Palestina, bom bunuh diri yang mengatasnamakan "Ide Allah" dan pembebasan tanah Palestina dari pendudukan tentara Israel. Begitu pula tidak dapat dilupakan tingkat radikalisasi "persaudaraan Islam" internasional akibat serangan Uni-Soviet ke Afghanistan. Banyak kejadian seperti diatas yang hilang begitu saja, namun jejaknya tetap melekat dalam ingatan umat Islam, hal ini memberi kesempatan yang unik bagi pelaku dunia politik berspekulasi terhadap berbagi rasa dan emosi serta penderitaan umat muslim di dunia, termasuk di Indonesia. Contoh, saat pendudukan tentara Uni-Soviet di Afghanistan, di Indonesia secara aktif bekerja Komisi Nasional untuk mendukung rakyat Afghanistan. Walaupun pemerintahan Soeharto berusaha lebih menjaga netralitas posisinya, yang tidak mendukung USSR, namun khususnya tidak meninggalkan "amarah tuduhan terhadap penjajah" seperti yang sering dilakukan beberapa organisasi non-pemerintah di Indonesia.

Demikian pula yang terjadi dalam beberapa masalah penting di dunia Islam. Contohnya adalah konflik di Timur Dekat, seperti yang telah disinggung, secara resmi Jakarta selalu mempertimbangkan tidak berdasarkan solidaritas Islam, tetapi menurut sudut pandang terhadap kebebasan dan kemerdekaan seluruh rakyat di dunia dari kolonialisasi dan kebuasan perang. Saat itu pemerintah Indonesia tidak dapat melaksanakan kebijakan luar negerinya tanpa mengindahkan faktor-faktor yang telah terjadi sehubungan pertumbuhan pengaruh proses Islamisasi di dalam negeri dan di luar negeri. Dan dari sini dapat di selidiki baik yang kemarin maupun hari ini terjadi politik dualisme. Dan meskipun Islam secara formal tidak dapat dianggap aspek penentu terbentuknya politik luar negeri, namun secara resmi Jakarta, yang selalu berusaha agar peran kaum Islam tetap kecil, harus dengan teliti dan hati-hati walaupun rumit menjawab

semua pertanyaan di dunia internasional, dimana problematika muslim berada panggung kehidupan politik.

Tak diragukan lagi bahwa tekanan yang dilakukan Jakarta pada tahun 80-an dan 90-an lalu, seperti juga yang terjadi sekarang, tentu saja mengurangi peran dan arti faktor keislaman dalam politik luar negerinya. Namun di saat yang sama terdapat pula kejadian yang menjadi faktor penentu yang harus dijadikan perhatian pemerintah Indonesia. Oleh karena itu banyak analis berpendapat Indonesia menganut politik dualisme (*double-standard*). Seperti yang ditulis oleh Michael Liefer "Pemerintah Indonesia, khususnya di masa pemerintahan Jendral Soeharto menganut paham dimana politik luar negerinya jangan sampai menjadi sandera kaum muslim...Akan tetapi, kita dapat pula mengatakan bahwa Islam tidak memberikan pengaruh dalam politik luar negeri Indonesia, namun pengaruh itu, seperti yang telah diketahui, tidak mengandung arti positif tetapi lebih kepada arti yang merusak".

Walau komentar ini dikatakan oleh pengamat Amerika pada awal 80-an, namun hal ini bisa saja merupakan ciri politik tahun 90-an dan bahkan awal abad XXI. Menurut salah seorang pengamat dari Indonesia, Azumardi Azra, dari akhir tahun 80-an dalam politik luar negeri Indonesia terdapat beberapa kecenderungan untuk mengakumulasi "faktor Islam". Dan hal ini berpengaruh tidak hanya "cinta' terhadap Islam itu sendiri, sebagai sumber objektif sosial politik dalam negeri, tetapi juga bagi perkembangan Indonesia di dunia internasional. Pada tahun 70-an, Jakarta berusaha aktif melaksanakan politik luar negerinya, terutama dalam "Gerakan Non Blok". Contoh, Indonesia berperan penting sebagai penengah dalam penanganan masalah rakyat Moro di Filipina. Jika pada tahun 60-70-an politik luar negeri di orientasikan bagi pertumbuhan ekonomi? Maka di akhir tahun 80-an pusat perhatian beralih menjadi pernyataan diri sebagai salah satu pemain penting dalam politik dunia.

Peralihan ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, motivasi ekonomi. Negara memerlukan investasi dari luar yang berkesinambungan, sekaligus mencari pasar untuk menjual hasil produksinya. Bersamaan itu dihadapan Indonesia terdapat masalah sensitive mengenai Timor Timur yang setelah usainya kolonisasi Portugal berusaha menjadi negara merdeka. Hal ini mengharuskan Indonesia mencari dukungan dari negara-negara lain, khususnya dari negara-negara Timur Dekat yang dianggap sebagai dua faktor penting: faktor politik-agama (Islam) dan kandungan minyak yang berlimpah. Ditambah lagi Indonesia telah membuka pasar Timur Tengah dan Timur Dekat untuk produksi industri ringannya. Maka itu disamping alasan sosial-ekonomi berperan pula faktor politik-agama. Dengan tersebut, pada Juni 1975 dan Oktober 1975, Soeharto mengunjungi negara-negara Timur Dekat dan melangsungkan perjanjian untuk melakukan hubungan yang lebih erat di bidang ekonomi dan politik dan memperhitungkan untuk mendapat dukungan terhadap masalah Timor Timur.

Selanjutnya Soeharto menunjukkan ketertarikannya menggunakan "faktor ke-Islam-an" dalam strategi politik luar negerinya. Akan tetapi tampak adanya usaha untuk menguasai kaum Islam dengan tidak mengganggu proses pendekatan Jakarta terhadap pendukung Islam di tingkat internasional. Sehingga selalu terlihat tindakan yang mendua dalam kegiatan internasional. Ambil saja contoh hubungan rezim Soeharto terhadap revolusi Iran dan politik pemimpin Libya Kaddafi. Dan seperti yang telah dijelaskan diatas, walau Indonesia tetap mencari cara untuk mendekati negara-negara Timur Dekat, ia juga melakukan politik yang sangat berhati-hati terhadap hubungannya dengan rezim radikal seperti Iran setelah kemenangan Khomeini dan rezim Kaddafi di Libya. Kekuasaan di Jakarta sangat terganggu dengan pengaruh kaum muslim di kedua rezim dan terus menerus membicarakan langkah Iran dan

Libya. Terlebih pejabat-pejabat teras Indonesia sering menuduh pemerintahan Iran dan Libya ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia dan mendanai pemberontak Islam Indonesia. Contohnya adalah kekuatan militer menuduh organisasi lokal yang menyatakan dirinya "Gerakan Revolusi Islam Indonesia" atas usaha mendapatkan bantuan Iran untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa di Indonesia. Menurut kabar, kaum radikal Indonesia ingin membentuk rezim seperti rezim Khomeini di Iran. Penguasa Indonesia juga merasa terganggu atas campur tangan pihak luar, namun juga mencurigai orang-orang yang belajar ataupun hanya jalan-jalan di negara-negara Timur Dekat. Pertengahan tahun 80-an pemerintah Indonesia secara resmi melarang warganegaranya belajar di 32 negara di dunia. Di antaranya terdapat 21 negara sosialis diantaranya 4 negara–Israel, Afrika Selatan, Taiwan dan Portugal tidak memiliki hubungan dilomatik, 6 negara merupakan negara muslim yang memiliki rezim ekstrimis. Didalamnya termasuk Libya, Iran, Irak, Syiria dan Algeria.

Mudah sekali menemukan alasan mengapa penguasa merasa terganggu, karena anak-anak muda yang sekembalinya belajar dari negara seperti Libya dan Iran mungkin saja menyebarkan ajaran serta pemikiran Islam radikal. Seperti diketahui, anak muda lebih adalah bagian masyarakat yang lebih sensitive terhadap panggilan dan semboyan maksimalis, terlebih yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan beragama. Oleh sebab itu pada masa rezim totaliter-militer Soeharto, mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliahnya di negara muslim manapun, sepulangnya langsung dilakukan penyelidikan dan kontrol polisi terhadapnya. Hasilnya banyak lulusan institusi pendidikan dari negara muslim dari Libya, Algeria, Iran dan lainnya berusaha pulang melalui negara ke tiga dan mendapatkan paspor Indonesia disana.

Beberapa tahun kemudian politik penguasa Indonesia sehubungan dengan negara-negara muslim ini dihentikan. Awal tahun 90-an di mass media juga penyerangan terhadap negara Iran, Libya, Irak dan negara Islam lainnya dihentikan. Orang-orang Indonesia yang dulu pernah belajar disana juga tidak di ikuti lagi. Terlebih penguasa Indonesia juga berusaha merubah sanksi yang dikenakan PBB terhadap Libya yang dituduh menyebabkan jatuhnya pesawat penumpang sipil Inggris. Sebagai jawaban atas permintaan Libya, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai ketua Gerakan Non Blok, pada tahun 1993 mengutus Duta Besar ke New York untuk berunding dengan para pejabat PBB agar membatalkan sanksi anti-Libya. Pada saat itu hubungan antara RI dan Iran juga menghangat. Mengesampingkan faktor agama yang ada, Pemerintah Soeharto berusaha membangun hubungan yang murni ekonomi dengan negara tersebut. Hal ini tampak pada kunjungan Presiden Iran Ali Akbar Rafsanjani ke Jakarta pada Oktober 1994. Penguasa Indonesia berusaha secara resmi menyambut dan memberikan perhatian khusus pada kunjungan tamu tingkat tinggi tersebut. Dalam pembicaraan tingkat Presiden, Soeharto secara khusus menyampaikan rencana Indonesia menanamkan modal dalam ekonomi Iran, terutama di bidang produksi tekstil, minyak sawit dan air mineral. Kedua kepala negara berjanji membentuk Komisi bersama untuk merealisasikan rencana tersebut. Rafsanjani juga sangat gembira bertemu dengan umat muslim Indonesia. Ribuan umat muslim berkumpul di lapangan Masjid Istiqlal saat tamu dari Iran selesai menunaikan Shalat Jum'at.

Pada awal dasawarsa 90-an, hubungan Indonesia dengan Irak juga membaik. Sebagai jawaban atas pendudukan Irak atas wilayah Kuwait, Amerika dan sekutunya berperang melawan Irak. Organisasi Islam Indonesia melakukan protes atas tindakan tersebut. Di seluruh daerah terjadi aksi demonstrasi

anti-Amerika. Saat itu saya yang bekerja sebagai direktur Pusat Kebudayaan Rusia (PKR) mengalami langsung gejolak anti-Amerika tersebut. Secara sengaja saya melewati lapangan tempat aktivis Islam tersebut berdemonstrasi mendukung "perang kaum Islam di Irak melawan penjajah Amerika". Sebagian aktivis yang mengenali adanya orang kulit putih di dalam mobil berplat diplomatik langsung mengerumuni dan mulai mengancam kami. Namun kemampuan berbahasa Indonesia yang baik akhirnya menyelamatkan kami. Saya dengan cepat menjelaskan siapa kami dan dengan damai akhirnya berpisah ketika saya mengundang mereka menghadiri malam musik klasik Rusia yang diadakan di Pusat Kebudayaan Rusia. Dan tentu saja akhirnya sebagian dari aktivis datang menghadiri dan tampak puas melihat dan mendengarkan pertunjukan yang diadakan di Pusat Kebudayaan Rusia yang beralamatkan: Jl. Diponegoro No. 118. Perlu disebutkan bahwa saya dengan orang-orang muslim sering sependapat. Karena sejauh yang saya mengerti, penghormatan dan penghargaan terhadap agama mereka adalah yang terpenting dan hal serta urusan lainnya akan menjadi persoalan kedua.

Dalam seluruh tindakan yang dilakukan pihak Barat, termasuk dalam hal ini hubungan dengan Irak, kaum muslim Indonesia merasa marah atas perlakuan mereka yang menganggap diri benar, berkuasa, memiliki bahasa manusia yang lebih tinggi yang mereka anggap lebih sempurna, dan selain mereka semua harus mematuhinya tanpa kecuali. Keangkuhan, perasaan bangga dan kekuasaan penuh yang tak boleh dibantah adalah semua hal yang tentu saja akan mengundang ketidaksenangan dan kebencian. Dapat dimengerti bahwa politikus yang sebagian terdiri dari partai Islam akan langsung dengan cepat berusaha meningkatkan gengsi dan otoritasnya, serta dengan aktif menggunakan keuntungan tersebut terhadap api amarah manusia biasa. Maka mau tidak mau bagai jaminan peletakan tanda persamaan antara spontanitas, reaksi alami seorang penganut agama dan juga

tindakan para politikus dari agama. Dua organisasi muslim terbesar di Indonesia yaitu "Muhammadiah" dan "Nahdlatul Ulama (NU)" berusaha secara maksimal menggunakan reaksi seorang penganut muslim biasa dalam perang Amerika di Teluk Persia. Setelah bertemu dengan presiden Soeharto, pemimpin "Muhammadiah" bertindak untuk memilih jalan damai dalam konflik tersebut.

Bagaimanakah reaksi pemerintah Indonesia terhadap semua tindakan organisasi muslim tersebut? Seperti diketahui, Kementerian Luar Negeri mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendakwa Irak atas agresinya terhadap Kuwait dan mengizinkan Amerika dan sekutunya menggunakan kekuatan bersenjata untuk membebaskan wilayah Kuwait dari pendudukan tentara Irak. Namun lebih dari itu Jakarta tidak ingin terlibat, ia menolak tawaran Arab Saudi untuk bergabung dengan tentara multinasional yang berpihak pada Amerika.

Selain itu penguasa Indonesia dengan segala upaya berusaha menghindar sejauh mungkin dari hal yang berhubungan dengan faktor agama. Mereka takut apabila faktor tersebut terdapat dalam penyelesaian masalah tersebut, maka akan menjadi palang penghalang dan kaum muslim dapat mendiktekan keinginannya terhadap kasus sejenis. Contoh, secara resmi mengutuk Washington atas tindakan anti-Irak nya namun bersamaan itu dengan resmi Jakarta menganggap diri rekan dekatnya USA. Saat yang sama penguasa Indonesia menaruh perhatian terhadap konflik di antara negara-negara Timur Dekat dan menurut Jakarta hal itu tidaklah dipengaruhi oleh faktor agama. Dengan jelas hal ini tergambarkan dalam pernyataan Menteri Agama Munawir Sadzali yang secara khusus menggaris bawahi bahwa perang Teluk bukanlah perang agama. Dan ia memohon agar rakyat Indonesia tidak menganggap perang tersebut adalah perang antar agama.

Pernyataan ini juga didukung oleh Presiden Soeharto yang secara terpisah menyatakan perang tersebut tidak bersifat agama melainkan semata-mata politik. Pada saat yang sama secara resmi dia menegaskan bahwa Indonesia berada di posisi netral terhadap masalah tersebut dan meminta Irak membebaskan wilayah Kuwait dan menyelesaikan masalah tersebut dengan damai. Sesuai dengan posisi netral tersebut, pejabat militer Indonesia menolak ide beberapa kelompok Islam Kediri di kota Kediri-Jawa Timur yang memanggil anggotanya untuk secara sukarela dikirim ke Irak untuk melindungi makam suci yang dianggap sebagai peletak dasar ajaran Sheik 'Abd al-Kadir al-Jaelani di Bagdad.

Dalam hubungannya dengan perang Teluk, seperti yang terjadi di Iran dan Libya, pejabat Indonesia berusaha sepenuhnya menjauh dari faktor agama dalam memandang keadaan yang terjadi akibat perang Amerika dan sekutunya melawan Irak. Jakarta selalu menganggap konflik ini bersifat politik, ekonomi dan faktor kemanusiaan lain kecuali agama. Karenanya, Presiden Soeharto dalam situasi panas tersebut kembali tampil menawarkan agar PBB memberikan Irak kesempatan untuk memenuhi resolusi PBB sebelumnya. Dengan kata lain, pada saat angkatan udara amerika dan sekutunya menyerang Irak kepala Negara Indonesia malah menawarkan penghentian penggunaan senjata Amerika melawan Irak.

Setelah berakhirnya perang Teluk, Indonesia melanjutkan dukungannya terhadap Irak yang tidak hanya sekali meminta PBB untuk melepaskan sanksinya atas Irak. Dalam hal ini digunakan pendekatan ekonomi, seperti saat terjadi dalam perundingan wakil presiden Irak Taha Yasin Ramadhan di Jakarta Mei 1995. Setelah pengakuan mendalam atas dukungan Indonesia secara terus menerus agar PBB mencabut sanksinya terhadap Irak, Ramadhan atas nama Irak menawarkan pembentukan komisi

bersama kedua negara di bidang ekonomi dan perdagangan diantara kedua negara.

Seperti yang telah disebutkan di bagian awal buku ini, kebijakan politik Indonesia atas penyelesaian Timur Dekat memiliki arti lebih dari satu bahkan dalam beberapa hal bersifat mendua. Dari awal kemerdekaannya Indonesia secara resmi mendukung perang rakyat Arab dan tanpa syarat membebaskan wilayah Arab yang di kuasai Israel serta memberikan hak hukum rakyat Palestina untuk membentuk negaranya sendiri. Seperti pada suatu ketika Soekarno pernah berkata: "Pandangan dan hubungan kami terhadap masalah tersebut sudah jelas. Kami berdiri dibelakang rakyat Arab dan bertindak untuk hak rakyat Palestina untuk membentuk negaranya sendiri dan kami mendukung perang rakyat Palestina melawan agresi barbarnya Israel".

Pada masa Soekarno, Israel tidak termasuk dalam anggota percaturan Asia yang dilaksanakan di Jakarta yang juga mengundang masalah yang tidaklah kecil untuk gerakan Olimpiade dunia. Namun pada saat itu Negara-negara Arab tidaklah terlalu mendukung Indonesia. Saat pemerintahan Soekarno Indonesia menyatakan pada PBB bahwa "Agresi Israel melawan Negara tetangganya akan menimbulkan korban yang banyak dan juga kehancuran besar. Indonesia ikut serta dalam proklamasi "tahun rakyat Palestina" pada tahun 1984.

Bagaimanapun juga seperti pendapat pengamat dari Barat dan Indonesia, atas pidato umum tersebut diketahui pandangan mendua Indonesia. Yaitu, masih pada masa Soekarno, Jakarta berusaha menyampaikan kritik atas kebijakan anti imperialisme dan terlebih kebijakan anti-Israel. Bagi Soekarno, Israel adalah pos terdepan imperialis barat di dunia Afro-Asia. Dan saat yang sama Soekarno juga menghindari menggunaan faktor agama dalam pendekatan terhadap masalah tersebut. Di masa pemerintahan

Soeharto dan juga Soekarno, hubungan Indonesia dengan Negara-negara Arab dan Israel bersifat pragmatis. Kita ambil contoh, ketika Negara-negara Arab mengumumkan pemboikotan minyak, Indonesia tidaklah terburu-buru ikut serta dan malah menyatakan bahwa itu dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Selain itu Indonesia secara aktif ikut serta mengirim kontingen tentara perdamaian PBB di sektor Gaza. Indonesia berbeda dengan negar Arab lainnya tidak mengecam penandatanganan Perjanjian Camp David oleh Anwar Sadat dan Israel. Tetapi wakil presiden Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa itu adalah langkah yang tepat bagi perolehan kemerdekaan rakyat Arab.

Kemudian, sekalipun telah lama organisasi Islam Indonesia berusaha membuka perwakilan "Gerakan Pembebasan Palestina", Jakarta tidak bergerak sampai adanya kunjungan pertama pemimpin Palestina Yasser Arafat pada Juli 1984. Dalam perundingannya dengan Arafat, Soeharto berjanji untuk mengizinkan pembukaan perwakilan biro Front Pembebasan Palestina, namun dengan syarat wajib yaitu organisasi tersebut tidak lah bersifat Islam dan harus mengandung keanekaragaman komponen beragama. Pemerintah Indonesia dengan senang hati ingin membuka perwakilan Front Pembebasan Palestina di PBB, tidak di wilayahnya, karena merasa akan sangat terganggu bila perwakilan tersebut nanti memperkuat radikalisme termasuk kecenderungan Islam dalam kehidupan politik dan masyarakat Indonesia. Tanpa terkecuali penguasa Indonesia menghindari pengaruh bentuk pro-komunis diantara kepemimpinan Front pembebasan Palestina.

Bersamaan waktunya dengan hal itu, pengaruh negatif sehubungan dengan kelompok elit kanan Indonesia kepada kaum Arab sepenuhnya agak berubah. Contoh, pengamat barat Fred Van Der Mehden melakukan penyelidikan terhadap pendapat pejabat-pejabat teras Indonesia atas orang Arab. Salah satu dari mereka mengatakan seperti berikut: "Mereka (orang Arab) selalu

berpendapat atas satu atau lebih pendapat. Mereka–orang yang tidak menentu. Sekarang mereka berkelahi satu sama lain, besok mereka sudah berpelukan dan berciuman. Orang Arab tidak menentu dan tidak dapat dipercaya. Selain itu, lanjut sang pejabat yang tetap tidak ingin diketahui identitasnya, budaya Arab sangat berbeda dengan kami orang Indonesia. Kami penganut muslim yang lebih taat dibanding kan sebagian besar mereka. Kami tidak mabuk-mabukan. Dan sebagian besar orang Indonesia kini tidak tertarik lagi dengan orang Arab". Sekedar memastikan kemudian pengamat barat memiliki pertanyaan, apakah orang Indonesia pernah menyukai orang asing.

Dalam hal ini tidak berarti suka terhadap semua orang asing, akan tetapi banyak pejabat teras politik dan ekonomi menginginkan agar negara-negara Arab menambah modalnya untuk kemajuan Indonesia sebagai kompensasi atas dukungan politik terhadap perang Arab. Menurut data di Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Internasional pada periode tahun 1967-1986 tidak satupun Negara Arab yang termasuk dalam daftar perusahaan terbesar yang menanamkan modal di Indonesia. Menurut sudut pandang pragmatis semua retorika umum ini ditarik pada rencana barat ketika semua kerja nyata tidak berharga dan hampir tidak kelihatan. Lain dapi pada itu, diantara pejabat militer Indonesia terdapat pendapat bahwa disamping motif tersembunyi politik, tentara Israel menurut sudut pandang profesionalisme lebih dihargai dari tentara Palestina.

Pernyataan demikian banyak dikemukakan oleh pejabat militer dan politik Indonesia akan tetapi tidak memiliki keterbukaan yang sama dimana perasaan umumnya berpihak pada orang Arab khususnya kaum Palestina. Peran utama dalam mendukung Palestina tentu saja dimainkan oleh organisasi muslim. Analis media massa muslim, meningkatnya jumlah publikasi di majalah-majalah dan buku-buku membuktikan bahwa dukungan terhadap perang Palestina bersifat agama, khususnya ketika

membicarakan pendudukan Israel terhadap Jerusalem Timur dan sektor Gaza. Perlu ditambahkan bahwa jatuhnya USSR pada tahun 1991 mengurangi kekhawatiran kaum Islam Indonesia atas orientasi pro-komunis pada sebagian perlawanan Palestina dan memperkuat karakter agama dukungan terhadap Yasser Arafat.

Dari waktu ke waktu pertentangan seperti ini terus terjadi dengan keinginan pemerintah Soeharto yang tampak pada awal 90-an. Lebih dari 10 tahun untuk pembukaan perwakilan Palestina di Jakarta. Selama tahun 80-an pemerintah Soeharto khawatir jika perlawanan kedutaan Palestina menjadi pusat bagian Islam radikal. Pada akhirnya tahun 1991 di Jakarta mulai dibuka Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Selanjutnya saat ditandatangani perjanjian damai Israel-Palestina tahun 1993, di Indonesia terjadi perbedaan pendapat atas pendekatan terhadap masalah Palestina tersebut. Sebagian besar pemimpin Islam dan pemimpin organisasi Islam merasa bahwa Israel akan menipu Yasser Arafat. Bersamaan itu mereka meminta pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel yang mana tindakan ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang menentang kolonialisme dalam bentuk apapun.

Mengomentari situasi tersebut, menteri luar negeri Ali Alatas menyatakan Indonesia tidak akan mengakui Israel sampai Negara Yahudi tersebut tidak menyelesaikan masalahnya dengan Negara-negara Arab. Alatas menambahkan bahwa semua pembicaraan tentang pengakuan Indonesia terhadap Israel masih terlalu dini karena perkembangan politik di Timur Dekat setelah penandatanganan pakta perdamaian antara Israel-Palestina masih belum jelas. Sehubungan dengan itu sang menteri menyatakan keraguannya atas realisasi perjanjian tersebut. Pada saat yang sama Alatas memberikan penjelasan atas pertemuannya dengan menteri luar negeri Israel Shimon Perez, yang setelah itu menimbulkan berbagai spekulasi tentang kemungkinan

pembukaan hubungan diplomasi kedua Negara dalam waktu dekat. Seperti yang diumumkan Alatas, itu adalah pertemuan yang tidak sengaja dalam konferensi di Wina, dimana sesuai dengan urutan abjad penempatan meja delegasi berdampingan dengan delegasi Israel. Karena letak yang dekat itu, Shimon Perez menanyakan kapan Indonesia akan mengundang Israel, menjawab itu Alatas menjawab pendek: "segera setelah Israel menyelesaikan masalahnya dengan Negara-negara Arab".

Sementara itu dukungan inisiatif perdamaian Indonesia kembali dikumandangkan presiden Soeharto pada 24 September 1993 ketika ketua delegasi Palestina Yasser Arafat terbang ke Jakarta setelah kunjungannya di China. Dalam pertemuannya dengan Arafat, sebagai ketua Gerakan Non Blok Soeharto mengucapkan selamat atas penandatanganan perjanjian damai Israel-Palestina. Soeharto mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian itu adalah langkah pertama penyelesaian masalah Timur Dekat dengan adil, khususnya sebagai bagian dari pembentukan Negara Palestina yang berdaulat di tanahnya sendiri. Lebih dari itu Soeharto juga menyatakan Indonesia siap memberikan bantuan dan dukungan terhadap rakyat Palestina untuk merealisasikan perjanjian tersebut.

Setelah kunjungan Arafat, berlangsung kunjungan tidak resmi perdana menteri Israel Yitzak Rabin ke Jakarta pada 15 Oktober 1993. Rabin meminta Soeharto sebagai ketua Gerakan Non Blok mendukung proses perdamaian di Timur Dekat. Untuk menghindari segala tuduhan, Soeharto meniadakan kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian Soeharto berhasil mengatur kunjungan perdana menteri Israel tanpa kritik apapun. Kesulitan dan kerumitan baru terjadi ketika beberapa pemimpin muslim Indonesia, yang berinisiatif untuk mendukung usaha penandatanganan damai, justru mengunjungi Israel pada Januari 1994. Termasuk di dalamnya

adalah Abdurrahman Wahid, yang merupakan pimpinan dari "Nahdlatul Ulama" yang dikemudian hari dan menjadi presiden Indonesia setelah penggulingan rezim totaliternya Soeharto, Pemimpin "Muhammadiyah" Habib Chirzin dan Ehan Effendi, - seorang peneliti Indonesia. Kunjungan ini menimbulkan perdebatan seru diantara masyarakat Islam Indonesia yang notabene menolak hubungan apapun dengan Israel. Kritik dan komentar di dalam media massa muslim pun demikian ramainya sehingga salah satu anggota grup yang berangkat - Effendi, terpaksa turun dari jabatannya sebagai Sekretaris Negara dalam kabinet Soeharto.

Kejadian anti-Israel, sama seperti kejadian yang lainnya sangat dalam merasuk di hati penganut Islam Indonesia sehingga tidak satupun pemerintahan, baik semasa Soeharto maupun setelahnya, tidak akan buru-buru mengambil keputusan membangun hubungan dengan Israel. Tidak diragukan lagi bahwa, faktor Islam memainkan peran nyatanya dalam hal ini. Disaat menajamnya hubungan Palestina-Israel, tentu saja di Indonesia tidak akan ada yang berani membicarakan hubungan diplomatik dengan Negara Yahudi.

Kaum muslim Indonesia serta pemerintahan Soeharto tidak berpihak siapapun dalam krisis Bosnia pada tahun 90-an. Secara resmi pemerintah menyatakan politik netralitasnya dan menyatakan hal ini dalam dua jalan. Pertama, secara resmi Jakarta menyatakan bahwa konflik Bosnia tidak ada hubungannya dengan agama. Kedua, dengan menggaris bawahi netralitasnya, Indonesia meminta organisasi dunia seperti PBB dan GNB memainkan peranan pentingnya dalam penyelesaian konflik tersebut. Tetapi simpati muslim Indonesia tentu saja berada dipihak muslim Bosnia. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun konflik yang mendapatkan simpati dan reaksi emosional seperti di Bosnia dan Herzegovina, kecuali sehubungan

dengan Palestina. Dengan sengaja Menlu Indonesia aktif dalam sidang istimewa tingkat Menteri Negara-negara muslim yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang berlangsung di Istanbul pada 17-18 Juni 1992. Dalam sidang tingkat menteri negara muslim ini, mereka menyerukan pada negara yang sedang bertikai untuk menghentikan tembakan dan melakukan perundingan damai.

Reaksi umat Islam Indonesia dalam krisis Bosnia sangat aktif sehingga mengharuskan dua orang menteri kabinet Soeharto memberikan penjelasan secara resmi dan menjanjikan posisi Indonesia akan keras dan tegas. Menteri Agama Munawir Sadzali dalam kesempatan tersebut menggaris bawahi bahwa perseteruan di Bosnia tidak ada hubungannya dengan agama, namun lebih bersifat politik. Ia juga menyatakan pemerintah Indonesia akan mencari jalan keluar untuk memberikan bantuan kepada rakyat Bosnia, dan tidak berdasarkan karena mereka yang jadi korban utama adalah muslim tetapi keberadaan mereka yang menjadi korban keganasan Serbia.

Bersamaan dengan itu Menteri Luar Negeri RI, Ali Alatas, juga tampil menyatakan posisi Indonesia sejak awal konflik sudah jelas dan tegas. Sesuai penjelasan Ali Alatas tersebut, Indonesia mengakui keberadaan Bosnia dan Herzegovina, dan paralel dengan itu semua memberikan pengakuan secara resmi terhadap kemerdekaan Kroasia dan Slovenia pada 20 Mei 1992. Sebagai tambahan, Jakarta menyatakan protesnya pada sidang OKI Juni 1992 serta mempertahankan inisiatif PBB untuk mengakhiri konflik tersebut.

Sebenarnya sulit membayangkan politik Indonesia sehubungan pengakuannya terhadap Bosnia. Sesuai pertanyaan tersebut, seperti dikatakan oleh Azumardi Azra, rektor IAIN (UIN) Jakarta dan pengamat politik Indonesia, bahwa dalam hal ini Indonesia kembali melakukan standar ganda dalam politiknya.

Kaum muslim Indonesia berpendapat tegas bahwa Indonesia secepatnya mengakui pula keberadaan Bosnia. Menurut mereka, pemerintah Soeharto wajib memutuskan hubungannya dengan Yugoslavia karena telah mendominasi di Serbia. Menjawab tuntutan tersebut, Ali Alatas mengatakan bahwa Indonesia yang mendapat giliran kepercayaan sebagai negara organisator pertemuan antar kepala Negara GNB wajib mencapai konsensus dalam memutuskan konflik tersebut. Dan mengingat saat itu kepemimpinan GNB dipegang oleh Yugoslavia, yang sedang mempersiapkan konferensi pada September 1992 di Jakarta, maka ia menyerahkan kepemimpinan kepada Indonesia untuk 3 tahun kepemimpinan berikutnya, maka oleh sebab itu pula proses tersebut harus terhindar dari akses-akses tertentu. Dan tentu saja tidak akan ada pembicaraan tentang pemutusan hubungan apapun dengan Yugoslavia.

Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Direktur Jenderal Bidang Organisasi Internasional Departemen Agama RI Hadi Way Arabi. Menjawab tuntutan organisasi Islam Indonesia untuk memutuskan hubungan dengan Yugoslavia ia menyatakan bahwa jalan tersebut hanya memperdalam masalah yang ada serta mempersulit situasi, sehingga pemerintah tidak akan memutuskan apapun. Pada saat itu, Bosnia dan Herzegovina meminta agar diberikan status sebagai negara pengamat dalam pertemuan antar kepala Negara GNB yang berlangsung di Jakarta. Way Arabi lebih lanjut mengatakan bahwa persoalan tersebut akan dibahas di awal agenda konferensi.

Belakangan, setelah mempertimbangkan persoalan tersebut, konferensi memutuskan tidak membicarakan permintaan Bosnia, di mana saat itu Yugoslavia mempertahankan status sebagai anggota GNB. Masalah Bosnia itu sendiri akhirnya tetap mengemuka di dalam konferensi. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan sidang 1 September 1992 mengatakan perlunya mengambil langkah-langkah yang bertujuan menghentikan

tragedi Bosnia, menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kebudayaan Bosnia dan Herzegovina. Dengan maksud tersebut, Soeharto meminta DK PBB menggunakan segala kewenangannya demi mencapai kedamaian di wilayah itu. Ia juga mengharapkan agar Negara-negara GNB memainkan peran aktif menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian, Indonesia memilih posisi tidak terlibat langsung menyelesaikan konflik, tetapi bekerjasama dengan organisasi Internasional seperti PBB dan GNB. Bersamaan dengan itu Indonesia menunjukkan solidaritas kemanusiaannya pada rakyat Bosnia. Pada 2 Oktober 1992, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengumumkan, telah mengumpulkan US$ 100.000,00 yang diperuntukkan bagi dana kemanusiaan rakyat Bosnia dan Herzegovina. Bantuan ini dikirimkan melalui PBB.

Selain itu, demi memenuhi tuntutan umat Islam di Indonesia, Soeharto atas nama GNB pada 24 Juni 1993 membentuk biro koordinasi GNB di New York dan sebagai pemimpin formal GNB meminta PBB segera melakukan embargo pengiriman senjata ke Bosnia untuk menghentikan konflik tersebut. Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia saat itu menegaskan jika pengiriman senjata dihentikan maka konflik dapat segera berhenti dan kaum muslim Bosnia dapat mempertahankan dirinya.

Tekanan terhadap pemerintahan Soeharto datang tidak hanya dari kubu Islam di dalam negeri. Ada pula usaha untuk menekan Indonesia oleh OKI. Seperti diberitakan, tahun 1993 dalam pertemuan di Pakistan, 7 anggota OKI menawarkan atas nama Negara-negara Islam untuk mengirimkan 17.000 personel tentara ke Bosnia dan bekerjasama dengan tentara PBB untuk menyelesaikan masalah tersebut. Indonesia yang dari awal telah mengetahui tujuan pertemuan tersebut menolak turut serta dan mengatakan bahwa, dengan mengirimkan tentara kesana tidak sesuai dengan pengertian Indonesia dalam penyelesaian

masalah tersebut. Sebagai ganti pengiriman tentara, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengirim peninjau militernya ke zona konflik dan dengan demikian ia menghindari kemungkinan bila kelak terjadi persinggungan akibat provokasi.

Posisi Indonesia dalam krisis Bosnia sekali lagi menunjukkan bahwa sama seperti masalah lain sehubungan dengan problematika muslim internasional, Jakarta dalam penyelesaian masalah tersebut tidak berubah dan lebih memperhatikan faktor agama, dalam hal ini Islam. Sesuai bukti yang ada kita dapat memastikan bahwa bagi pemerintah Indonesia pengakuan terhadap pentingnya faktor Islam dalam politik luar negerinya tidaklah terhindarkan, hanya saja apabila ada pengakuan pengaruh faktor Islam dan otoritas dari oposisi Islam, maka hal ini bisa saja menimbulkan bertambahnya potensi ketegangan di dalam negeri.

2. Revolusi Iran 1979 dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Islam di Indonesia

Revolusi Iran pada tahun 1979 adalah salah satu peristiwa Internasional yang sangat berpengaruh dalam sejarah akhir kuartal abad ke-XX. Oposisi Islam Iran yang mengakar pada lapisan bawah dan menengah masyarakat, yang dengan cara apapun dianiaya dan diburu oleh kekuatan tentara dan polisi Syah yang represif, dengan pendekatan alami dan rasa nasionalis penganutnya mampu menggunakan ide-ide dan keyakinan tradisi kaum Syiah fanatik yang tanpa pamrih serta siap sedia untuk setia bahkan mengorbankan diri mereka. Pemimpin revolusi Islam Ayatullah Khomeini, yang berada di pengungsian di Perancis, dengan sangat piawai dan aktif menginspirasi masyarakat Iran secara luas, menyerukan agar rakyat menggulingkan "tirani yang berkuasa dengan bantuan "setan", yaitu Barat". Panggilan pemimpin spiritual untuk menyingkirkan pemerintah

berkuasa yang dituduhnya sebagai pengkhianat rakyat, tentu saja menimbulkan rasa marah dan perlawanan yang menjadi senjata utama ditangan rakyat. Tentara dan Polisi, meskipun memiliki kekuatan besar dan bantuan dari Barat, tetap saja tidak mampu membendung kekuatan tak terbatas rakyat yang tengah berkecamuk marah. Dan di bawah panggilan dan seruan pemimpin spiritual revolusi Islam yang dipimpin oleh Khomeini jatuhlah salah satu dari rezim militer terkuat di Asia tahun 70-an.

Pengaruh gelombang kemenangan pemberontakan rakyat dibawah para pemimpin Islam ini sangat kuat dan begitu mengagumkan, sehingga para diktator dan pemimpin-pemimpin di banyak Negara muslim sangat gusar dan terganggu akan nasib rezimnya. Meskipun mereka memiliki mekanisme dan aturan represif untuk menekan oposisi, tetap saja kejadian di Iran ini membuat mereka takut dan kelabakan. Mereka telah menjadi saksi bahwa dibawah tekanan kuat oposisi muslim dalam hitungan minggu telah runtuh mesin politik-militer seperti rezim Syah Iran Reza Pahlevi. Banyak sekali diktator di negara-negara muslim menyimpulkan bahwa keberhasilan Khomeini ditentukan oleh unsur Islam. Panggilan terhadap rasa keberagamaan massa dalam hal ini Iran membuktikan keberadan politisnya. Dalam hal ini para dikator agak tenang dimana revolusi Islam Iran, dalam banyak hal memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Syiah di Iran, yang tentu saja berbeda dari doktrin kaum sunni dan dalam beberapa hal terdapat tingkatan yang lebih, demikian pula sifatnya dalam sejarah perkembangan masyarakat Iran.

Walau revolusi di Iran memiliki ciri tersendiri, tetapi sebagian besar ahli politik di negara muslim dengan segera merasakan cepatnya pengaruh yang diakibatkannya di negara-negara muslim lainnya di Asia dan Afrika. Gelombang radikalisme Islam dan *euphoria* kemenangan dirasakan oleh dunia Islam dari Balkan melalui Asia sampai ke Filipina dan Indonesia.

Akibatnya, kekuasaan rezim diktator di banyak negara muslim mengantisipasinya hampir dengan cara yang sama, yaitu memperkeras politiknya dalam hubungannya dengan para pemeluk agama Islam di daerah-daerah, dan berusaha tidak mengulang kejadian tersebut di negerinya. Perlu di tandai bahwa cara-cara penanganan yang represif melawan oposisi Islam daerah justru menimbulkan apa yang seperti terjadi di Iran, di mana para pemimpin Islam yang diilhami oleh gelombang kemenangan dengan cepat menyerukan propagandanya kepada negara-negara muslim lainnya. Dalam struktur Iran yang baru setelah kemenangan revolusi dibentuk badan khusus yang bertujuan melakukan propaganda Internasional dan memberikan bantuan kepada kaum oposisi Islam di negara-negara lain di seluruh pelosok dunia.

Sebagai titik balik, peristiwa tersebut menunjukkan makna bahwa dunia Islam tidak hanya merasakan pengaruhnya secara langsung, tetapi juga merasakan adanya usaha nyata dalam bentuk turut campur tangannya Ayatullah Khomeini dan pendukungnya terhadap urusan dalam negeri negara-negara Asia dan Afrika. Sebagai contoh, menurut media massa Malaysia dan Indonesia, yang kemudian disanggah oleh pihak Iran melalui perwakilan diplomatiknya, pemerintah di Kuala Lumpur dan Jakarta dengan resmi memperingatkan pemerintah Iran agar tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia dan Malaysia. Bersamaan dengan itu media massa di kedua negara memberitakan pada tahun 1979, berdasarkan sumber di kepolisian kelompok-kelompok oposisi berusaha untuk melakukan kontak dengan organisasi-organisasi Iran yang bergerak dalam upaya mengekspor "revolusi Islam".

Semua tindakan oposisi lokal yang menginginkan kerjasama dengan umat Islam di Iran sedemikian kuatnya dan dalam waktu singkat berbenturan dengan pihak yang berkuasa. Karena itu, jika saja dapat dikatakan, maka salah satu unsur nyata dari pengaruh

revolusi Islam Iran pada negara-negara Islam lainnya termasuk Indonesia yaitu meningkatnya kontrol pemerintah atas berbagai aktivitas politik dari kelompok oposisi Islam lokal, dimana hal tersebut dianggap sebagai ancaman nyata bagi pemerintah yang sedang berkuasa. Atas dasar kemenangan revolusi Iran, Indonesia dan negara muslim lainnya dapat melihat langsung ancaman dari mereka yang memiliki landasan ideologi agama. Karena itu Jakarta menggunakan usaha gabungan termasuk tindakan strategis, dalam upaya mengeliminir pengaruh jatuhnya rezim Iran. Di antara usaha tersebut adalah tindakan untuk mencapai musyawarah dengan organisasi-organisasi Islam dan memakai taktik ancaman dan memperkuat retorika keagamaan dan propaganda, tak terkecuali ancaman hukuman fisik bagi anggota organisasi yang aktif dan radikal.

Mencermati sejauhmana tingkat pengaruh ide revolusi Iran terhadap pandangan umat Islam Indonesia bukanlah pekerjaan sederhana. Seberapa dalamkah pengaruh ideologi revolusi Iran dalam pikiran seorang muslim awam? Dibenarkankah tindakan preventif pihak berkuasa? Seberapa benarkah kemungkinan hal yang sama dapat terjadi di Indonesia? Semua pertanyaan tadi dan yang lainnya sering muncul dalam pemikiran para pengamat yang berusaha memahami inti dari pengaruh revolusi Iran terhadap Jakarta, perkembangan Islam di Indonesia, terhadap evolusi dan artinya bagi kehidupan sehari-hari masyarakatnya maupun dalam seluruh struktur kenegaraannya.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi harus dimengerti, seberapa keras dan apakah politik, ideologi serta nilai masyarakat Syiah dapat diterima oleh kaum muslim Sunni. Selanjutnya, menurut sudut pandang filosofi sinkretisme dan koherenisme yang dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia, berpengaruhkah revolusi tersebut pada masyarakat muslim Indonesia yang menurut sejarah telah membuktikan kemampuannya menyesuaikan diri terhadap beragam bentuk keberadaan masyarakat dan politik.

Sebagai contoh dapat kita ambil keberagaman bentuk Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, malah sebelumnya berada pada masa kejayaan Hindu dan Budha, lalu penjajahan Jepang dan kemudian masa pemerintahan Soekarno (pada masa "Demokrasi Terpimpin") dan terakhir masa pemerintahan totaliter diktator militer rezim Soeharto.

Hal ini dan kesulitan lainnya dalam meneliti pengaruh luar terhadap pandangan masyarakat Indonesia, terlebih penelitian pada tingkat pengaruh revolusi Islam di Iran, tidak diragukan lagi telah mempersulit kemungkinan mengadakan penelitian itu sendiri. Namun kesulitan tersebut tidak dapat mencegah analisa dasar dan tendensi utama perkembangan Islam di Indonesia dibawah vulgarnya pengaruh asing seperti revolusi Islam di Iran. Ia tidak mungkin menjadi alasan menentang analisa dan ketiadaan organisasi pro-Islam yang terdapat di Indonesia dan walaupun kejadian revolusi Islam seperti itu tidak terjadi di Indonesia hal ini dapat dianggap sebagai hasil kerja pihak berkuasa yang mewarisi berbagai persoalan dari para pendahulunya.

Selain itu pula, keberadaan sudut pandang dan pengaruh ide Syiah di Indonesia tampak amatlah lemah dibandingkan negara-negara muslim lainnya terutama beberapa negara Arab tetangga Iran. Ide Syiah tentu saja memiliki ketenaran di Indonesia, namun hanya sebagai bagian dari pemikiran filosofi saja dikalangan pemikir-pemikir Islamnya. Saat ini masyarakat Syiah di Indonesia tidak ada (tidak dominan, pentj.), karena itu basis massa yang dapat menerima ide revolusi Iran secara penuh juga tidak ada, tidak seperti ketika membicarakan Irak, Afghanistan, Arab Saudi dan negara lainnya dimana terdapat kaum Syiah yang berkembang secara baik dan mayoritas.

Beberapa pertanyaan para pengamat terhadap pengaruh revolusi Iran terhadap Islam di Indonesia dapat didasarkan terhadap tiga hal, yang mana mampu dengan benar menilai

pengaruh luar yaitu bagaimana Syiah, berdasarkan paham ideologisnya, dapat mempengaruhi kaum Sunni yang menjadi ajaran mayoritas Islam di Indonesia. Pertama, seberapa terkenalnya karya Khomeini, buah pikirannya sendiri ataupun karya pemikir dan penelitian dari pengamat revolusi Iran lainnya. Kedua, keberadaan catatan kaki dan pesan serta komentar ataupun diskusi dalam media massa lokal ataupun media secara menyeluruh. Ketiga, bagaimana reaksi partai keagamaan lokal, organisasi ataupun gerakan aktivis muslim terhadap publikasi itu. Tetapi selain mengikuti ketiga kalkulasi tadi perlu dipertimbangakan pula peran aktif pemerintah yang resmi yang berusaha dengan segala cara mengurangi pengaruh revolusi Iran terhadap Indonesia. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali publikasi yang mengandung analisa yang bertujuan teologis dan politis tentang revolusi Iran, namun sedikit sekali yang berisikan teori dan pandangan politik pemimpin Islam Iran Ayatullah Khomeini itu sendiri. Tapi itu bukan berarti didalamnya tidak terdapat peran Khomeini dalam revolusi tersebut. Memang sedikit sekali karya tentang analisa filosofis tentang sudut pandang pemimpin Iran itu. Hal ini mungkin disebabkan adanya kekhawatiran dan ketakutan para penulis untuk mempublikasikan ide-idenya yang tentu dapat menimbulkan kemarahan pihak penguasa. Dalam hal ini para pengamat sedikit sekali menulis karya yang menganalisa pemikiran Khomeini dan ini mengurangi keberadaan karya yang mengupas orientasi internasionalisme Khomeini, yang berarti pula telah mengurangi hasrat keingintahuan para pengamat dan peneliti Indonesia. Khususnya karya Khomeini tentang peran spiritual terutama interpretasi paham Syiahnya. Ini semua tidak mengundang keingintahuan terhadap pencipta revolusi Iran. Kaum muda tidaklah begitu tertarik dengan karya Ayatullah Khomeini.

Namun demikian, tanpa mengurangi pengawasan yang dilakukan dengan menyeluruh terhadap penulisan tentang

revolusi Iran, di Indonesia ditemukan sekelompok orang yang pada tahun 1982 membentuk penerbitan buku di Bandung dengan nama "Mizan", yang khusus membahas problematika Syiah. Salah satu karya pemikir Syiah Iran yang terkenal di Indonesia adalah karya-karya Ali Syariati yang menjadi salah satu pencipta ideologi revolusi Iran. Karyanya mengundang ketertarikan orang dimana penelitiannya lebih berdasarkan pada perkembangan proses politik masa kini yang lebih luas dibandingkan menulis dari sudut pandang agama. Dan hal inilah yang telah menarik perhatian para peneliti Islam di Indonesia termasuk diantaranya adalah Amin Rais yang kemudian terpilih menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Menurut Amin Rais karya Ali Syariati memberikan kesempatan unik untuk melihat gerakan Islam internasional tidak hanya dari sudut pandang agama saja, melainkan juga dari segi ekonomi sosial dan hal ini mempermudah pemahaman terhadap kejadian besar seperti revolusi Iran. Karya Syariati seperti juga karya Sayyid Qutub, al-Maududi, Hasan al-Banna dan aktivis Islam lainnya diterbitkan di Indonesia, tak terkecuali oleh penerbit "Mizan".

Pada tahun 1980-an telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterbitkan karya Ali Syariati seperti berikut ini: "Tulisan Suci", 1982; "Haji", 1983; "Kritik Islam terhadap Marksisme dan Ajaran Barat Lainnya", 1983; "Pemikir-Pemikir Ideologi", 1985; "Islam Dalam Retrospektif Sosiologi Agama", 1983; "Peran Para Pemikir Islam", 1985; "Kebangsawanan", 1987; "Sekali lagi", 1987. Selain itu karya tulis Syariati juga secara teratur diterbitkan dibeberapa terbitan Islam terkenal seperti "Al-Nahdlah", "Prisma", "Dakwah".

Dalam beberapa terbitan secara gamblang disebutkan bahwa Syariati memiliki hubungan secara langsung dengan revolusi Islam Iran dan di beberapa kolom disebutkan pula

kalau ia mewakili pemimpin baru terkini ataupun pemikir muslim sayap radikal. Diantara pembaca muda, yang dianggap menarik adalah serangan A. Syariati terhadap penindas kaum muslim dan menuntut ditegakkannya keadilan dan hukum di masyarakat. Menarik juga panggilan Syariati untuk melakukan perang terhadap kekuatan imperialisme yang bersatu dengan elit politik militer masyarakat muslim yang korup. Dengan sudut pandang tersebut rasa simpati terhadap revolusi Islam Iran lebih dapat dijelaskan bagi masyarakat Indonesia yang pada praktik kesehariannya mengakui kebenaran pendapat Syariati tersebut.

Jarang sekali ada analis aspek agama dari revolusi Iran di mass media Indonesia pada tahun 80-an. Pada masa pencapaian revolusi itu, khususnya tahun pertama setelah kemenangan penerbitan muslim berkala di Indonesia, hampir setiap hari ditemui bahan analis tentang kejadian di Iran dan meningkatnya otoritas keagamaan Khomeini. Sehubungan dengan mass media Indonesia yang terbit dalam bahasa Inggris, banyak sekali kejadian yang dibuat hanya secara kronologis tanpa komentar ataupun pendapat apapun. Kadang kala terbitan ini tampil dengan mengagumi kemenangan revolusi Iran. Tapi bersamaan dengan tepuk tangannya, mass media berbahasa Inggris ini terus menerus mengomentari bahwa contoh model revolusi Iran sangat tidak cocok untuk Indonesia dan Negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam tahun 1980-an ciri dari komentar dan laporan berubah-ubah. Sebagaian besar bahan media massa berisikan perang Irak-Iran yang dalam tingkat tinggi telah berdampak merusak persatuan umat Islam dan semua ini dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Pusat perhatian media massa Indonesia, dalam hal ini koran-koran, berpusat pada pengamatan pada perang yang tengah berlangsung, khususnya yang memberitakan insiden yang terjadi saat ibadah haji di Mekkah ketika rombongan haji dari Iran melakukan demonstrasi menuntut pelaksanaan revolusi Islam. Kejadian ini sangat mengejutkan umat Islam

di dunia, dimana hal ini telah merusak tradisi suci umat Islam untuk tidak melakukan aktivitas politik atau sejenisnya dalam bentuk apapun sehingga dapat merusak kebisaaan dan peraturan suci yang berhubungan dengan ritual haji. Secara keseluruhan koran-koran tidak lagi berisikan *euphoria* tentang revolusi Iran, namun demikian terdapat kritik tentang hasil perubahan sistem pemerintahan bagi rakyat jelata Iran dibandingkan dengan yang telah dijanjikan saat revolusi Iran terjadi. Tetapi beberapa publikasi majalah tetap menyerukan pentingnya revolusi dan perjuangan menyukseskannya bagi rakyat Iran. Umumnya media massa Indonesia perlahan-lahan menjauh dan tidak membesar-besarkan arti revolusi Islam di Iran dan mulai mengeluarkan berita secara objektif dan memberi kritik pada revolusi dan signifikansinya bagi dunia internasional.

Pengaruh revolusi Iran terhadap Islam di Indonesia mendapatkan posisinya di partai agama lokal dan organisasi serta pemimpin-pemimpin Islam tertentu. Beberapa pemimpin Islam bersama dengan kolega dari luar negerinya tampil dengan seruan pada umat Islam untuk merayakan tanggal 16 Maret 1979 sebagai "Hari solidaritas muslim internasional dan gerakan pembebasan Iran". Pemerintahan di Jakarta kemudian berusaha mendiskreditkan organisasi muslim tersebut, menuduh mereka akan menggulingkan pemerintahan Indonesia dan akan mendirikan pemerintahan Islam sebagai gantinya. Perlu diingat bahwa mayoritas organisasi Islam di Indonesia meskipun menyatakan puas terhadap kemenangan revolusi Islam di Iran, namun mereka menganggap bentuk tersebut tidak sesuai bagi kondisi Indonesia. Hanya sebagaian kecil organisasi Islam di Indonesia yang terkadang menginginkan meniru jalan yang ditempuh Iran. Bagaimanapun juga, baik dalam ceramah, pembicaraan diantara umat ataupun diantara pemimpin Islam baik dari partai atau organisasi, yang dianggap pemerintah

sebagai pembelot, diantara kekuatan oposisi itu sendiri jarang sekali disebutkan tentang kejadian di Iran atau bahkan pribadi pemimpinnya Khomeini. Tapi pembicaraan tentang otoritas muslim apapun lainnya yang cukup mendapat tempat dan kehormatan adalah tentang pemimpin muslim lokal ataupun pemikir-pemikir Islam di kawasan Timur Dekat pada masa setelahnya, walaupun pada saat revolusi tersebut terdapat banyak wacana tentang Iran dan Khomeini secara khusus. Salah satu pengamat justru sampai menyebutkan bahwa Khomeini memainkan peran sebagai "hakim ketiga" bagi rakyat Indonesia setelah Soekarno dan Soeharto. Namun antusiasme terhadap Khomeini seperti itu menimbulkan pandangan bahwa dia adalah simbol kemenangan Islam dan itu tidak karena di Indonesia mendukung cara dan norma yang memperkuat keyakinan terhadap revolusi Iran.

Apabila kita menganalisa media massa Indonesia tahun 1990-an, maka mayoritas pengamat Islam masa kini di Asia Tenggara memiliki satu pendapat, bahwa revolusi Iran membawa pengaruh kuat terhadap pemikiran agama umat Islam di Indonesia. Dan hal ini juga dikarenakan pada waktu yang bersamaan terjadi pula proses penggalangan kekuatan terhadap kelahiran kembali kekuatan Islam dan aktivitas politik pendukungnya di Indonesia. Revolusi Iran mendapatkan titik temu dengan proses perkembangan tersebut, dimana perasaan identifikasi nasional pada diri sendiri, kesadaran diri menjadi lebih tampak dengan bantuan penyampaian agama. Revolusi Islam di Iran datang pada saat yang cukup tepat tatkala aktivitas umat Islam di Indonesia pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an memiliki kekuatan luas dan menampakkan diri sebagai gerakan baru dalam posisinya sebagai bagian integral dari umat Islam dunia secara keseluruhan. Dengan demikian perhatian penuh tertuju pada kekayaan pemikiran kaum reformator terkenal abad 19 dan

abad 20 seperti Jamaluddin al-Afghani, Rashid Ridla, Mohammad Abduh, Sayyid Qutub, Ali Syariati, al-Maududi dan lainnya yang mempengaruhi umat Islam pada tahun 1980-1990an.

Di sisi lain, kaum muslim lokal dalam keseharian hidupnya semakin sering dihadapkan dengan kebangkitan materialisme Barat lengkap dengan nilai-nilai moralitasnya. Mereka berada dalam posisi yang tidak sesuai dan tidaklah dianjurkan buat dirinya sendiri. Terlebih revolusi Iran terjadi bersamaan dengan usaha pemerintah dan rezim yang tengah berkuasa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan oleh pragmatisme, materialisme dan sekularisme Barat. Menurut sudut pandang tersebut, revolusi Iran menjadi contoh meyakinkan kemenangan Islam terhadap kekuatan imperialisme Barat, ideologi dan amoralismenya. Dalam konteks sedemikian, dengan mudah dimengerti sebab bagaimana reaksi pertama terhadap revolusi Islam Iran menjadi demikian meyakinkan dan secara emosional menjelma menjadi *euphoria* sehingga mengkondisikan para pimimpin Islam di Indonesia untuk tidak bisa tidak memiliki satu pendapat dalam mendukungnya. Bagi sebagian dari mereka tidaklah penting keadaan politik dan hukum dalam Revolusi Iran dan ini tidak lebih hanyalah simbol dari kenyataan sosial dan politik lainnya. Yang terpenting bagi mereka adalah kemenangan ideologi Islam itu sendiri.

Yang paling sulit adalah bagaimana memahami tindakan-tindakan keras yang selalu dilakukan kaum muslim Iran dalam upaya menggulingkan rezim Syah yang berkuasa. Maka bagi umat Islam di Indonesia tampaknya lebih memandang penting bagaimana caranya meyakinkan dan menanamkan pemahaman atas prinsip dan bentuk ideal negara Islam itu sendiri. Simpati dari umat Islam Indonesia pada revolusi Iran tumbuh dari dalam yang terbentuk dalam impian beberapa generasi tentang bentuk pemerintahan yang adil berdasarkan Qur'an dan Syariatnya. Asumsi sejarah dalam pembentukan negara yang demikian

sepertinya secara spontan memberikan inisiatif dalam pikiran umat Islam di Indonesia untuk memberikan rasa simpati dan dukungannya pada revolusi Iran.

Dalam tingkat wacana, salah satu arti penting dari pengaruh revolusi Iran pada Islam di Indonesia adalah penilaian kaum intelek muslim lokal pada kejadian itu. Contohnya, pemikir muslim Indonesia Dawan Raharjo menyebutkan bahwa bagi yang berpaham sama maka bagian yang penting adalah analogi kejadian tersebut antara Iran dan Indonesia. Termasuk diantaranya usaha penguasa baru Iran membebaskan diri dari ketergantungannya terhadap Barat, mandiri menggunakan kekayaan minyaknya serta berusaha menjalankan prinsip dan doktrin Islam dalam praktik yang bertujuan membebaskan diri dari sumber ajaran kapitalisme dan sosialisme di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tataran yang sama, seperti di dalam negeri dan tindakannya di dunia internasional, langkah yang diambil pemimpin baru Iran setelah pengambilalihan kekuasaan, muncul ketidak pahaman dan bahkan celaan diantara masyarakat muslim Indonesia. Dampak negatif yang timbul di Indonesia yaitu revolusi menghasilkan peran alim-ulama yang sedemikian besar dalam pemerintahan Iran yang baru. Hal yang menimbulkan ketidaksimpatikan umat Islam Indonesia adalah tindakan keras yang dilakukan penguasa baru kepada penentangnya yang berasal dari kaum sekuler ataupun pemimpin-pemimpin agama. Emosi negatif umat Islam Indonesia disebabkan pula oleh tindakan Iran di luar negeri, seperti yang telah disebutkan yaitu demonstrasi di Mekkah dan perang Irak-Iran. Mengenai pembebasan dan perang yang berlangsung juga dibahas kedua belah pihak yang bersengketa. Tidak ditemukan sama sekali kesepakatan umat Islam di Indonesia terhadap usaha Iran untuk turut campur dalam urusan dalam negeri negara Islam lainnya dan berusaha memaksakan pemahaman pribadinya terhadap peran Islam di

masa kini. Ketika penilaian objektif atas tindakan politik dalam dan luar negeri Iran, penguasa baru Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini tampak berseberangan dengan kebijakan politik pihak Jakarta, yang berusaha sebisanya mendiskreditkan Iran. Akhirnya, dapat dimengerti mengapa peristiwa revolusi Iran bagi umat Islam di Indonesia justru tidak memberikan pengaruh yang begitu berarti.

Namun demikian, revolusi Islam di Iran itu sendiri secara keseluruhan bagi umat Islam di Indonesia dipandang sebagai suatu peristiwa penting bagi simbol kemenangan dan kejayaan Islam dalam pentas dunia. Menurut sudut pandang simbolisisme, revolusi Iran bagi umat Islam Indonesia dianggap analog dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, yang merupakan kejadian bersejarah dan terkenal di seluruh Asia Tenggara sebagai kemenangan nyata rakyat Asia atas bangsa Eropa.

Secara keseluruhan, semua reaksi Indonesia yang disebutkan diatas terhadap revolusi Islam Iran, penting digaris bawahi beberapa hal berikut ini. Pertama, jika kita tertarik analisa tentang pengaruh nyata dan respon masyarakat Indonesia terhadap berbagai cara yang ditempuh pimpinan baru Iran, maka tak terhindarkan adanya kelengahan dalam menilai permasalahan yang sesungguhnya. Yaitu, pemerintah Indonesia melihat di dalam revolusi Iran tersebut terdapat ancaman nyata secara politik yang dapat mengganggu stabilitas regional dalam negeri sendiri, maupun kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan. Analisa ini mendorong Jakarta mengambil langkah-langkah yang bertujuan mengontrol perkembangan ideologi dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia, yang mampu merongrong "perdamaian dan ketentraman" dalam negeri. Memang Jakarta tidak memutuskan hubungan dengan Iran, akan tetapi mengambil langkah besar untuk mencegah pengaruh ide revolusi Islam itu berpenetrasi lebih dalam ke dasar lapisan terbawah masyarakat Islam Indonesia. Yang paling berbahaya bagi penguasa adalah

Iran dapat menjelma di hadapan umat Islam Indonesia sebagai *prototipe* pembentukan negara Islam di Indonesia.

Pada saat itu, gejala situasi yang tampak menuju kearah tersebut adalah budaya beragama dan berpolitik di Indonesia sangat berbeda dengan Iran, sehingga upaya untuk merealisasikan *scenario* tersebut sangat tidak memungkinkan. Suatu ketika, pemerintah Jakarta bersinggungan dengan kemungkinan tumbuh-kembangnya ekstrimisme di dalam masyarakat Islam sendiri, yang sebagian diantaranya dipengaruhi faktor Iran. Tidak diragukan lagi, ajaran dasar oposisi Islam tidak melihat adanya kepentingan untuk membentuk rezim Islam seperti di Iran, pemerintah Soeharto sendiri juga melakukan apa saja untuk menutup berbagai kemungkinan dan peluang tindakan dari kaum oposisi melakukan tuntutan sosial politik baru yang bertujuan mengganti rezim yang berkuasa. Pada saat itu respon emosional terhadap kemengangan revolusi Islam Iran di kalangan umat Islam secara luas menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar sangat waspada dalam berhubungan dengan kelompok Islam. Sehingga dipandang penting untuk melakukan kontrol yang berkesinambungan terhadap berbagai harapan dan aksi-aksinya.

Kesimpulan dari analis pengaruh revolusi Islam Iran terhadap umat Islam Indonesia yang dianggap penting lainnya adalah kejadian di Iran tersebut merupakan pengaruh terbesar terhadap perkembangan pemikiran agama di negara ini. Mengingat di balik itu semua tidak mustahil tersimpan ide dan spirit kelahiran kembali politik Islam secara umum di Indonesia. Lebih dari itu, umat Islam Indonesia menilai revolusi Islam Iran merupakan salah satu peristiwa yang memiliki arti besar di abad XX; yakni sebuah momentum di mana umat Islam mampu dengan sedemikian kuat dan meyakinkan mendemonstrasikan keunggulannya melawan kekuatan ekonomi, politik dan moral Barat.

Segera setelah kemenangan besar revolusi Islam Iran, banyak pendapat menyatakan rezim mana di negara-negara Asia akan menjadi korban selanjutnya dari arus kebangkitan Islam. Dan andaipun hal itu tidak terjadi, hal ini tentu saja karena tindakan pencegahan yang dilakukan negara-negara muslim tersebut, yang tidak menginginkan aktivitas oposisi Islam bertindak lebih jauh lagi.

Hal berikut yang penting dicermati adalah bahwa pada saat itu peristiwa tersebut telah membentuk arti dan oposisi yang tidak terlalu berbahaya. Semua itu dimungkinkan antara lain karena karakter Islam Indonesia itu sendiri yang sesungguhnya lebih fleksibel, luwes dan tentu saja berbeda jauh dengan karakter Islam-Syiahnya Iran. Islam di negara-negara Asia dan Afrika memiliki kecenderungan yang sama, walaupun berbeda sisi, namun persatuan yang ada tidak merupakan tiruan satu dengan lainnya, melainkan kesatuan dari perbedaan yang terlahir dari spesifikasi sejarah, perkembangan budaya nasional penganut-penganutnya. Sering kali nasib bangsa-bangsa tersebut tergantung pada perbedaan dan corak tersebut.

3. Peran Serta Indonesia dalam Organisasi Islam Internasional

Menelaah berbagai persoalan tentang pengaruh berbagai peristiwa dunia terhadap perkembangan politik luar negeri Indonesia, ataupun negara lainnya, tidaklah sesederhana seperti yang dibayangkan. Akan selalu ada godaan yang cenderung memperbesar peran faktor luar, sehingga membuat sesuatu yang terjadi di dalam negeri seolah-olah bagian dari berbagai peristiwa di luar negeri.

Dalam konteks seperti ini, menilai peran revolusi Iran dalam pembentukan "kecenderungan corak keislaman" pemerintahan rezim Soeharto, dapat dikatakan memiliki pengaruh yang nyata.

Pengaruh tersebut dapat dilihat baik dalam proses perkembangan Islam di Indonesia secara umum, maupun dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri pemerintahannya. Tak diragukan lagi, *berkelindan* dengan tendensi kebangkitan Islam di dunia maupun di dalam negeri Indonesia sendiri, maka perlu dipahami pula bahwa pada awal dasawarsa 1980-an para pengambil kebijakan di Indonesia dihadapkan kepada tugas utama untuk memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan negara agar tidak terfokus hanya di wilayah Asia Tenggara. Kecenderungan itu tampak pada keikutsertaan Indonesia dalam gerakan organisasi Islam Afro-Asia.

Pada tahun 1970-an Jakarta belum tampak secara khusus dan serius untuk berupaya memegang kendali dan peran utama dalam kegiatan organisasi Islam internasional, sekalipun tentunya tidak dapat disebut sepenuhnya bersikap pasif. Dari waktu ke waktu mulai terlihat pemerintah pusat di Jakarta berusaha memanfaatkan perkembangan pengaruh asing "dari faktor Islam" untuk kepentingan dalam negerinya.

Pada periode ini di dunia Islam terbentuk suatu sistem gabungan negara-negara Islam, baik itu di tingkat pemerintahan maupun di tingkat gabungan masyarakatnya. Sebagian besar dari mereka bertujuan menggalang bantuan finansial dan dukungan dari Arab Saudi dan beberapa negara-negara kaya penghasil minyak. Terutama Liga Islam Dunia, yang dibentuk oleh Arab Saudi pada tahun 1962 sebagai pusat dakwah Islam internasional. Selama berdirinya organisasi ini, organisasi Islam Indonesia juga secara aktif bekerjasama dengan liga tersebut. Pada tahun 1981, sesuai inisiatif partai Islam Indonesia dan organisasi Liga Islam Dunia dilakukan proyek besar khusus untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi pengajar dan para pemimpin mesjid di Indonesia.

Umat Islam di Indonesia secara aktif bekerjasama pula dengan organisasi Islam Internasional lainnya pada tahun 1980-1990-an

seperti dengan Asosiasi Pemuda Islam Dunia, Kamar Dagang Islam, Persatuan Masjid Dunia, yang juga dibiayai oleh Arab Saudi. Para pemimpin Islam di Indonesia sangat ingin turut serta dalam puluhan bahkan ratusan seminar, konferensi, diskusi, yang setiap tahunnya dilakukan oleh beragam organisasi dan persatuan Islam dunia. Selain itu melalui jalur perhimpunan-perhimpunan sejenis, organisasi Islam di Indonesia menerima bantuan dalam jumlah besar untuk tujuan sosial ekonomi, yaitu bagi perkembangan penerbitan, pembangunan radio muslim, pelaksanaan diskusi dan konferensi Islam, peningkatan kualifikasi pendidikan pemimpin muslim. Diberikan pula beasiswa yang cukup besar diperuntukkan bagi pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di universitas-universitas Islam terkemuka yang terdapat di negara-negara Timur Dekat dan Timur Tengah. Pada tahun 1982, Liga Islam Dunia memberikan setengah dari anggaran tahunannya, yaitu US$.29 juta untuk pembangunan masjid-masjid di Asia Tenggara.

Kerjasama umat Islam Indonesia dengan sahabat seiman luar negerinya selalu menunjukkan intensitas yang tinggi. Tidak diragukan muslim Indonesia di waktu yang akan datang akan berusaha memperluas kerjasamanya, tidak hanya untuk kepentingan nyata secara materi tapi juga yang terpenting adalah mereka memiliki kesempatan untuk merealisasikan rasa solidaritas dengan saudara seimannya di luar negeri.

Sehubungan dengan pemerintah Indonesia, maka pada tahun 1970-1990-an dapat diamati adanya perubahan dalam hubungan antara pemerintah dan organisasi Islam dunia–Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam tiga puluh tahunan terakhir, keanggotaan organisasi ini telah bertambah. Pada saat didirikan pada tahun 1969 organisasi ini hanya terdiri dari 28 negara anggota. Sedangkan pada tahun 2001 telah menjadi 51 negara anggota, ditambah dengan dua pengamat (dari Bosnia

dan Kazakhstan). Selama kurun waktu tersebut meningkat pula peran penting OKI di negara-negara muslim maupun di dunia. Peran Indonesia pada awal tahun keanggotaannya di OKI dapat dibilang pasif. Sebagai contoh, pada konferensi pendiri OKI tahun 1969 yang lazimnya dihadiri oleh delegasi besar setingkat Presiden maupun Perdana Menteri, delegasi Indonesia malah hanya dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Setelah itu, tahun 1972 pada konferensi di Jeddah, Saudi Arabia, delegasi Indonesia menolak menandatangani peraturan dasar OKI, walaupun ia tetap menjadi anggota tetap organisasi tersebut.

Posisi meragukan tersebut sepenuhnya merefleksikan dan berkaitan erat dengan dinamika yang ada di dalam negeri Indonesia. Tentu saja masyarakat muslim Indonesia mendukung sepenuhnya keikutsertaan dalam kegiatan OKI. Pada waktu yang sama kaum sekuler dan pemimpin lainnya termasuk dari Pusat Penelitian Strategi Internasional (CSIS) memberikan tepuk tangan buat posisi Jakarta yang tidak menandatangani peraturan dasar OKI. Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, mengeluarkan dokumen khusus yang menjelaskan alasan mengapa mereka tidak menandatanganinya. Dalam dokumen tersebut, secara khusus digaris bawahi alasannya karena Indonesia bukan negara Islam. Setelah beberapa hari, Adam Malik mengumumkan bahwa Indonesia tidak ingin memiliki kebijakan yang berorientasi Islam terkait kebijakan dan politik luar negerinya. Dalam menjawab pertanyaan, apakah Indonesia akan berusaha mendapatkan hak penuh keanggotaannya dalam organisasi tersebut, Adam Malik malah menyatakan ia tidak tertarik pada masalah tersebut.

Tidak diragukan, bahwa saat itu pemerintah tidak ingin Indonesia berasosiasi dengan negara-negara Islam, sehingga pemerintah sangat berhati-hati terhadap masalah tersebut. Lebih jelas dan konkrit dikatakan oleh pengganti Adam Malik, yaitu Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusumaatmaja. Ia mengatakan:

"Indonesia akan ikut serta dalam kegiatan OKI selama tidak melanggar prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Keanggotaan kami dalam tingkat pemerintahan pada organisasi tersebut berarti bahwa, kami tidak bisa mengabaikan bahwa 88% penduduk kami menganut Islam".

Pendapat lebih terbuka tentang OKI datang dari salah satu pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ia menyatakan: "Selain semuanya itu, kami tidak ingin memiliki orientasi Islam dalam politik luar negeri kami, termasuk didalamnya alasan dalam negeri yang ada. Itu semua bukan berarti kami menganggap kaum muslim warga negara yang tidak setia..., namun jika situasi dalam negeri akan tetap berlangsung stabil dalam pengertian sesungguhnya, maka bisa saja, kami merasa bahwa OKI merupakan instrument internasional untuk mencapai tujuan luar negeri kami. Dalam tingkat seperti ini apa yang kami terima dari keanggotaan formal ataupun keanggotaan penuh dalam OKI? Pada akhirnya, dalam kepentingan prakteknya tidaklah penting apakah kami menandatangani atau tidak peraturan tersebut. Itu bukalah masalah."

Bersamaan dengan itu pemerintah pusat Jakarta di hadapan khalayak Indonesia seolah-olah membenarkan kesan umum bahwa terdapat rasa kekhawatiran untuk turut serta dalam gerakan Islam internasional karena besarnya potensi penggalangan peran "faktor Islam" dalam politik negara, serta adanya keyakinan, seperti yang dikatakan Mokhtar Kusumaatmaja, bahwa "salah satu tugas pemerintah mencegah organisasi Afro-Asia tersebut menjadi persatuan Pan Arab, yang berkeinginan secara agama mendidik dan memerintah negara lain". Sebagai gantinya, Indonesia mendorong OKI berkesempatan menjadi salah satu komponen utama dalam Gerakan Non Blok.

Penjelasan yang sama juga diberikan oleh anggota parlemen Indonesia dari Fraksi Islam, ketika beberapa parlemen negara-

negara Islam mengajak membentuk organisasi parlemen Islam, yang mewakili seluruh negara muslim. Anggota parlemen Indonesia menyatakan bahwa Indonesia bukan negara Islam, maka tidak beralasan secara resmi masuk dalam asosiasi parlemen negara-negara muslim. Sebagai gantinya mereka mengusulkan membentuk asosiasi tidak resmi parlemen negara-negara muslim yang anggotanya mewakili diri mereka sendiri, jadi bukan mewakili negara.

Sejalan dengan itu, dalam politik resmi pemerintah Indonesia terkait seluruh peristiwa yang terjadi di dalam maupun luar negeri seperti disebutkan diatas, dalam konteks faktor sosial-ekonomi dan politik-agama pada awal tahun 1980-an dan khususnya tahun 1990-an, jelas terlihat perubahan dalam kerjasama yang lebih intensif dengan gerakan antar pemerintahan muslim dunia, termasuk didalamnya dengan OKI. Indonesia mulai aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah politik OKI, seperti dalam penyelesaian masalah minoritas suku Moro di daerah selatan Filipina, diskusi dan penentangan melawan usaha penggagalan penetapan peraturan dalam OKI dan menuduh perjanjian Camp David antara Mesir dan Israel yang mengkhianati kepentingan Arab.

Kecenderungan ini tampak jelas dalam penandatanganan Perjanjian Umum Jakarta tahun 1983 dalam hubungan kerjasama ekonomi, teknik dan perdagangan antara negara anggota OKI. Pada tahun 1983 itu pemerintah Indonesia juga menjadi organisator sidang Kamar Dagang Islam Internasional. Selain itu, Indonesia selalu menjadi sekretariat OKI dan pemimpin Bank pembangunan Islam. Di waktu yang sama dalam kesadaran masyarakat Indoensia bertambah kuat, dengan bantuan pers, radio dan televisi, pendapat tentang perlunya dukungan penuh organisasi Islam internasional non pemerintah. Sebagai contoh menarik, Presiden Soeharto secara pribadi membuka sidang

Konferensi Islam Dunia bidang media massa pada tahun 1980 di Jakarta, sidang ini sendiri sangat erat hubungannya dengan Liga Islam Dunia (yang bermarkas besar di Mekkah). Beberapa waktu wakil Indonesia di Liga Islam Dunia yaitu seorang pemimpin Islam Indonesia yang terkenal Muhammad Natsir. Wakil dari Indonesia lainnya pernah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Pelajar Islam Dunia. Dari tahun 1972-1975, salah seorang wakil dari Indonesia menjadi anggota sekretariat Asosiasi Pemuda Islam Dunia.

Mulai tahun 1970-an, Indonesia berusaha bekerjasama erat dengan struktur ekonomi dan keuangan Islam dunia, seperti dengan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank, IDB). Kerjasama ini membawa keuntungan sendiri, dimana sejak tahun 1974-1988 bank tersebut memberikan modal lebih dari USD 50 juta bagi perekonomian Indonesia. Dan walaupun angka tersebut berada dibawah nilai investasi bank tersebut dalam perekonomian Turki ataupun Syria misalnya, jumlah tersebut cukup membantu Indonesia menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dibidang sosial-ekonomi. Kedekatan Indonesia-OKI tampak setelah naiknya Hamid Al-Ghabid dalam tampuk kepemimpinan organisasi tersebut, yang setelah konferensi di Jeddah April 1989 melakukan kunjungan resmi ke Jakarta sebagai tamu resmi Menteri Luar Negeri Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Hamid menyampaikan terima kasihnya atas keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan-kegiatan OKI. Ia mengajak kerjasama yang lebih luas lagi antara OKI-Indonesia.

Tendensi kedekatan Indonesia-OKI berkembang lagi setelah Presiden Soeharto untuk pertama kalinya memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi para Kepala Negara Islam anggota OKI pada 9-12 Desember 1991. Seperti dikatakan oleh pengamat Indonesia, Azyumardi Azra, dalam konferensi di Aceh keinginan Indonesia untuk lebih dekat dengan OKI tampak

dalam penampilan resmi Soeharto dalam konferensi tersebut. Sebagian, ia mendukung usulan Arab Saudi untuk mengadakan konferensi yang membahas minoritas Islam di dunia. Ia juga mengumumkan bahwa, Indonesia siap berbagi kemajuannya dalam bidang pertanian terutama bidang pangan dengan negara muslim lainnya. Bersamaan dengan itu, Soeharto menyampaikan seluruh keberhasilan yang dicapai Indonesia dalam program keluarga berencana, dalam hal ini sesuai dengan dasar yang diletakkan dalam Deklarasi Konferensi Islam Dunia pada Februari 1990 di Aceh. Presiden Indonesia menyatakan harapannya, bahwa pertemuan antar Kepala Negara anggota OKI mampu membuka jalan bagi negara-negara Islam untuk lebih dalam mempelajari bahan-bahan yang dipersiapkan untuk dibahas dalam konferensi Aceh, yaitu oleh komisi kerja "masalah keluarga berencana sesuai dengan tradisi muslim dan ajaran syariat". Pada penutupan pidatonya Soeharto kembali menegaskan kesiapan negaranya membentuk Pusat Persiapan Telekomunikasi di Bandung untuk dipergunakan demi kepentingan seluruh negara muslim.

Dengan jelas dan tanpa keraguan langkah Soeharto dalam kerangka kerjasama lebih lanjut dengan OKI dan gerakan muslim internasional lainnya tampak lebih berkembang dan mendetail ditingkat pejabat tinggi Indonesia pada masa selanjutnya. Tak diragukan lagi, diantara mereka itu terdapat B. J. Habibie yang ditunjuk oleh Soeharto menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi yang bersamaan dengan itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pertengahan April 1992 ia mengunjungi Arab Saudi dan Mesir, disana ia bertemu Raja Fahd dan Presiden Husni Mubarak.

Pada pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin Arab Saudi ia mengusulkan diadakannya seminar tingkat pemerintah pada bulan November 1992 di Jakarta, untuk membahas pemasaran

produksi industri strategis di negara-negara anggota OKI. Ia juga menyampaikan rencana pemerintahan Soeharto mengadakan pameran hasil produksi Indonesia yang menggunakan teknologi tinggi pada bulan Oktober di Jeddah. Sesuai usul Presiden Mesir Husni Mobarak, pameran tersebut direncanakan ulang untuk diadakan di Kairo pada akhir bulan Oktober 1992. Habibie menyampaikan bahwa Indonesia memproduksi pesawat terbang, kapal penumpang, industri alat-alat berat dan alat komunikasi canggih serta siap melakukan pemasaran barang-barang tersebut di negara-negara OKI.

Bersamaan dengan itu, sebagai Ketua "ICMI" Habibie menggunakan kesempatan tersebut menceritakan tujuan utama dan tugasnya sehubungan dengan rencana "ICMI" membangun "Pusat Muslim" masa kini di Jakarta untuk memperkuat dakwah Islam.Sehubungandenganrencanatersebutdidalamgedungharus terdapat pula mesjid sebagai tempat melaksanakan kewajiban agama dalam berbagai bahasa dunia, juga perpustakaan besar dengan buku-buku keislaman, yang dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia. Mengetahui rencana tersebut Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Saud, dan Presiden Bank Pembangunan Islam, Ahmad Mohammed Ali, dengan cepat menyatakan kesiapannya membantu pembangunan gedung pusat muslim tersebut dan segera menyalurkan kreditnya.

Keterbukaan dan keeratan hubungan dekat antara pemerintah Indonesia dengan organisasi muslim semakin tampak jelas pada tahun 1990-an, tatkala Jakarta tidak mendua lagi dalam menyatakan kebijakannya. Pemerintah menyatakan siap bekerjasama yang saling menguntungkan secara ekonomi maupun menurut sudut pandang politik dalam menggunakan prinsip kerjasama politik-agama dengan negara-negara Asia dan Afrika. Dengan begitu meyakinkan kebijakan dan langka politik tersebut telah pula mampu mengislamisasikan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Dapat dikatakan, secara resmi pemerintah, khususnya Soeharto secara pribadi juga menunjukkan dukungan penuh terhadap hal tersebut. Akan tetapi, proses islamisasi kehidupan politik Indonesia sebenarnya tanpa hal itu juga sudah berlangsung secara aktif dan dinamis. Penting pula digarisbawahi bahwa rezim Soeharto telah meyakinkan fakta tersebut untuk tetap mempertahankan keadaan politik "*status quo*" di dalam negeri.

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa hubungan Soeharto dengan gerakan dan organisasi Islam internasional dari tahun 1966 sampai tahun 1990-an menggambarkan suatu evolusi keperansertaannya yakni dari tingkat kepasifan hingga pernyataan inisiatif-aktif dengan harapan mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi yang nyata. Bila tahun 1970-an pemerintahan Soeharto lebih memperhatikan masalah yang berhubungan dengan nasib integrasi regional, khususnya ASEAN, maka pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an tampak bahwa tanpa mengurangi kepentingan kerjasamanya di tingkat regional, Indonesia juga memanfaatkan adanya kekuatan yang tersimpan berupa pencarian kebahagiaan dalam "spirit persaudaraan" sesama muslim internasional. Kerjasama tersebut juga menunjukkan efektivitasnya. Sangat nyata, kebijakan politik pemerintahan Soeharto telah pula menentukan pilihannya untuk menempuh jalan tersebut.

4. Indonesia dan Konflik di Afghanistan

Sekalipun terdapat banyak upaya mendekati negara-negara penting dunia muslim dan mendapatkan sekutu yang menguntungkan, bukan berarti Indonesia kehilangan kemampuannya untuk memutuskan sendiri kebijakan luar negerinya, termasuk dalam hal ini hubungannya dengan masalah-masalah di dunia muslim. Salah satu masalah, yang menunjukkan tingkat persatuan dan kesatuan (keintiman)

pemerintah Jakarta dengan negara-negara muslim lainnya adalah respon terhadap serangan Uni Soviet ke Afghanistan. Disamping peran aktif negara anggota utama OKI seperti Arab Saudi dan negara penghasil minyak lainnya, Indonesia dalam hal ini juga mendemonstrasikan kemandirian dan kepiawaannya dalam memposisikan kebijakan sebagai kubu anti-Soviet.

Sejak awal terjadinya perang sipil di Afghanistan pada akhir tahun 1970-an pemerintah Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik yang mengakui pemerintah Kabul yang baru. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga terus menerus menunjukkan sikap simpati pada kaum oposisi muslim. Namun hal ini tidak berarti mengakui pembentukan pemerintahan peralihan Islam yang dibentuk oleh kaum Mujahid pada 23 Februari 1989 di daerah Pakistan, walapun "Organisasi Konferensi Islam" merekomendasikan untuk melakukan langkah tersebut. Dari seluruh negara OKI, hanya 4 negara mengakui pemerintah yang dibentuk di daerah Pakistan tersebut. Yaitu Pakistan itu sendiri, Arab Saudi, Sudan dan Bahrain. Agak kebelakang kemudian, yaitu bulan April 1989 Menteri Luar Negeri pemerintahan peralihan Mujahidin mengunjungi Malaysia dan Indonesia secara khusus untuk mendapatkan pengakuan hubungan diplomatik dari kedua negara. Saat itu Malaysia mengakuinya, namun tidak demikian dengan Indonesia.

Sebagai dasar atas penolakannya, Indonesia mengajukan alasan bahwa pemerintahan tersebut hanyalah pemerintahan sementara dan berada di atas tanah asing, bukan tanah daerah sendiri. Tetapi sebenarnya alasan penolakan tersebut memliki argumentasi lain. Karena pada keadaan yang sama Indonesia juga pernah mengakui pemerintahan sementara Front Pembebasan Palestina (FPP) ataupun Koalisi Pemerintahan Demokratik Kamboja. Ketika Indonesia membuat hubungan diplomatik dengan FPP, Menlu Ali Alatas mengumumkan bahwa rakyat Palestina di bawah pimpinan FPP telah lebih dari 40 tahun

memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaannya. Demikian pula dengan Kamboja, Indonesia menyatakan fakta bahwa pemerintahan tersebut berada dalam pengusiran dan telah memperoleh pengakuan oleh PBB. Dengan kata lain, Indonesia yang saat itu sering mengatakan pelaksanaan "politik luar negeri bebas aktif", apabila sesuai dengan kepentingannya maka akan berargumentasi bahwa suatu keadaan telah diakui oleh PBB.

Di sisi lain, Malaysia mengajukan alasan pengakuannya berdasakan "solidaritas Islam". Jakarta saat itu belum ingin menimbang problematika Afghanistan melalui prisma faktor keagamaannya. Penolakan hubungan diplomatik dengan pemerintah Mujahidin yang dalam pengasingan, sebenarnya kalau menurut beberapa pengamat, dikarenakan Indonesia tidak ingin merusak hubungannya dengan Moskow. Motif lain adalah usaha Jakarta untuk tidak membuat Presiden buruk bagi negara lainnya, dimana banyak tinggal kaum muslim. Selain itu, menurut redaksi koran terkenal di Jakarta "Merdeka", Indonesia tidak mengakui pemerintahan Mujahidin karena tahu hal itu hanya mempertajam konflik di Afghanistan. Berdasarkan hal itu, Indonesia memutuskan untuk menggunakan salah satu prinsip hukum internasional, yaitu tidak turut campur urusan dalam negeri negara lain serta menghindari kesalahan tindakan yang sering diakibatkan oleh emosi solidaritas beragama.

Tahun terakhir kepemimpinan Soeharto, kebijakan politik pemerintah cenderung mengambil jalan tengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dalam suatu negara. Cara tersebut terlihat dalam penjelasan Menlu Ali Alatas pada pertemuan koordinasi Menteri Luar Negeri OKI pada sidang ke-52 Sidang Umum PBB tanggal 2 Oktober 1997. Terkait dengan Afghanistan ia mengatakan, "pihak yang berkonflik harus secepatnya memulai dialog untuk mencapai penyelesaian politik atas konflik yang ada dan menciptakan atmosfer dunia yang tenang dengan tujuan perbaikan ekonomi yang rusak serta memulai fungsionalisasi

aparatur negara. Karena itu keseluruhan dan tanggung jawab akhir terletak pada pemimpin-pemimpin Afgan itu sendiri, yang mana hari ini wajib untuk menempatkan kepentingan rakyatnya diatas ambisi fraksinya sendiri."

Dari pernyataan-pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia di atas maka jelas bahwa Jakarta tidak ingin mengambil posisi tertentu dalam konflik di Afghanistan dan berusaha agar konflik tersebut diselesaikan secara damai demi kepentingan perbaikan ekonomi dan stabilitas negara tersebut. Pada tahun berikutnya, Indonesia berperan aktif di PBB untuk penyelesaian damai konflik Afghanistan, namun masalah tersebut seperti kita ketahui semakin menegangkan dan rumit. Dengan pandangan yang sama, Menlu Indonesia Ali Alatas berpidato di sidang antar menteri luar negeri negara-negara anggota OKI pada 28 Juni 1999.

Indonesia, untuk masalah Afghanistan selalu tampil dengan posisi mengutamakan pentingnya melakukan dialog damai antara pihak yang bersengketa, fraksi-fraksinya, partai dan kelompok-kelompok yang ada, karena hanya berdasarkan hal tersebutlah menurut Jakarta, dapat tercipta perdamaian dan ketenangan di tanah Afghan.

5. Peran Ibadah Haji di Indonesia

Salah satu dari lima kewajiban setiap muslim adalah, melaksanakan setidaknya sekali seumur hidup ibadah Haji di suci kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekkah dan Madinah. Kaum muslim Indonesia, demikian pula penganut yang sama di negara lainnya akan merasakan suatu kebahagiaan, apabila memiliki kesempatan untuk pergi beribadah di Mekkah dan Madinah.

Menurut tradisi, institusi kehajian memainkan peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Pada zaman kolonialisme Belanda, kegiatan berhaji tidak hanya memiliki arti agamis, tetapi

pelakunya selain berkesempatan untuk memenuhi kewajiban suci agamanya dapat pula mengenal dunia lain walaupun hanya dalam waktu yang singkat merasakan sebagai orang yang bebas dan merdeka. Banyak peziarah yang tetap tinggal di Arab Saudi untuk belajar ataupun bertujuan dagang dapat berkenalan dengan ajaran-ajaran para filosof Islam yang terkenal, pemikir maupun pemimpin-pemimpin masyarakat negara-negara Timur Dekat dan Timur Tengah. Merasakan perasaan bebas tersebut, sekembalinya ke tanah air tentu saja mereka merasa perbedaan dari sikap permusuhan ataupun rasa ketidaknyamanan dalam pemerintahan Belanda, walaupun itu bukan berarti mereka semua menjadi pejuang yang aktif melawan perbudakan orang Eropa. Banyak diantara mereka hanya menjadi penganut agama biasa dan memposisikan diri sebagai ancaman penjajah Belanda. Namun demikian diantara administrasi penjajah juga terbentuk semacam "Hajiphobia". Mereka langsung membayangkan, di wajah orang-orang Indonesia yang kembali dari ibadah haji, bahaya dan aktivitas mereka.

Berikutnya perlu dicatat bahwa, keyakinan seperti itu tidak hanya sekali muncul di antara pejabat-pejabat, sehubungan dengan usaha kemerdekaan Indonesia. Beberapa pejabat juga menganggap, orang-orang yang kembali dari berhaji menampakkan adanya ancaman bagi penguasa yang memerintah. Hal ini dapat dijelaskan, karena sekembalinya mereka sepertinya ada peningkatan aktivitas propaganda Islam. Dalam hal ini kita bukan membicarakan pandangan politik melainkan tingkat kepercayaan beragama di hati seorang penganut agama. Setelah berhaji, banyak dari mereka yang mampu membuka sendiri sekolah-sekolah, kursus dan institusi pendidikan agama lainnya. Dalam pada itu mereka tetap setia pada politik bangsanya. Sayangnya, pejabat pemerintahan sering mengasosiasikan kepercayaan beragama dengan hal-hal yang mengingatkan mereka akan ancaman Islam-politik.[•]